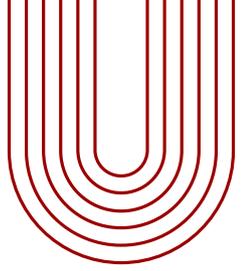




PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW UTARA



LAPORAN K I N E R J A T A H U N 2 0 2 2

bangga
melayani
bangsa

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



Drs. DEPRI PONTOH
BUPATI

Drs. AMIN LASENA, MAP
WAKIL BUPATI



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 81 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) perlu disusun untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi dan tujuan serta sasaran organisasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
8. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan dokumen laporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022.

KETIGA . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	

- KETIGA : Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 17 Maret 2023
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



DEPRI PONTOH

Paraf Koordinasi	
Kepala Unit Kerja	Kabag Hukum
	



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEPRI PONTOH**
Jabatan : Bupati Bolaang Mongondow Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Boroko, 31 Januari 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA



DEPRI PONTOH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,50
	1.2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,93
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,22
3. Meningkatnya daya beli masyarakat	3.1. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rupiah	9,85
	3.2. Gini Ratio	Poin	0,33
4. Menurunnya beban pengeluaran keluarga	4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75
	4.2. Persentase Keluarga Sejahtera	%	50,94
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	5.1. Opini BPK	Predikat	WTP
	5.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Sedang
6. Meningkatnya pelayanan public	6.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat (rata-rata IKM)	%	77,40
7. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	7.1. Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	36,46
	7.2. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	10,76
	7.3. Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	1,00
	7.4. Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	milyar	15,00
8. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	8.1. Cakupan <i>Universal Acces</i>	%	93,57
	8.2. Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	90,00
	8.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	75,04

Anggaran Tahun 2022

Belanja	Rp. 701.293.523.898
Belanja Operasi	Rp. 406.268.693.907
Belanja Modal	Rp. 181.062.917.782
Belanja Tidak Terduga	Rp. 2.074.283.609
Belanja Transfer	Rp. 111.887.628.600
Surplus/(Defisit)	Rp. (24.738.612.917)
Pembiayaan Daerah	Rp. 24.738.612.917
Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 24.738.612.917
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 0,00

Boroko, 31 Januari 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA



DEPRI PONTOH



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Trans Sulawesi No. 01 Desa Boroko Kecamatan Kaidipang, Kode Pos 95765

PERNYATAAN REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk Tahun Anggaran 2022 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Reviu dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, masih terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan didalam laporan kinerja ini.

Demikian pernyataan reviu ini untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Boroko, 30 Maret 2023

INSPEKTUR



SULHA MOKODOMPIS, S.Pd, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19680403 199104 2 002

KATA PENGANTAR



Dengan memohon Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, *Allah swt* atas petunjuk dan bimbingan-Nya semata sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022**, sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018–2023 sebagai perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta menciptakan Good Governance dan Clean Government juga sebagai sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Kinerja ini menginformasikan tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.



Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan serta meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Boroko, 17 Maret 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


DEPRI PONTOH



KATA PENGANTAR



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil (result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolak ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan. Tahun 2022 merupakan 2 Tahun terakhir dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2018-2023, secara umum pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam mencapai visi, misi dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tersebut untuk mewujudkan Visi telah ditetapkan 4 Misi, 4 Tujuan, 8 Sasaran. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 06 Tahun 2021, maka capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 dalam rangka mencapai visi, misi dan tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tergambar pada tabel berikut :

Capaian Kinerja Misi Per Tujuan

NO	TUJUAN	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI CAPAIAN
1	2	3	4	5
MISI I: Mewujudkan Sumber Daya Manusia				
1	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	3	102,46	SANGAT BERHASIL
MISI II : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan				
2	Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani	1	81,17	BERHASIL



MISI III : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Berbasis Pertanian				
3	Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkeadilan	1	90,47	BERHASIL
MISI IV : Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah				
4	Meningkatnya Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur Sesuai Tata Ruang Yang Berwawasan Lingkungan	1	95,17	SANGAT BERHASIL
Total / Rata-Rata		7	92,32	BERHASIL

Capaian Kinerja Misi Per Tujuan

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI CAPAIAN
1	2	3	4	5
MISI I: Mewujudkan Sumber Daya Manusia				
TUJUAN I: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia				
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	2	103,44	SANGAT BERHASIL
2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	1	100,82	SANGAT BERHASIL
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	2	94,27	BERHASIL
4	Menurunnya beban pengeluaran keluarga	2	101,38	SANGAT BERHASIL
MISI II : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan				
TUJUAN II : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani				
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	2	100	SANGAT BERHASIL
6	Meningkatnya pelayanan public	1	106,25	SANGAT BERHASIL
MISI III : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Berbasis Pertanian				
TUJUAN III : Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif Dan Berkeadilan				
7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah	4	79,46	CUKUP BERHASIL
MISI IV : Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah				
TUJUAN IV : Meningkatkan Cakupan Dan Kualitas Layanan Infrastruktur Sesuai Tata				
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	3	98,56	SANGAT BERHASIL
Total / Rata-Rata		17	97,13	SANGAT BERHASIL



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	2
1.4. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	5
1.5. Organisasi Perangkat Daerah	6
1.6. Isu Strategis (Strategis Issued)	11
1.7. Sistematika Penyajian.....	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2020.....	18
2.1.1. VISI.....	18
2.1.2. MISI	19
2.1.3. TUJUAN	20
2.1.4. SASARAN STRATEGIS.....	22
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	25
2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT).....	28
2.4. PERJANJIAN KINERJA (PK)	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	35



3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... 35

3.2. Analisis Kinerja..... 41

3.3. Realisasi Anggaran..... 118

 3.3.1. Pendapatan Daerah..... 118

 3.3.2. Belanja Daerah..... 120

BAB IV PENUTUP 129

LAMPIRAN-LAMPIRAN:



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1	Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Per Kecamatan Tahun 2018-2022	4
Tabel 1. 2	Susunan Organisasi	11
Tabel 2. 1	Sasaran Strategis Jangka Menengah Tahun 2018-2023.....	22
Tabel 2. 2	Matriks Hubungan Visi, Misi, dan Tujuan.....	23
Tabel 2. 3	Indikator Kinerja Utama 2018-2023	25
Tabel 2. 4	Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2022	28
Tabel 2. 5	Perjanjian Kinerja Tahun 2022	29
Tabel 2. 6	Rencana Program dan Anggaran 2022.....	31
Tabel 3. 1	Skala Interval dan Predikat Capaian Kinerja	36
Tabel 3. 2	Capaian Kinerja Tujuan	37
Tabel 3. 3	Rangkuman Hasil Capaian Tujuan.....	38
Tabel 3. 4	Capaian Kinerja Sasaran	39
Tabel 3. 5	Rangkuman Hasil Capaian Sasaran.....	40
Tabel 3. 6	Pengukuran Kinerja Tujuan 1	42
Tabel 3. 7	Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	43
Tabel 3. 8	Persentase Kemiskinan di Kab. Bolmut, Prov. Sulut & Nasional Tahun 2018-2022.....	45
Tabel 3. 9	Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kab. Bolmut, Prov. Sulut & Nasional Tahun 2018-2022.....	46
Tabel 3. 10	Pengukuran Kinerja Tujuan 2	50
Tabel 3. 11	Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi.....	50
Tabel 3. 12	Pengukuran Kinerja Tujuan 3	53
Tabel 3. 13	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Dalam Jutaan Rupiah.....	55
Tabel 3. 14	Kontribusi Sektor/Lapangan Usaha Terhadap PDRB Kab. Bolmut	56
Tabel 3. 15	Pengukuran Kinerja Tujuan 4	58
Tabel 3. 16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Kab. Bolmut Tahun 2021	59
Tabel 3. 17	Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1	60
Tabel 3. 18	Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non	



Formal Tahun 2022	62
Tabel 3. 19 Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2022	63
Tabel 3. 20 Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Tahun 2022.....	63
Tabel 3. 21 Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Tahun 2022.....	64
Tabel 3. 22 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2	65
Tabel 3. 23 Kasus Penyakit Menular di Masyarakat Tahun 2018-2022	74
Tabel 3. 24 Kasus Penyakit Tidak Menular di Masyarakat Tahun 2019-2022.....	75
Tabel 3. 25 Persentase Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular	76
Tabel 3. 26 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	76
Tabel 3. 27 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4	84
Tabel 3. 28 Kondisi Angkatan Kerja Tahun 2022.....	86
Tabel 3. 29 Kondisi Keluarga Sejahtera Kab. Bolmut Beberapa Tahun Terakhir.....	88
Tabel 3. 30 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5	92
Tabel 3. 32 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6	98
Tabel 3. 33 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7	103
Tabel 3. 34 Peningkatan Produksi Pertanian.....	104
Tabel 3. 35 Peningkatan Produksi Perikanan.....	106
Tabel 3. 36 Data Investasi Tahun 2022.....	109
Tabel 3. 37 Kondisi Jalan dan Jembatan.....	111
Tabel 3. 38 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8	112
Tabel 3. 39 Universal Access.....	113
Tabel 3. 40 Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022.....	119
Tabel 3. 41 Capaian Pendapatan Transfer.....	119
Tabel 3. 42 Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.....	120
Tabel 3. 43 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung T.A. 2022	121
Tabel 3. 44 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung T.A. 2022	122
Tabel 3. 45 Realisasi Anggaran BTL dan BL T.A. 2022.....	122
Tabel 3. 46 Proporsi Anggaran BTL dan BL Terhadap Total Belanja Daerah T.A. 2022.....	123
Tabel 3. 47 Realisasi dan Efisiensi Anggaran 2022 per Program.....	124



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan	3
Grafik 1. 2 Pertumbuhan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022.....	4
Grafik 3. 1 Perbandingan IPM Kab. Bolmut Dengan Prov. Sulut dan Nasional 2018-2022.....	43
Grafik 3. 2 Defendency Ratio Kab. Bolmut Tahun 2018-2022	48
Grafik 3. 3 Persentase Penduduk Usia Non Produktif dan Usia Produktif di Kab. Bolmut Tahun 2018-2022	48
Grafik 3. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kab. Bolmut Tahun 2018-2022	54
Grafik 3. 5 Perbandingan Capaian RLS dan HLS antara Pemerintah Pusat, Prov. Sulut, dan Kab. Bolmut Tahun 2022.....	61
Grafik 3. 6 Angka Harapan Hidup Kab. Bolmut dari Tahun 2019-2022	65
Grafik 3. 7 Perbandingan Angka Harapan Hidup Antara Pemerintah Pusat, Prov. Sulut, dan Kab. Bolmut Tahun 2022.....	66
Grafik 3. 8 Perkembangan Capaian Imunisasi Lengkap Tahun 2022.....	67
Grafik 3. 9 Angka Kematian Bayi dari Tahun 2018-2022.....	68
Grafik 3. 10 Kondisi AKI dan Jumlah Kematian Ibu dari Tahun 2018-2022.....	68
Grafik 3. 11 Prevelensi Stunting	69
Grafik 3. 12 Kondisi Epidomiologi Kasus Covid 19 di Kab. Bolmut Tahun 2022 ...	71
Grafik 3. 13 Jumlah Penyakit Menular di Masyarakat Kab. Bolmut Tahun 2022	72
Grafik 3. 14 Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kab. Bolmut Empat Tahun Terakhir	77
Grafik 3. 15 Perbandingan Pengeluaran Perkapita Nasional, Provinsi dan Kabupaten	78
Grafik 3. 16 Kondisi Gini Ratio Kab. Bolmut Tahun 2019-2022.....	80
Grafik 3. 17 Perbandingan Kondisi Gini Ratio se-Kab/Kota Prov. Sulut	81
Grafik 3. 18 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka 4 Tahun Terakhir.....	86
Grafik 3. 19 Jumlah Keluarga Sejahtera	89
Grafik 3. 20 Nilai LPPD Tahun 2018-2020.....	95
Grafik 3. 21 Perkembangan Nilai IKM.....	99



Grafik 3. 22 Nilai IKM pada UPP..... 99

Grafik 3. 23 Perkembangan Nilai Univesal Acces..... 112

Grafik 3. 24 Perkembangan Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW..... 113

Grafik 3. 25 Perkembangan Kualitas Lingkungan..... 114



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kondisi Gini Ratio Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2022	83
Gambar 3. 2 Pendataan Keluarga Kediaman Bupati Bolaang Mongondow Utara oleh kader Pendata di dampingi Tim dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90
Gambar 3. 3 Pendataan Keluarga Kediaman Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara oleh kader Pendata di dampingi Tim dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90
Gambar 3. 4 Pendataan Keluarga Kediaman Ketua DPRD Bolaang Mongondow Utara oleh kader Pendata di dampingi Tim dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90
Gambar 3. 5 Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Oleh Bupati dan Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara.....	91
Gambar 3. 6 Opini BPK.....	93
Gambar 3. 7 Penyerahan LKPD dan LHP T.A. 2021	94
Gambar 3. 8 Pembangunan Infrastruktur Jalan.....	111
Gambar 3. 9 Pengukuran Indeks Kualitas Air	115
Gambar 3. 10 Pengukuran Indeks Kualitas Udara	116





BAB I

PENDAHULUAN



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Insatansi Pemerintah, Pelaporan kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja dan reuiu kinerja. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reuiu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyelenggarakan SAKIP tahun 2022 telah menyusun:

- 1) Rencana strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;
- 2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2022
- 3) Perjanjian Kinerja (PK) Bupati BolaangMongondow Utara tahun 2022.
- 4) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2022

Sedangkan pelaporan kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2021 tersebut, akan disajikan dalam buku ini.



1.2. Landasan Hukum

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pasal 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Laporan Kinerja tahunan SKPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota, paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir; dan
3. Pasal 22 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Kinerja tahunan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.3. Gambaran Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibentuk sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan posisi geografisnya, letak astronomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki batas-batas:

Sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo; sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow. Sebagai daerah yang terletak di garis Khatulistiwa, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya



mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 Kecamatan dan 107 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, adalah berupa daratan seluas 1.856,86 km². Luas daratan masing-masing Kecamatan, yaitu: Sangkub (567,85 Km²), Bintauna (348,94 Km²), Bolangitang Timur (445,64 Km²), Bolangitang Barat (293,75 Km²), Kaidipang (85,09 Km²) dan Pinogaluman (115,59 Km²).

Grafik 1.1
Luas Wilayah Per Kecamatan



Sumber : Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka, 2022

Suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut. Semakin padat suatu wilayah, maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:



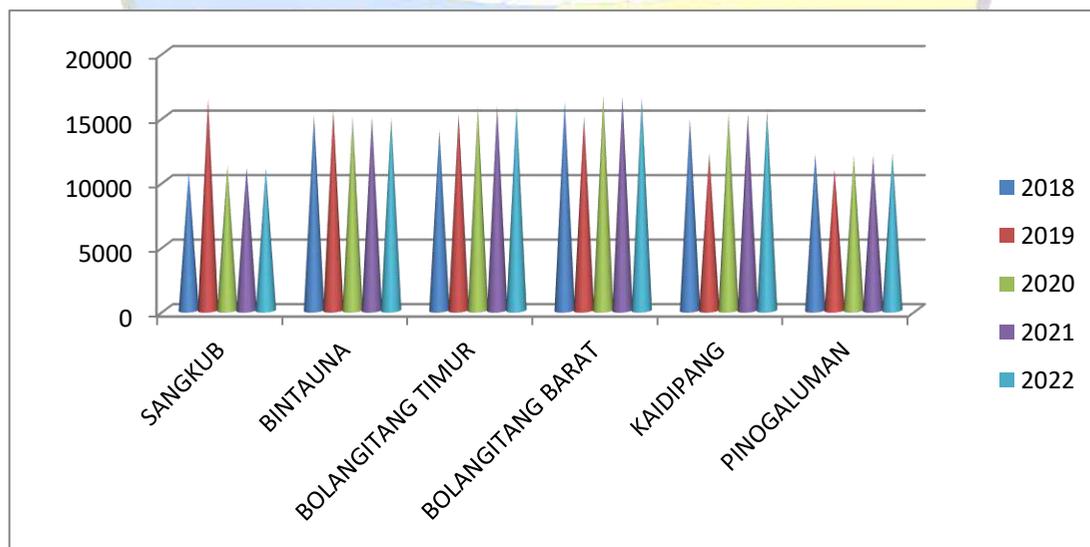
Tabel 1.1
Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Per Kecamatan Tahun 2018-2022

NO	KECAMATAN	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kecamatan Sangkub	10.716	16.390	11.220	11.094	11.046
2.	Kecamatan Bintauna	15.097	15.527	15.059	14.969	14.981
3.	Kecamatan Bolangitang Timur	14.918	15.215	15.798	15.843	15.884
4.	Kecamatan Bolangitang Barat	16.214	15.041	16.642	16.546	16.564
5.	Kecamatan Kaidipang	14.858	12.220	15.341	15.207	15.494
6.	Kecamatan Pinogaluman	12.099	10.954	12.280	12.013	12.182
	JUMLAH	83.902	85.347	86.340	85.762	86.151

Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Bolmut

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018 terhadap jumlah penduduk sebesar 1,10 %, berdasarkan data agregat kependudukan tahun 2022 pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan sebesar 1,04% hal ini dikarenakan penyesuaian data dengan satu data Kementerian Dalam Negeri, pada grafik dibawah ini dapat dilihat pertumbuhan penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Kecamatan.

Grafik 1.2
Pertumbuhan Jumlah Penduduk Per Kecamatan Tahun 2022



Sumber : Dinas Kependudukan dan Capil Kab. Bolmut



1.4. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

A. Kedudukan

Bupati yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah diwilayah Kabupaten dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Melalui Gubernur. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati.

B. Kewajiban

Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- f. Menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- g. Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; dan
- k. Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD.

C. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan



- kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
 4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas Bersama.
 5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
 7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

1.5. Organisasi Perangkat Daerah

A. Sekretariat Daerah Kabupaten

- *Kedudukan*

Sekretariat Daerah Kabupaten adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- *Tugas Pokok*

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- *Fungsi*

1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;;



4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati kota terkait dengan tugas dan fungsinya..

B. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

- *Kedudukan*

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

- *Tugas Pokok*

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- *Fungsi*

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten;
3. Fasilitas Penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten.

C. Inspektorat Daerah

- *Kedudukan*

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

- *Tugas Pokok*

Dinas mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan



mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- *Fungsi*

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Dinas Daerah

- *Kedudukan*

Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten.

- *Tugas Pokok*

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- *Fungsi*

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait



dengan tugas dan fungsinya.

E. Badan Daerah

- *Kedudukan*

Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten dan dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

- *Tugas Pokok*

Badan Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

- *Fungsi*

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kecamatan

- *Kedudukan*

Kecamatan Dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten.

- *Tugas Pokok*

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.



- *Fungsi*

1. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
2. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
5. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
7. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
8. melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

G. Struktur Organisasi

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari :



Tabel 1.2
Susunan Organisasi

No.	Susunan Organisasi	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	1
2.	Sekretariat DPRD	1
3.	Inspektorat Daerah	1
4.	Dinas Daerah	21
5.	Badan	4
6.	Kantor	1
7.	Kecamatan	6
	Jumlah Total	35

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Bolmut

1.6. Isu Strategis (*Strategis Issued*)

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan. Perumusan isu strategis didapatkan berdasarkan rumusan permasalahan pembangunan yang disinkronkan dengan visi-misi dan program unggulan Kepala Daerah terpilih. Hasil perumusan isu strategis akan menghasilkan alternatif isu strategis dalam pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun deskripsi dan justifikasi terkait isu strategis Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai berikut :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perwujudan kesejahteraan masyarakat salah satunya ditandai dengan kemampuan masyarakat mengakses kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sendiri sampai pada tahun terakhir teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan



kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal. Pada bidang pendidikan misalnya, mengingat capaian pada area pendidikan wajib 12 tahun telah menunjukkan progress yang relative signifikan, maka orientasi perbaikan pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kini diarahkan pada level lebih lanjut yaitu peningkatan mutu pendidikan melalui peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik. Akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dan pendidikan inklusif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga masih rendah. Tidak hanya pada urusan pendidikan, pada urusan kesehatan beberapa permasalahan juga masih perlu untuk diperhatikan. Seperti halnya pelayanan kesehatan dasar misalnya yang masih belum mampu terjangkau oleh keseluruhan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara khususnya daerah perdesaan. Sebagai tambahan, fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi juga tidak sedikit. Selain kualitas layanan dan standarisasi infrastruktur kesehatan seperti rumah sakit masih belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara optimal, akses masyarakat terhadap lingkungan sehat juga masih terbatas. Kondisi-kondisi tersebut tentu memberikan pressure tersendiri terhadap pengembangan sumberdaya manusia di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Perlu digaris bawahi bahwa, pencapaian progresif IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang positif dapat saja melesat secara signifikan kedepannya jika catatan permasalahan yang telah disebutkan dapat diakomodir secara maksimal. Dengan demikian maka, perwujudan aksesibilitas serta kualitas pelayanan baik itu di bidang kesehatan, pendidikan maupun kebutuhan dasar lainnya perlu untuk dikedepankan dan dianggap strategis.

2. Pembangunan Ekonomi

Sampai dengan tahun 2022, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sangat fluktuatif. Bahkan, jika diamati dari tahun dasar kecenderungan pergerakan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbelang melamban. Kecenderungan melambat juga bukan saja dikarenakan murni dari



kondisi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, tetapi karena faktor ekonomi global dan nasional. Seiring dengan deselerasi pertumbuhan ekonomi nasional maupun provinsi. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai angka 6,17 persen yang artinya belum mencapai target. BPS menyebutkan terjadi perlambatan pertumbuhan PDRB lapangan usaha sektor pertanian, sebaliknya jasa lainnya (rekreasi, hiburan) mengalami pertumbuhan dari segi distribusinya. Sektor pertanian mengalami perlambatan dimungkinkan karena faktor kondisi cuaca yang tidak menentu dan lahan aktif pertanian mulai menyusut, serta tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan. Dengan memperhatikan kekuatan dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka tidak berlebihan jika menyatakan optimism terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hal ini kemudian perlu ditelaah letak leverage isu sehingga dapat mengintervensi isu dengan bijak dan optimal. Merujuk pada data hasil evaluasi bab sebelumnya, tercatat tren kontribusi sektor pertanian cenderung melemah, namun disisi lain sektor perikanan dan jasa lainnya (rekreasi, hiburan) cenderung menggeliat. Nampaknya, kondisi ini yang mempengaruhi melambatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Kondisi ini pula memberikan gambaran bahwa ekonomi telah mulai mengalami pergeseran dengan memanfaatkan kekuatan SDM serta potensi SDA yang ada. Sehingga sangat mungkin Bolaang Mongondow Utara dapat meningkatkan kinerja ekonominya. Fasilitas di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Selain itu, kondisi infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan masih perlu terus ditingkatkan, hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tercatat hingga tahun 2022, panjang jalan dengan kondisi baik masih relative minim, atau tidak memenuhi target secara maksimal. Selain mempengaruhi tingkat



keselamatan berkendara, kondisi ini tentu juga memiliki efek terhadap arus distribusi barang dan jasa dari dan untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Selain itu, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan salah satu daerah rawan bencana banjir berdasarkan pada RTRW. Namun pada faktanya, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga merupakan wilayah rawan bencana tanah longsor, puting beliung maupun bencana kebakaran. Meskipun demikian, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih belum memiliki sistem manajemen pelayanan korban bencana alam dan bencana sosial serta kesiagaan bahaya kebakaran. Sistem ini dapat didukung salah satunya dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.

3. Kesejahteraan Masyarakat

Pengentasan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan tren kinerja positif. Namun, jika melihat dilapangan, sebenarnya jangkauan pelayanan masih belum luas. Hal ini terbukti melalui masih dapat teridentifikasi PMKS di beberapa wilayah meskipun tidak sebanyak sebelumnya. Hal ini sangat dapat diterima mengingat wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang terbilang luas, maka tentu saja memungkinkan untuk miss dalam mendata dan intervensi PMKS. Selain itu, indeks gini di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih cenderung tinggi. Gap antara pendapatan kelas atas dan bawah terlalu jauh. Hal ini mengindikasikan bahwa sebaran SDM pada tiap kelas masih belum merata pula. Kondisi tersebut pada gilirannya meningkatkan angka pengangguran dan kemiskinan secara umum. Sehingga, indeks gini perlu diantisipasi melalui kebijakan yang efektif, efisien dan tepat sasaran.

4. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang



mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Reformasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Delapan area perubahan reformasi birokrasi, meliputi mental aparatur (terciptanya budaya kerja yang positif bagi birokrasi yang melayani, bersih, dan akuntabel); Organisasi (organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran); Tata laksana (sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance); Peraturan perundang-undangan (regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih, dan kondusif); Sumber daya manusia aparatur (SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera); Pengawasan (meningkatnya penyelenggaraan pemerintah yang bebas KKN); Akuntabilitas (meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi); Pelayanan publik (pelayanan yang prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat). Saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam delapan area perubahan sudah berjalan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan berbagai penghargaan yang telah dicapai atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Yang menjadi pekerjaan rumah adalah mempertahankan kondisi ini atau bahkan semakin meningkat.



1.7. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 1 (satu) tahun anggaran. Mengukur keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja organisasi diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya capaian pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada tahun berkenaan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana sistematika penyusunan LKIP dibawah ini:

Surat Keputusan Penyusunan LKIP

Surat Pernyataan Reviu

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I - Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II - Perencanaan Kinerja,

Menjelaskan secara ringkas perencanaan strategis dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2021;

Bab III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2022,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja



sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV - Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran:





BAB II

PERENCANAAN KINERJA



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2022

Rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin di capai selama kurun waktu tertentu yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan melalui kebijakan dan program kepala daerah. Hal ini diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 260 menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Sasaran pembangunan merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah. Sasaran pembangunan daerah tahun 2022 merupakan suatu kesatuan dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Secara garis besar perencanaan kinerja jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut :

2.1.1. VISI

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah:

***"Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelanjutan,
Mandiri, Berbudaya dan Berdaya Saing."***

Pernyataan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut mempunyai pemahaman sebagai berikut :

1. *Berkelanjutan* memiliki makna bahwa, apa yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2013-2018) sebagaimana telah



tertuang dalam dokumen RPJMD akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai sebuah karya nyata untuk masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

2. *Mandiri*, menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan serta menjadikan Bolaang Mongondow Utara unggul dalam keanekaragaman pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah disekitarnya. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Kawasan agri bisnis menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) Pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. *Berbudaya* memiliki makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter atau kepribadian dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang dinamis dan inovatif, serta mampu mewarnai proses modernisasi;
4. *Berdaya Saing* memiliki makna bahwa, hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan memiliki keunggulan yang kompetitif serta memiliki akses pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. MISI

Dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang akan dilaksanakan sebagai kata kunci keberhasilan, yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya;
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government);
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata;



4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

2.1.3. TUJUAN

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia : Tujuan pembangunan pertama Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan penjabaran dari Misi I yakni Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya. Secara umum beberapa catatan terhadap Misi I Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang menjadi pertimbangan dalam penentuan rekonstruksi perubahan adalah Pembangunan Manusia yang direpresentasikan melalui IKU Indeks Pembangunan Manusia mencapai kinerja yang sangat baik dengan capaian diatas 100 persen. Capaian tersebut tidak mengindikasikan capaian yang sangat baik kinerja Pemkab Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara penuh, hal yang perlu menjadi perhatian adalah lemahnya penetapan target IPM sehingga capaian kinerja pada tahun 2023 telah terlampaui pada tahun 2020. Tujuan 1 Meningkatkan kualitas sumber daya manusia masih menempatkan Indeks Pembangunan Manusia sebagai Indikator Kinerja Utama dari tujuan pertama.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani : Tujuan pembangunan selanjutnya berorientasi terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan yang merupakan mandatori dari Misi 2 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Misi 2 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 fokus terhadap peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pelayanan publik. Beberapa catatan penting tujuan 2 terhadap evaluasi pembangunan RPJMD sebelum perubahan adalah kinerja



Indeks Reformasi Birokrasi yang berada pada angka 58,00 poin pada tahun 2020 dengan kategori Sedang.

3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan : Tujuan 3 Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 berorientasi terhadap pertumbuhan ekonomi, yang merupakan mandatori dari Misi 3. Beberapa catatan penting dari kinerja sebelum Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 ialah capaian kinerja Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang hanya mampu tumbuh 0,71 persen pada tahun 2020, sedikit lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara yang mengalami kontraksi yang diakibatkan oleh Pandemi Covid-19. Tujuan 3 Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan menjadikan Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK) sebagai Indikator Kinerja Utama atau representasi kinerja Tujuan 3.
4. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan : Tujuan pembangunan selanjutnya berorientasi terhadap peningkatan cakupan infrastruktur dan penataan ruang yang merupakan mandatori dari Misi 4 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Misi 4 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 fokus terhadap peningkatan infrastruktur dasar, sosial-ekonomi dan pelayanan publik. Beberapa catatan penting tujuan 4 terhadap evaluasi pembangunan RPJMD sebelum perubahan adalah kinerja Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang berada pada angka 3,35 poin pada tahun 2020 dengan kategori Sedang. Kualitas lingkungan menjadi syarat mutlak yang terus dipertahankan dan ditingkatkan sejalan pembangunan infrastruktur. Sedangkan dari aspek kuantitas sampai dengan tahun 2023 tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur terhadap rencana tata ruang ditargetkan sesuai dengan arahan indikasi program Utama.



2.1.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ditetapkan untuk dapat mengukur pencapaian tujuan, dimana sasaran strategis dapat menunjukkan ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan.

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat;
4.	Menurunnya beban pengeluaran keluarga;
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
6.	Meningkatnya pelayanan public;
7.	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local; dan
8.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan.

Adapun keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan strategi pembangunan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 dirincikan dalam tabel 2.2 sebagai berikut:



Tabel 2. 2 Matriks Hubungan Visi, Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2018	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2023
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,88	11,90	11,91	11,92	11,93	11,94	11,94
			2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,11	8,12	8,40	8,46	8,50	8,55	8,55
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3. Angka Harapan Hidup	Tahun	67,21	67,54	67,66	67,99	68,22	68,34	68,34
		Meningkatnya daya beli masyarakat	4. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta/rupiah	8,99	9,06	9,36	9,66	9,85	9,92	9,92
			5. Gini Ratio	Poin	0,39	0,38	0,36	0,34	0,33	0,33	0,33
		Menurunnya beban pengeluaran keluarga	6. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,08	4,62	4,50	4,04	3,75	3,63	3,63
			7. Persentase Keluarga Sejahtera	Persen	37,01	39,74	41,94	50,74	50,94	50,98	50,98
Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government)	Mengahdirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	8. Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			9. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
		Meningkatnya Pelayanan Publik	10. Tingkat Kepuasan Masyarakat (rata-rata IKM)	Persen	70,42	72,08	73,20	76,39	77,40	78,50	78,50



Meningkatkan Daya Saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	11. Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	29,14	30,97	32,80	34,63	36,46	38,29	38,29
			12. Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	Persen	8,60	9,14	9,68	10,22	10,76	11,30	11,30
			13. Kontribusi sub sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (sektor jasa lainnya)	Persen	0,68	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00	1,00
			14. Realisasi Investasi	Milyar	10,43	14,61	7,88	12,00	15,00	17,50	17,50
Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	15. <i>Cakupan Universal</i>	Persen	67,85	74,28	80,71	87,14	93,57	100,00	100,00
			16. Persentase kepatuhan terhadap RTRW	Persen	79,38	83,00	86,00	89,00	90,00	90,00	90,00
			17. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	N/A	76,31	79,97	73,01	75,04	76,90	76,90



2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan saran/arahan serta coaching clinic dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dan Tim) bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diringkas, dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan indikator kinerja utamanya. Sesuai arahan tersebut sehingga indikator kinerja sasaran semula berjumlah 23 indikator kinerja utama menjadi 17 indikator kinerja utama (ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023. Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN, TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Dikbud
	1.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Dikbud
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1 Angka Harapan Hidup (AHH)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bias menulis : Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x 100 ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Dinkes



3. Meningkatnya daya beli masyarakat	3.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Dayabeli)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : Rata-rata pengeluaran perkapita per tahun pada tahun t : $IHK \text{ tahun } t \times 100$ ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Bapelitbang
	3.2 Gini Ratio	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: $G < 0,3$ = ketimpangan rendah $0,3 < G < 0,5$ = ketimpangan sedang $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Bapelitbang
4. Menurunnya beban pengeluaran keluarga	4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulas pengukuran Jumlah Pengangguran : $\text{Angkatan Kerja} \times 100\%$ ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Disnaker
	4.2 Persentase Keluarga Sejahtera	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulas pengukuran : $\frac{\text{(KS III + KS III Plus)}}{\text{(Total KS I s.d. KS III Plus)}} \times 100\%$ ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	BPKD
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	5.1 Opini BPK	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	BPKD
	5.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : 1.00 - 1.80 = Sangat Rendah 1.81 - 2.60 = Rendah 2.61 - 3.40 = Sedang 3.41 - 4.20 = Tinggi 4.21 - 5.00 = Sangat Tinggi ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Setda
6. Meningkatnya pelayanan publik	6.1 Tingkat Kepuasan Masyarakat (rata-rata IKM)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : Rata-rata IKM $(\text{Jumlah SKPD yang dinilai}) \times 100\%$ ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Setda



7. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	7.1 Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : PDRB sector pertanian : Total PDRB x 100% ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Distan
	7.2 Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : PDRB sub sector perikanan : Total PDRB x 100% ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	DKP
	7.3 Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : PDRB sub sector kesenian, hiburan dan rekreasi : Total PDRB sector jasa lainnya x 100% ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	Dispar
	7.4 Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : Jumlah Nilai Investasi ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	DPMPSTP
8. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	8.1 Cakupan <i>Universal Acces</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : ((%Cakupan akses terhadap air bersih + (100-% kawasan kumuh) + %Cakupan akses terhadap sanitasi)) : 3 x 100% ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	PUPR
	8.2 Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi Pengukuran : Jumlah pemanfaatan ruang yang dilaksanakan sesuai rekomendasi : Jumlah rekomendasi yang diterbitkan x 100% ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	PUPR
	8.3 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Formulasi pengukuran : $IKLH = (IPA + IPU + ITH) / 3$ IPA= Indeks Pencemaran Air Sungai IPU= Indeks Pencemaran Udara ITH= Indeks Tutupan Hutan ➤ Tipe Perhitungan : Absolut 	DLHK



2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Upaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya, maka sistem akuntabilitas disusun dengan cara dikembangkannya Sistem AKIP (SAKIP). Salah satu unsur yang ada dalam SAKIP adalah perencanaan kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun dan akan dievaluasi pada akhir tahun untuk mengukur keberhasilan / kegagalan atas pertanggung jawaban yang telah ditetapkan oleh suatu instansi. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun berdasarkan RPJMD, dapat kami sajikan dibawah ini :

Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
1	2	3	4	5	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Thn	11,93
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Thn	8,50
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Thn	68,22
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Jt/Rp.	9,85
		5	Gini Ratio	Poin	0.33
4	Menurunnya beban pengeluaran keluarga	6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75
		7	Persentase Keluarga Sejahtera	%	50,94
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	8	Opini BPK	Predikat	WTP
		9	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Sedang
6	Meningkatnya pelayanan public	10	Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	77,40



7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	11	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	36,46
		12	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	10,76
		13	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	1,00
		14	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Milyar	15,00
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	15	Cakupan <i>Universal Acces</i>	%	93,57
		16	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	90,00
		17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	75,04

2.4. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja pada hakekatnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan komitmen dan janji untuk melaksanakan dan mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun, kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Selengkapnya dapat kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Target
1	2	3		4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Thn	11,93
		2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Thn	8,50
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Thn	68,22
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Jt/Rp.	9,85
		5	Gini Ratio	Poin	0.33
4	Menurunnya beban pengeluaran keluarga	6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,75
		7	Persentase Keluarga Sejahtera	%	50,94



5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	8	Opini BPK	Predikat	WTP
		9	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Sedang
6	Meningkatnya pelayanan public	10	Tingkat Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	77,40
7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	11	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	36,46
		12	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	10,76
		13	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	1,00
		14	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Milyar	15,00
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	15	Cakupan <i>Universal Acces</i>	%	93,57
		16	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	90,00
		17	Indeks KualitasLingkungan Hidup (IKLH)	%	75,04

- Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 sebesar **Rp. 701.293.523.898**
- Rencana belanja langsung sebesar **Rp. 354.981.942.005**
- Rencana belanja tidak langsung sebesar **Rp. 346.311.581.893**
- Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk:
 - 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah;
 - 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
 - 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah;
 dan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah membuat penetapan kinerja dan perjanjian kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun, sebagaimana sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2022.



Tabel 2.6
Rencana Program dan Anggaran Tahun 2022

NO	URAIAN	ANGGARAN
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	396.090.367.407,00
1.1	PENDIDIKAN	119.523.842.727,00
1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	87.601.842.067,00
1.1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	303.247.300,00
1.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	31.520.193.360,00
1.1.4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	98.560.000,00
1.2	KESEHATAN	183.157.609.435,00
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	45.605.003.949,00
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	130.633.213.190,00
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.363.283.666,00
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	436.871.280,00
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	119.237.350,00
1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	77.187.972.106,00
1.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.509.337.060,00
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.281.232.800,00
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.991.948.080,00
1.3.4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.881.800.000,00
1.3.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.046.292.442,00
1.3.6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	282.042.822,00
1.3.7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.482.480.000,00
1.3.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	129.099.900,00
1.3.9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	48.446.360.992,00
1.3.10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	491.882.410,00
1.3.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	645.495.600,00
1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.129.455.723,00
1.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.310.418.705,00
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	365.881.000,00
1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	988.125.968,00
1.4.4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	86.369.450,00
1.4.5	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	378.660.600,00
1.5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.926.552.310,00
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.053.483.510,00
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.511.260.000,00
1.5.3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	361.808.800,00
1.6	SOSIAL	7.164.935.106,00
1.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.491.634.356,00
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	112.115.000,00
1.6.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	276.110.200,00
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	325.941.100,00
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	867.552.250,00
1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	91.582.200,00
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	46.237.807.102,00
2.1	TENAGA KERJA	2.430.421.638,00



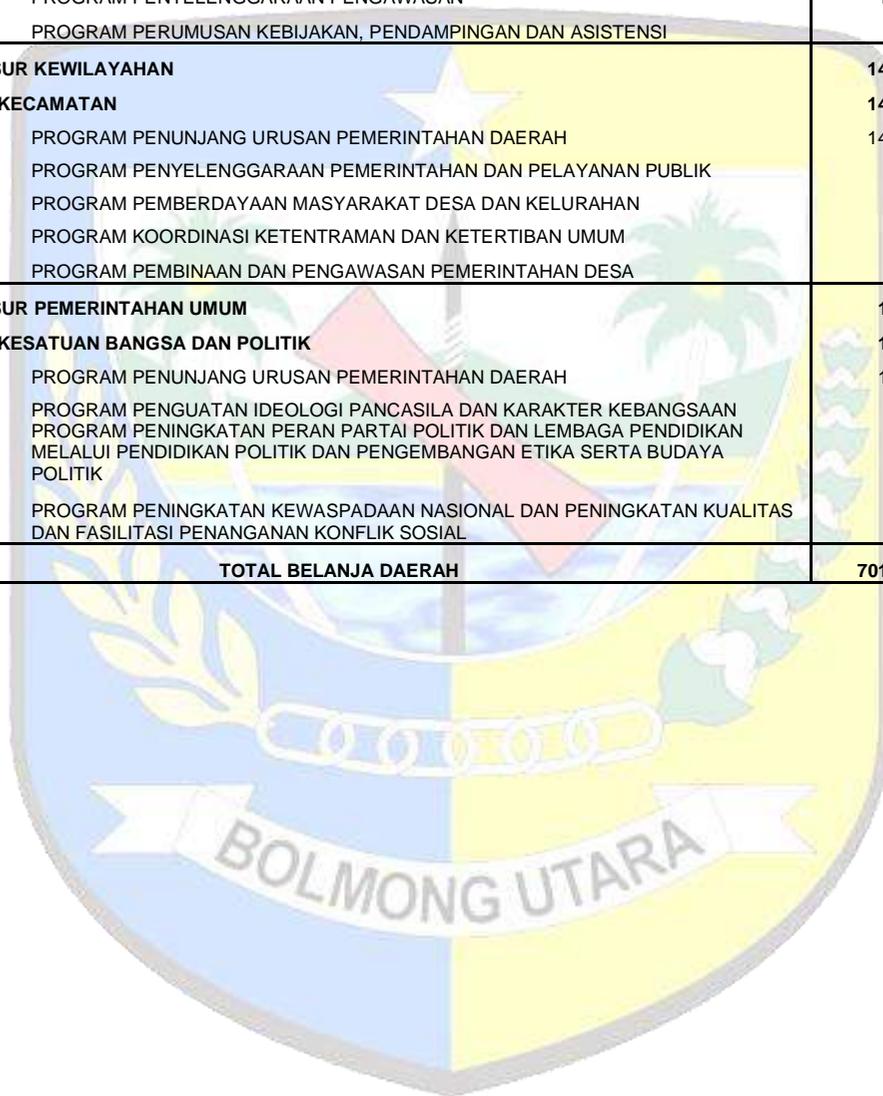
2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.949.415.388,00
2.1.2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	409.412.450,00
2.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	71.593.800,00
2.2	PANGAN	2.837.431.550,00
2.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.066.630.650,00
2.2.2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	596.747.800,00
2.2.3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	73.859.450,00
2.2.4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.193.650,00
2.3	LINGKUNGAN HIDUP	5.565.885.692,00
2.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.556.848.012,00
2.3.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	402.841.500,00
2.3.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	103.589.700,00
2.3.4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	9.948.100,00
2.3.5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	65.311.500,00
2.3.6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.427.346.880,00
2.4	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.196.231.935,00
2.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.747.504.785,00
2.4.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	448.727.150,00
2.5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.979.655.452,00
2.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.363.110.952,00
2.5.2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	154.425.700,00
2.5.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	462.118.800,00
2.6	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.002.240.873,00
2.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.356.978.811,00
2.6.2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	641.168.800,00
2.6.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	151.546.000,00
2.6.4	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	60.351.800,00
2.6.5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.125.204.662,00
2.6.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.973.822.200,00
2.6.7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	47.505.600,00
2.6.8	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	645.663.000,00
2.7	PERHUBUNGAN	3.813.044.292,00
2.7.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.155.697.692,00
2.7.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.657.346.600,00
2.8	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	5.021.407.400,00
2.8.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.545.495.360,00
2.8.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.123.326.700,00
2.8.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	69.646.500,00
2.8.4	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.282.938.840,00
2.9	PENANAMAN MODAL	3.353.338.919,00
2.9.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.818.368.369,00
2.9.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	20.127.200,00
2.9.3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	126.189.350,00
2.9.4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	388.654.000,00
2.10	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.810.159.097,00
2.10.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.499.850.597,00
2.10.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.072.636.400,00
2.10.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.237.672.100,00



2.11	KEARSIPAN	2.227.990.254,00
2.11.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.184.550.254,00
2.11.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	16.945.000,00
2.11.3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	17.995.000,00
2.11.4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	8.500.000,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27.522.761.828,00
3.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.559.131.912,00
3.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.448.422.412,00
3.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.564.720.500,00
3.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	533.688.500,00
3.1.4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12.300.500,00
3.2	PARIWISATA	3.481.461.822,00
3.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.496.392.482,00
3.2.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	465.300.440,00
3.2.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	519.768.900,00
3.3	PERTANIAN	14.402.316.273,00
3.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.627.099.763,00
3.3.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.440.985.760,00
3.3.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	101.522.200,00
3.3.4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	481.025.150,00
3.3.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	166.938.000,00
3.3.6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	584.745.400,00
3.4	PERDAGANGAN	5.079.851.821,00
3.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.098.111.786,00
3.4.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	288.940.200,00
3.4.3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	322.756.585,00
3.4.4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	43.492.000,00
3.4.5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	50.206.200,00
3.4.6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.276.345.050,00
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	67.367.708.619,00
4.1	SEKRETARIAT DAERAH	41.701.254.777,00
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.123.234.057,00
4.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.490.925.520,00
4.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.087.095.200,00
4.2	SEKRETARIAT DPRD	25.666.453.842,00
4.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.877.357.351,00
4.2.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.789.096.491,00
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	142.180.990.071,00
5.1	PERENCANAAN	6.924.780.874,00
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.014.374.524,00
5.1.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	867.552.000,00
5.1.3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.296.170.100,00
5.1.4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	746.684.250,00
5.2	KEUANGAN	128.717.876.290,00
5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.485.600.001,00
5.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	115.618.689.209,00
5.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	783.480.980,00



5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	830.106.100,00
5.3	KEPEGAWAIAN	6.538.332.907,00
5.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.361.442.107,00
5.3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	796.958.200,00
5.3.3	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.379.932.600,00
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.850.197.210,00
6.1	INSPEKTORAT	5.850.197.210,00
6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.140.500.110,00
6.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.261.171.900,00
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	448.525.200,00
7	UNSUR KEWILAYAHAN	14.246.167.731,00
7.1	KECAMATAN	14.246.167.731,00
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.145.970.231,00
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.987.500,00
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62.210.000,00
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.000.000,00
7.1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.000.000,00
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1.797.523.930,00
8.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.797.523.930,00
8.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.057.208.002,00
8.1.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	35.000.000,00 627.222.528,00
8.1.3		
8.1.4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	78.093.400,00
TOTAL BELANJA DAERAH		701.293.523.898,00





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Azas penyelenggaraan negara telah banyak berubah, terutama sistem manajemen pemerintahan di Indonesia saat ini, dimana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengarahkan setiap pemerintah daerah menganut azas akuntabilitas kinerja.

Makna azas akuntabilitas inilah yang telah merubah paradigma manajemen pemerintahan selama ini yang hanya berfokus kepada akuntabilitas keuangan saja, yaitu pertanggungjawaban instansi pemerintah cukup dengan menyajikan informasi realisasi anggaran yang telah dilakukan koreksi terhadap laporan keuangan melalui audit pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Oleh sebab itu evaluasi kinerja dan evaluasi efisiensi keuangan sudah pada tingkatan penilaian laporan kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB.RI)

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian terhadap target memperhatikan karakteristik komponen realisasi :

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Bab ini akan disajikan uraian analisis pencapaian kinerja setiap Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2021. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program-program yang mendukung persasaran, realisasi anggaran persasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja. Adapun skala interval dan predikat capaian kinerja ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3. 1
Skala interval dan Predikat Capaian Kinerja

Nomor	Bobot Capaian	Predikat
1	2	3
1.	> 95 %	Sangat Berhasil
2.	80 - 95 %	Berhasil
3.	50 - < 80 %	Cukup Berhasil
4.	< 50 %	Kurang Berhasil

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2022 dapat melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD tahun 2018-2023 melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 atas pelaksanaan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah melalui empat Misi, empat Tujuan dan enam Indikator Kinerja Tujuan. Capaian Kinerja Pemerintah



Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari pengukuran 4 (empat) tujuan, diperoleh rata-rata capaian tujuan **92,32%** atau kategori capaian kinerja “Berhasil” seperti tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Tujuan

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia								
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67.39	67.52	67.39	99.81	67.83	99.35
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	8.03	8.21	8.03	102.19	8.10	99.14
3	Rasio Ketergantungan (Defendency Ratio)	Persen	48.84	51.62	48.84	105.38	51.51	94.82
Rata-rata capaian Tujuan 1						102.46		
Tujuan 2 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani								
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	40.03	60.00	48.70	81.17	61.00	65.62
Rata-rata capaian Tujuan 2						81.17		
Tujuan 3 : Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan								
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	Persen	3.46	5.77	5.22	90.47	5.92	88.18
Rata-rata capaian Tujuan 3						90.47		
Tujuan 4 : Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan								
6	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	3.55	3.73	3.55	95.17	3.88	91.49
Rata-rata capaian Tujuan 4						95.17		
Rata - Rata Capaian						92.32		

Rangkuman Hasil analisis capaian kinerja Tujuan tahun 2022 dapat kami uraikan dalam table di bawah ini:



Tabel 3. 3
Rangkuman Hasil Capaian Tujuan

No	Kategori Capaian	Jumlah Tujuan	Jumlah Indikator	Hasil Analisis capaian kinerja indikator
1	2	3	4	5
1	Sangat Berhasil	1	4	Kinerja sangat berhasil, efektif, efisien, inovatif dan bermanfaat.
2	Berhasil	3	2	Kinerja berhasil, sesuai harapan, sedikit perbaikan, berorientasi kinerja.
3	Cukup Berhasil	0	0	Kinerja cukup berhasil, perlu banyak perbaikan dan peningkatan kinerja, perlu konsistensi target dan integritas data, perlu diperjelas hasil yang akan dicapai SKPD.
4	Kurang Berhasil	0	0	Kinerja kurang berhasil, perlu banyak perbaikan yang mendasar, kurangnya keterkaitan antara program/kegiatan dgn sasaran, perlu penajaman indikator outcome/output kegiatan dan perlu penyesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD.
5	Tidak Ada Informasi (n.a)	0	0	Kinerja Belum dilakukan pengukuran
Jumlah		4	6	

Berdasarkan table analisis di atas, terdapat 1 tujuan dan 4 indikator dalam kategori sangat berhasil, 3 tujuan dan 2 indikator berada pada kategori berhasil.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target kinerja yang telah ditetapkan. Secara keseluruhan tingkat capaian sasaran Pemerintah Kabupten Bolaang Mongondow Utara melalui 8 sasaran sasaran sebesar **97,13%** atau kategori capaian kinerja **“Sangat Berhasil”** yang dihitung berdasarkan persentase rata-rata capaian sasaran. Berikut ini diuraikan hasil pengukuran dan capaian kinerja sasaran strategis tahun 2022, sebagai berikut:



Tabel 3. 4
Capaian Kinerja Sasaran

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat								
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Thn	12,17	11,93	12,34	103,44	11,94	103,35
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Thn	8,47	8,50	8,57	100,82	8,55	100,23
Rata-Rata Capaian Sasaran 1						102,13		
Sasaran 2 : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Thn	67.73	68.22	68.05	99.51	99.75	99.57
Rata-Rata Capaian Sasaran 2						99.51		
Sasaran 3 : Meningkatnya daya beli masyarakat								
4	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan	Jt/Rp.	9,143	9,850	9,285	94,26	9,92	93,54
5	Gini Ratio	Point	0,39	0,33	0,35	94,29	0,33	93,93
Rata-Rata Capaian Sasaran 3						94,27		
Sasaran 4 : Menurunnya beban pengeluaran keluarga								
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.48	3.75	5.41	55.73	3.63	50.96
7	Persentase Keluarga Sejahtera	%	74.9	50.94	74.9	147.04	50.98	146.92
Rata-Rata Capaian Sasaran 4						101.38		
Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan								
8	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP*	100	WTP	100
9	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Predikat	Tinggi	Sedang	Tinggi*	100	Tinggi	100
Rata-Rata Capaian Sasaran 5						100		
Sasaran 6 : Meningkatnya pelayanan public								
10	Tingkat Kepuasan Masyarakat (rata-rata IKM)	Persen	85.38	77.4	82.24	106.25	78.5	104.76
Rata-Rata Capaian Sasaran 6						106.25		
Sasaran 7 : Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local								



11	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	34.03	36.46	34.03	93.34	38.29	88.87438
12	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	10.6	10.76	10.6	98.51	11.3	93.81
13	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	0.79	1	0.78	78	1	78
14	Realisasi Investasi	Milyar	5.985	15	7.2	48	17.5	41.14
Rata-Rata Capaian Sasaran 7						79.46		
Sasaran 8 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan								
15	Cakupan <i>Universal Acces</i>	%	87.14	93.57	85.61	91.49	100.00	85.61
16	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	90.00	90.00	88.76	98.62	90.00	98.62
17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	76.90	75.04	79.21	105.56	76.90	103.00
Rata-Rata Capaian Sasaran 8						98.56		
Rata-Rata Capaian						97.13		

Rangkuman Hasil analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2022 dapat kami uraikan dalam table di bawah ini:

Tabel 3. 5
Rangkuman Hasil Capaian Sasaran

No	Kategori Capaian	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator	Hasil Analisis capaian kinerja indikator
1	2	3	4	5
1	Sangat Berhasil	6	10	Kinerja sangat berhasil, efektif, efisien, inovatif dan bermanfaat.
2	Berhasil	1	4	Kinerja berhasil, sesuai harapan, sedikit perbaikan, berorientasi kinerja.
3	Cukup Berhasil	1	2	Kinerja cukup berhasil, perlu banyak perbaikan dan peningkatan kinerja, perlu konsistensi target dan integritas data, perlu diperjelas hasil yang akan dicapai SKPD.
4	Kurang Berhasil	0	1	Kinerja kurang berhasil, perlu banyak perbaikan yang mendasar, kurangnya keterkaitan antara program/kegiatan dgn sasaran, perlu penajaman indikator outcome/output kegiatan dan perlu penyesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD.



5	Tidak Ada Informasi (n.a)	0	0	Kinerja Belum dilakukan pengukuran
Jumlah		8	17	

Berdasarkan table analisis di atas, terdapat 6 sasaran dan 10 indikator dalam kategori sangat berhasil, 1 sasaran dan 4 indikator berada pada kategori berhasil, 1 sasaran dan 2 indikator masuk kategori cukup berhasil, dan 1 indikator kurang berhasil.

3.2. Analisis Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan melihat hasil pengukuran kinerja yang telah dicapai diatas, analisis dilakukan terhadap realisasi capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis. Penjelasan-penjelasan mengenai komponen operasionalisasi kinerja, mengenai keberhasilan dan kegagalan serta upaya-upaya yang dilakukan dan harapan kedepan untuk peningkatan kinerja. Dibawah ini kami uraikan hasil analisis dan evaluasi tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021 setelah dilakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dituangkan dalam skala ordinal dengan diinterpretasikan dalam pernyataan capaian, sebagai berikut:

Tujuan 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berbudaya diukur dari pencapaian tujuan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan dan Defendency Ratio. Tingkat capaian ketiga tujuan tersebut pada tahun 2022 mencapai **103,10%** dengan rincian target, realisasi dan capaian masing-masing indikator sebagai berikut:



Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Tujuan 1

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	67.39	67.52	67.39	99.81	67.83	99.35
2	Tingkat Kemiskinan	Persen	8.03	8.21	8.03	102.19	8.10	100.86
3	Rasio Ketergantungan (Defendancy Ratio)	Persen	48.84	51.62	48.84	105.38	51.51	105.18
Rata-rata capaian Tujuan 1						102.46		

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 (Diolah)

1. Indeks Pembangunan Manusia.

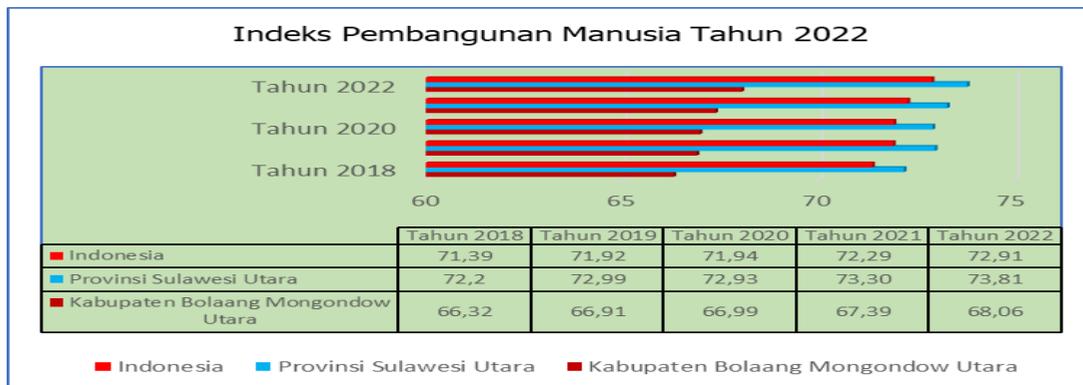
Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan kriteria UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu :

- a) Rendah (< 60)
- b) Sedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- c) Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- d) Sangat Tinggi (> 80).

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 ditargetkan 67,52 terealisasi 68,06 dengan **tingkat capaian 100,80%**. Dengan demikian kualitas hidup manusia di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tergolong kategori sedang.



Grafik 3.1
Perbandingan IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dengan Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2018 – 2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

Realisasi pencapaian IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,67 point dari tahun 2021 dan 1,74 point dari tahun 2018 (tahun pertama RPJMD). Namun demikian berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 masih dibawah IPM Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Adapun secara peringkat provinsi IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 berada pada peringkat 13 dari 15 kabupaten/kota dan secara nasional berada pada peringkat 316 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Berikut disajikan unsur pembentuk IPM yang meliputi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan.

Tabel 3.7
Indikator Pembentuk IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Indikator	Tahun			
		2019	2020	2021	2022
1	Kesehatan : Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	67,54	67,66	67,73	68,05
2	Pendidikan :				
	a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	8,12	8,40	8,41	8,57
	b. Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,90	11,91	12,17	12,34
3	Pengeluaran Perkapita Per tahun (d disesuaikan)	9,366	9,062	9,143	9,285
	Indeks Pembangunan Manusia	66,91	66,99	67,39	68,06

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022



Indikator Kesehatan yakni Umur Harapan Hidup (UHH), menunjukkan adanya tren yang meningkat dari 67,73 tahun pada tahun 2021 menjadi 68,05 pada tahun 2022 namun masih berada pada peringkat ke 14 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 8,41 tahun pada tahun 2021 menjadi 8,57 tahun pada tahun 2022, berada pada peringkat ke 9 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, mengalami kenaikan dari peringkat ke 11 pada tahun 2021.

Harapan Lama Sekolah meningkat dari 11,91 tahun pada tahun 2020 meningkat menjadi 12,17 tahun pada tahun 2021. berada pada peringkat ke 9 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara, meningkat dari peringkat 12 pada tahun 2021.

Pengeluaran perkapita riil meningkat dari Rp. 9,143 juta pada tahun 2021 meningkat menjadi Rp. 9,285 juta pada tahun 2022, berada pada peringkat ke 12 dari 15 kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Utara, mengalami penurunan dari peringkat ke 11 tahun 2021.

Dari keempat indikator pembentuk IPM, indikator Usia Harapan Hidup yang masih tergolong paling rendah dan berada di peringkat ke 14 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara. Upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan Usia Harapan Hidup selama beberapa tahun terakhir terus dilaksanakan dengan peningkatan sarana pelayanan kesehatan baik rumah sakit maupun puskesmas. Disamping itu untuk mengantisipasi kekurangan tenaga dokter, pemerintah daerah menggunakan jasa dokter spesialis dengan status kontrak kerja walaupun dengan jumlah yang masih sangat terbatas. Kebijakan terkait dengan penyiapan tenaga dokter untuk kebutuhan kedepan, pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memberikan bantuan studi kepada putra putri daerah yang melanjutkan pada fakultas kedokteran.

Indikator Pendidikan ditunjukkan dengan pencapaian angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dalam dua tahun terakhir cenderung meningkat. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah melakukan upaya untuk meningkatkan RLS dan HLS dengan menganggarkan program/kegiatan dalam APBD dengan proporsi yang memadai sesuai dengan mandatory spending urusan Pendidikan.



Indikator Pengeluaran Per Kapita per tahun yang disesuaikan dalam dua tahun terakhir cenderung meningkat walaupun masih dibawah angka yang dicapai pada tahun 2019 sebelum pandemi. Meningkatnya Kembali pengeluaran per kapita pada tahun 2022 menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kini tengah menuju kearah yang lebih baik.

2. Tingkat Kemiskinan.

Tingkat kemiskinan dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan, menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah kemiskinannya.

Tingkat kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 ditargetkan dapat ditekan pada angka 8,21%, realisasi 7,31% dengan **tingkat capaian 110,96%**.

Tabel 3.8

**Persentase Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara,
Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2018 – 2022**

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Kab. Bolaang Mongondow Utara	8,64	8,45	8,41	8,03	7,31
2	Provinsi Sulawesi Utara	7,80	7,66	7,62	7,77	7,28
3	Nasional	9,66	9,22	7,88	7,89	9,54

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023



Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2022 sebesar 7,31% mengalami penurunan dimana pada Tahun 2021 persentase penduduk miskin berhasil ditekan hingga menjadi 8,03%. Persentase penduduk miskin Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih di atas angka provinsi namun dibawah angka nasional. Persentase penduduk miskin Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2022 sebesar 7,28% sedangkan nasional sebesar 9,54%. Walaupun demikian dalam peringkat provinsi Kabupaten Bolaang Mongondow berada pada peringkat 9 dari 15 Kabupaten/Kota, sedangkan secara nasional berada di peringkat 160 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, naik 14 point dari peringkat 174 pada tahun 2021.

Pemetaan kemiskinan tidak hanya pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan juga dilakukan pengukuran. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Makin tinggi angkanya menunjukan makin parah kemiskinannya. Tabel berikut menggambarkan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan tahun 2022:

Tabel 3.9
Tingkat Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Tingkat Kedalaman Kemiskinan						
1	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1,15	1,32	0,83	1,18	0,90
2	Provinsi Sulawesi Utara	1,27	1,18	1,14	1,24	1,15
3	Nasional	1,71	1,55	1,61	1,57	1,56
Tingkat Keparahannya Kemiskinan						
1	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	0,24	0,34	0,14	0,26	0,17
2	Provinsi Sulawesi Utara	0,30	0,25	0,25	0,28	0,26
3	Nasional	0,44	0,37	0,47	0,42	0,39

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023



Seiring dengan menurunnya persentase penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022, tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan. Tingkat kedalaman kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 yakni 0,90% mengalami penurunan 0,28% dari tahun 2021. Tingkat kedalaman kemiskinan tersebut masih dibawah tingkat kedalaman kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional yang pada tahun 2022 yang masing-masing mencapai 1,15% dan 1,56%. Sedangkan tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 yakni 0,17% mengalami penurunan 0,09% dari tahun 2021. Tingkat keparahan kemiskinan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 masih dibawah tingkat keparahan kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional yang pada tahun 2022 yang masing-masing mencapai 0,26% dan 0,39%. Tingkat kedalaman kemiskinan tersebut diatas menggambarkan bahwa perbedaan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin dekat pada garis kemiskinan. Demikian juga dengan tingkat keparahan kemiskinan menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk termiskin di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara semakin dekat dengan angka rata-rata pengeluaran kelompok penduduk miskin.

3. Dependency Ratio

Dependency Ratio atau rasio ketergantungan adalah suatu ukuran yang menjelaskan mengenai beban yang harus ditanggung oleh pekerja. Rasio ini menghitung jumlah penduduk non produktif dan membaginya dengan jumlah penduduk produktif. Dari hasil perhitungan ini, didapatkan berapa jumlah penduduk non produktif yang harus ditanggung oleh penduduk produktif.

Indikator yang kerap disebut sebagai *Dependency Ratio* ini berguna untuk mengidentifikasi apakah suatu daerah memiliki ketergantungan ekonomi yang tinggi atau tidak. Jika suatu daerah memiliki angka ketergantungan yang tinggi, maka potensi pertumbuhan ekonominya tidak akan terlalu tinggi. Sedangkan, jika *dependency ratio* suatu wilayah tergolong rendah, maka potensi pertumbuhannya besar karena banyak terdapat masyarakat usia produktif. Dependency ratio atau rasio ketergantungan tahun



2022 dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditargetkan 51,80% terealisasi 48,83% atau **tingkat capaian 105,73%**.

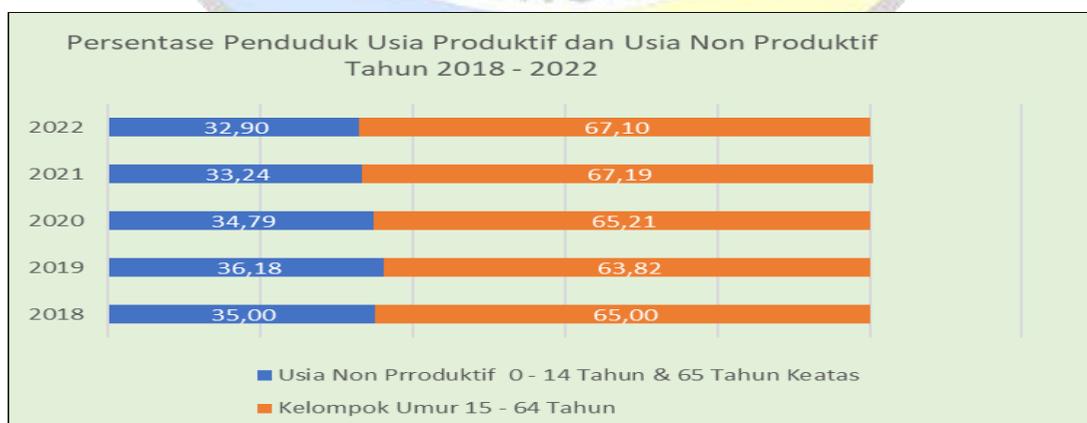
Grafik 3.2
Dependency Ratio



Rasio ketergantungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih sangat ideal dan merupakan bonus demografi yang sedang terjadi. Ini menggambarkan suksesnya kinerja bidang kesehatan dan pengendalian penduduk melalui keluarga berencana sehingga dampak

yang terjadi adalah penurunan proporsi jumlah penduduk usia <15 tahun makin kecil karena penurunan fertilitas, peningkatan jumlah anak keusia dewasa karena penurunan angka kematian bayi dan terjadi ledakan penduduk usia kerja. Kondisi ini disebut *Window of Opportunity* berupa tersedianya kondisi atau ukuran yang sangat ideal pada perbandingan antara jumlah penduduk produktif dengan yang non produktif. Dengan kata lain pada saat ini Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada kondisi ideal untuk meningkatkan produktivitas demi meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Grafik 3.3
Persentase Penduduk Usia Non Produktif dan Usia Produktif di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 (diolah)



Dari tabel diatas terlihat bahwa persentase penduduk usia non produktif yakni usia 0 – 14 tahun dan usia 65 tahun keatas cenderung mengalami penurunan dimana pada tahun 2018 sebesar 35,00%, pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 32,90%, sedangkan persentase penduduk usia produktif yakni usia 15 – 64 tahun cenderung mengalami peningkatan dimana pada tahun 2018 sebesar 65% meningkat menjadi 67,10% pada tahun 2021.

Tujuan 2. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good and Clean Government)

RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 – 2023 ditetapkan misi kedua yakni Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good and Clean Government). Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan misi tersebut adalah Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Melayani dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi adalah menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang mongondow Utara ditargetkan 60,00 point. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2022 yang disampaikan oleh Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN-RB melalui surat nomor B/1114/RB.06/2022 tanggal 06 Desember 2022, Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah **48,70 atau kategori “C”, dengan tingkat capaian dari target adalah 81,17%.**



Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Tujuan 2

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	40.03	60.00	48.70	81.17	61.00	79.84
Rata-rata capaian Tujuan 2						81.17		

Sumber Data : Kementerian PAN-RB Tahun 2022

Berdasarkan komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi yang terdiri dari Komponen Pengungkit memperoleh nilai 15,12 dan Komponen Hasil memperoleh nilai 24,91. Hasil penilaian masing-masing komponen seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Komponen Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

No.	Komponen Penilaian	Bobot	Tahun 2022
A.	Komponen Pengungkit		
I	Pemenuhan	20,00	8,38
II	Hasil Antara Area Perubahan	10,00	4,71
III	Reform	30,00	5,59
Total Komponen pengungkit		60,00	18,68
B.	Komponen Hasil		
1	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	10,00	7,34
2	Kualitas Pelayanan Publik	10,00	8,77
3	Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN	10,00	8,05
4	Kinerja Organisasi	10,00	5,86
Total Komponen Hasil		40,00	30,02
Indeks Reformasi Birokrasi (Pengungkit + Hasil)		100,00	48,70

Sumber Data : Kementerian PAN-RB Tahun 2023

Berdasarkan evaluasi yang kedua kalinya dilakukan oleh Kementerian PAN-RB, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah berupaya meningkatkan kualitas implementasi reformasi birokrasi, namun terdapat beberapa catatan untuk diperhatikan sebagai berikut:



1. Dalam Hal Peningkatan Manajemen Perubahan :
 - a. Agen perubahan belum memiliki rencana aksi perubahan yang nyata dan berkelanjutan, sehingga belum mampu menunjukkan hasil dalam menggerakkan perubahan pada lingkup organisasi;
 - b. Telah melakukan pencanangan *Core Values* ASN BerAKHLAK dan *Employer Branding* (Bangga Melayani Bangsa), namun hal ini belum diikuti dengan dilakukannya sosialisasi secara masif serta pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap budaya kerja yang disosialisasikan tersebut;
 - c. Rencana aksi reformasi birokrasi telah disusun, namun belum dilakukan monitoring dan evaluasi, sehingga pengendalian terhadap ketercapaian target perubahan belum berjalan secara optimal. Selain itu, rencana aksi Reformasi Birokrasi level Pemda yang sudah ada belum dijadikan pedoman sebagai penyusunan rencana aksi di level Perangkat Daerah.
2. Identifikasi terhadap keseluruhan peraturan perundangan yang masih berlaku belum selesai dilakukan, termasuk evaluasi atas pelaksanaan system pengendalian penyusunan peraturan perundang undangan belum dilakukan secara berkala. Selain itu, peta keterkaitan antar kebijakan di level Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah belum sepenuhnya disusun;
3. Penyederhanaan birokrasi telah dilakukan dengan penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional sesuai Keputusan Bupati Nomor 821.24/BKPP/BMU/SK/60/XII/2021. Hal ini dilanjutkan dengan disusunnya rancangan keputusan Bupati tentang uraian tugas dan fungsi unit kerja yang memuat hubungan koordinasi antara JPT dengan kelompok jabatan fungsional pada seluruh unit organisasi. Namun, belum terlihat kesesuaian antara struktur organisasi dengan kinerja yang akan diwujudkan dan belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengukur jenjang organisasi. Hal ini berpotensi menghambat pencapaian kinerja yang akan diwujudkan;
4. Peta proses bisnis yang ada belum sepenuhnya dijabarkan ke prosedur operasional standar (SOP) dan belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi. Peta



- proses bisnis yang ada sekarang ini belum sepenuhnya disusun dengan memperhatikan tugas, fungsi, dan rencana strategis Pemerintah Daerah. Selain itu penerapan *e-government* masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga belum mengungkit perbaikan dan layanan;
5. Pengelolaan manajemen SDM masih berfokus pada pengelolaan administrasi kepegawaian. Belum sepenuhnya terdapat inisiasi terhadap pengelolaan kinerja individu, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, dan pengelolaan karir. *Assessment* dan *monev* pengembangan pegawai perlu dilakukan secara menyeluruh dan berkala, sehingga penguatan system manajemen SDM belum berjalan dengan optimal;
 6. Pemanfaatan aplikasi siakip.org.bolmutkab.go.id sebagai alat dalam monitoring kinerja tidak berjalan optimal. Informasi kinerja yang dihasilkan dari mekanisme monitoring kinerja tidak efektif memicu berbagai perbaikan yang diperlukan;
 7. Upaya Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terhadap peningkatan pengawasan masih sangat minim, berikut beberapa catatan:
 - a. Telah melakukan penetapan kebijakan tentang gratifikasi dan Benturan Kepentingan, namun belum terhadap *Whistleblowing System* (WBS) dan pengaduan masyarakat;
 - b. Kebijakan yang ada belum diimplementasikan dan dievaluasi secara berkala.
 8. Dalam pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara belum menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan pada tahun lalu, sehingga tidak ada peningkatan signifikan, sebagai berikut:
 - a. Standar pelayanan telah disusun terhadap sebagian Perangkat Daerah;
 - b. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima terhadap petugas/pelaksana layanan;
 - c. Belum menyusun kebijakan terkait pemberian penghargaan dan sanksi terhadap hasil layanan oleh petugas/pelaksana pelayanan;
 - d. Belum menyusun kebijakan terkait pemberian kompensasi jika pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar;
 - e. Belum melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala.



Tujuan 3. Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif dan Berkeadilan

Misi ketiga RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 – 2023 yakni Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah Berbasis Pertanian, Perikanan dan Pariwisata. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan misi tersebut adalah Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Yang Inklusif dan Berkeadilan dengan indikator laju pertumbuhan ekonomi.

Target pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 ditetapkan sebesar 5,77% terealisasi 5,22% atau **tingkat capaian 90,47%**.

Tabel 3.12
Pengukuran Kinerja Tujuan 3

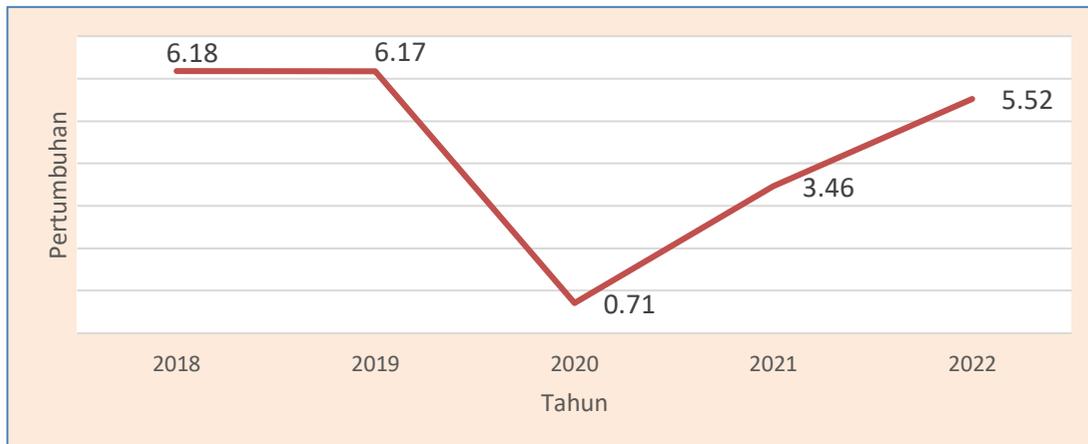
No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	Persen	3.46	5.77	5.22	90.47	5.92	88.18
Rata-rata capaian Tujuan 3						90.47		

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

Pertumbuhan ekonomi yang digambarkan pada tabel diatas dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan tahun dasar 2010. Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meningkat sebesar 5,52%, dapat tumbuh lebih cepat setelah terpuruk pada angka 0,71% ditahun 2020. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir digambarkan sebagai berikut:



Grafik 3.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2022



Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023 (diolah)

Grafik diatas menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang sempat mengalami perlambatan pertumbuhan hingga pada angka 0,17% pada awal masa pandemi Covid 19 tahun 2020 kembali mulai membaik. Kebijakan pembatasan sosial yang dilaksanakan pada masa pandemi sangat mempengaruhi aktifitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini turut juga diengaruhi oleh adanya oleh kebijakan belanja tahun 2021 yakni adanya realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak Covid 19. Sebagian belanja daerah yang dialokasikan untuk faktor-faktor produksi yang mendorong pertumbuhan ekonomi harus direalokasi untuk penanganan dampak pandemi.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 2,889 triliun. PDRB harga berlaku sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp. 1,335 triliun sedangkan sektor jasa lainnya yang didalamnya termasuk sub sektor jasa hiburan dan rekreasi sebesar Rp.23,370 milyar.



Tabel 3.13
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Dalam Jutaan Rupiah

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022**
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	1.176.262,40	1.218.340,00	1.335.040,00
2	Pertambangan dan Penggalian	299.503,80	320.690,00	346.420,00
3	Industri Pengolahan	81.798,50	89.690,00	99.020,00
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1.131,00	1.190,00	1.290,00
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.539,90	7.000,00	7.310,00
6	Konstruksi	368.347,00	401.310,00	441.170,00
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	291.053,80	317.370,00	354.240,00
8	Transportasi dan Pergudangan	33.703,60	34.950,00	39.410,00
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.830,30	7.200,00	7.780,00
10	Informasi dan Komunikasi	14.270,50	15.050,00	15.850,00
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	23.267,90	25.530,00	26.070,00
12	<i>Real Estate</i>	77.733,70	82.400,00	88.650,00
13	Jasa Perusahaan	330,6	350	380,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial	84.168,40	88.460,00	93.420,00
15	Jasa Pendidikan	61.346,10	65.530,00	6.931,00
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	27.358,60	31.190,00	3.351,00
17	Jasa lainnya	20.495,80	21.620,00	23.370,00
	Produk Domestik Regional Bruto (juta)	2.574.141,90	2.727.870,00	2.889.702,00

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023

Dari sisi kontribusi masing-masing sektor/kriteria terhadap PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sampai dengan tahun 2022, sector pertanian, kehutanan dan perikanan masih berperan sangat dominan dalam pembentukan PRDR dengan kontribusi sebesar 43,50%. Kontribusi terbesar berikutnya disumbangkan oleh sektor konstruksi sebesar 15,76%, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 12,01% dan sektor pertambangan dan penggalian sebesar 11,77%.



Sektor jasa lainnya yang didalamnya termasuk sub sektor jasa hiburan dan rekreasi berkontribusi sebesar 0,75%, sedangkan sektor yang paling sedikit memberikan kontribusi terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sektor jasa perusahaan dengan kontribusi sebesar 0,01%.

Tabel 3.14
Kontribusi Sektor/Lapangan Usaha Terhadap PDRB
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No.	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	43,76	43,44	44,23	43,05	43,50
2	Pertambangan dan Penggalian	11,39	11,61	11,75	12,13	11,77
3	Industri Pengolahan	3,43	3,40	3,40	3,50	3,51
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,28	0,27	0,27	0,28	0,27
6	Konstruksi	16,24	16,21	15,45	15,73	15,76
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,57	11,83	11,60	11,86	12,01
8	Transportasi dan Pergudangan	1,14	1,18	1,09	1,07	1,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,29	0,27	0,27	0,27
10	Informasi dan Komunikasi	0,59	0,57	0,64	0,64	0,62
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,99	0,95	1,02	1,03	0,94
12	Real Estat	3,28	3,31	3,26	3,26	3,23
13	Jasa Perusahaan	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,11	2,93	2,89	2,93	2,84
15	Jasa Pendidikan	2,06	2,07	2,10	2,13	2,10
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,08	1,11	1,21	1,29	1,29
17	Jasa Lainnya	0,74	0,78	0,73	0,75	0,75

Sumber Data : BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2023



Dari tabel diatas terlihat bahwa walaupun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan penyumbang terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bolaang Mongondow Utara namun kontribusinya cenderung mengalami penurunan dari 43,76% pada tahun 2018 menjadi 43,50 pada tahun 2022. Sebaliknya kontribusi sektor dominan lain yang meningkat adalah sector pertambangan dan penggalian naik dari 11,39% pada tahun 2018 menjadi 11,77% pada tahun 2022, sector industri pengolahan meningkat dari 3,43% pada tahun 2018 menjadi 3,51% pada tahun 2022, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor berkontribusi sebesar 11,57% pada tahun 2018, meningkat menjadi 12,01% pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa disamping sector pertanian, ketiga sector tersebut yakni sektor pertambangan dan penggalian, sector industri pengolahan serta sector perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor merupakan sektor potensial untuk lebih dikembangkan karena disamping mempunyai kontribusi yang dominan terhadap PDRB juga mengalami pertumbuhan yang signifikan selama lima tahun terakhir.

Tujuan 3. Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Sesuai Tata Ruang Yang Berwawasan Lingkungan

Misi keempat RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 – 2023 yakni Memantapkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Wilayah Yang Handal. Tujuan yang hendak dicapai untuk mewujudkan misi tersebut adalah Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur Sesuai Tata Ruang Yang Berwawasan Lingkungan, dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur.

Infrastruktur merupakan salah satu faktor penggerak pertumbuhan ekonomi. Selain menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah. Disamping itu, infrastruktur memiliki keterkaitan penting dengan laju pertumbuhan ekonomi



suatu wilayah karena suatu wilayah yang memiliki infrastruktur yang berfungsi lebih baik akan berdampak pada kesejahteraan manusia, kualitas hidup, dan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Sebaliknya, jika infrastrukturnya kurang baik maka akan ada permasalahan-permasalahan sosial lainnya yang muncul, salah satunya adalah sulitnya menarik investor untuk masuk ke Kabupaten Bolaang Mongondow Utara jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki kualitas infrastruktur lebih baik. Target indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 ditetapkan 3,73 point terealisasi 3,55 point atau **tingkat capaian 95,17%**, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.15
Pengukuran Kinerja Tujuan 3

No	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	Capaian		
1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	3.55	3.73	3.55	95.17	3.88	91.49
Rata-rata capaian Tujuan 4						95.17		

Sumber Data : Kajian IKLI Bapelitbang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

Hasil penilaian untuk seluruh infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diperoleh nilai Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur sebesar 86,34 atau Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR) 35,55 dengan **kategori Baik**. Indeks kinerja yang paling tinggi untuk infrastruktur adalah sekolah dengan nilai 96,41 dan dikategorikan Sangat Baik. Sedangkan indeks kinerja paling rendah adalah infrastruktur persampahan dengan nilai 69,62 atau dikategorikan Kurang Baik.



Tabel 3.16
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
Tahun 2021

No.	Layanan Infrastruktur	Indeks Kinerja	NRR Tertimbang
1	Irigasi	83.83	3.35
2	Jembatan	87.28	3.49
3	Air minum	72.94	3.49
4	Persampahan	69.62	2.78
5	Drainase	85.04	3.40
6	Tower BTS	88.69	3.55
7	Kelistrikan	93.31	3.73
8	Ruang Terbuka Hijau	84.76	3.73
9	Sekolah	96.41	3.86
10	Rumah Sakit dan Puskesmas	90.25	3.86
11	Pasar	90.01	3.86
IKLI		85.65	3.55

Sumber Data : Kajian IKLI Bapelitbang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2021

Dari penilaian indeks kinerja infrastruktur, dapat diketahui layanan infrastruktur yang sudah baik sehingga perlu untuk terus dipertahankan. Selain itu, dapat diketahui juga layanan infrastruktur yang nilainya masih kurang baik, sehingga dapat menjadi prioritas untuk terus ditingkatkan agar dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Urusan pendidikan merupakan salah satu urusan yang memiliki kedudukan penting dalam meningkatkan kualitas masyarakat. Meningkatnya kualitas derajat pendidikan masyarakat merupakan bagian dari fokus pembangunan untuk peningkatan *human capital*, mengingat peran sentral pendidikan baik sebagai bagian dari pemenuhan hak warga negara, maupun karena daya ungkit pendidikan terhadap pembangunan yang lain seperti pembangunan dan pemerataan ekonomi dan sosial. Pada tahun 2022 yang juga merupakan tahun Keempat RPJMD, realisasi pencapaian sasaran Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat telah menunjukkan hasil yang positif, hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kerjanya yang telah mencapai kinerja Sangat Tinggi. Adapun indikator kinerja dan capaiannya sebagai berikut:

Tabel 3.17
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,17	11,93	12,34	103,44	11,94	103,35
2	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,47	8,50	8,57	100,82	8,55	100,23
Rata-Rata Capaian						102,13		

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dengan formula: lamanya sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas. Target Capaian harapan lama sekolah pada tahun 2022 adalah 11,93 dan tercapai 12,34 (103,44%). Sedangkan Rata-rata lama sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang telah digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas untuk menempuh seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani, dengan formula :



$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

dimana:

RLS = rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

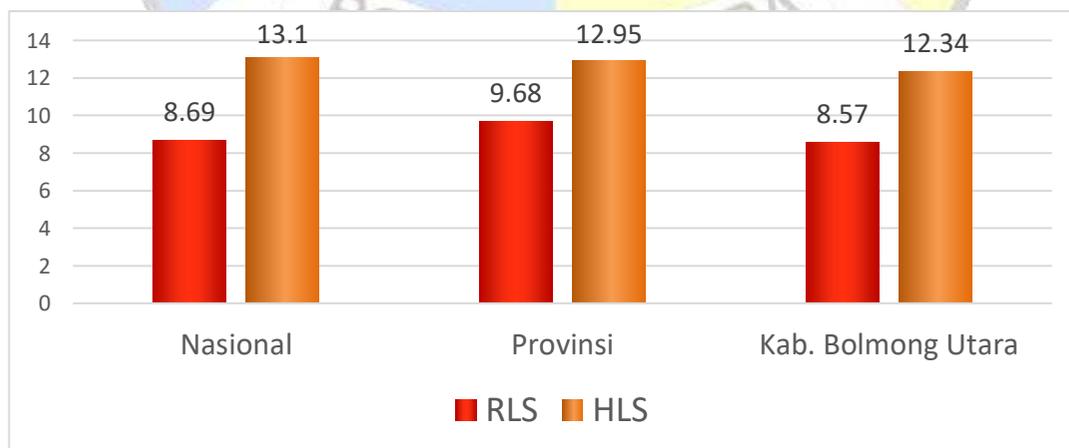
x_i = lama sekolah penduduk ke-I yang berusia 25 tahun

N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tahun 2022 yang juga merupakan tahun keempat RPJMD dapat diketahui bahwa target capaian rata-rata lama sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 adalah 8,50 tercapai 8,57 (100,82%).

Pada target akhir RPJMD, indikator HLS yaitu 11,94 tahun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 yaitu 12,34 tahun, maka dapat dinyatakan bahwa capaian pada indikator HLS telah melampaui target. Sementara indikator RLS pada target akhir RPJMD yaitu 8,55 tahun, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 yaitu 8,57, dapat dinyatakan sangat berhasil dan berpotensi untuk terus naik jauh melampaui angka yang ditergetkan diakhir RPJMD.

Grafik 3.5 :
Perbandingan Capaian RLS dan HLS antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022



Grafik 3.5 menunjukkan bahwa untuk capaian HLS pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada dibawah nasional dan Provinsi Sulawesi Utara. Namun perbedaannya tidak terlalu signifikan, begitupun pada capaian RLS. Hal ini menunjukkan bahwa capaian HLS dan RLS di Bolaang Mongondow Utara sudah cukup maksimal untuk berkontribusi terhadap capaian provinsi dan nasional.

Capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat dapat tercapai karena semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, serta didukung dengan program-program pada urusan pendidikan baik program pada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten. Program utama pada pemerintah kabupaten diantaranya:

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal
Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.18
Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal Tahun 2022

DATA	2022
	Realisasi
Cakupan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	
Presentase PNF Terakreditasi (LKP,PKBM)= (Jumlah PNF terakreditasi (LKP, PKBM)/Jumlah PNF secara Keseluruhan)x100%	100
Jumlah PNF Terakreditasi (LKP, PKBM)	5
Jumlah PNF Secara Keseluruhan	5
Persentase PAUD terakreditasi (TK, KB, SPS, TPA)/Jumlah PAUD secara Keseluruhan)x100%	100
Jumlah PAUD Terakreditasi (TK, KB, SPS,TPA)	179
Jumlah PAUD Secara Keseluruhan	179

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian Program Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal tahun 2022 sudah pada angka 100%.



2. Program Pembinaan Sekolah Dasar

Tabel 3.19
Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar Tahun 2022

DATA	2022
	Realisasi
Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar	
Persentase sekolah terakreditasi A(SD/MI) = (Jumlah sekolah terakreditasi A (SD/MI) / Jumlah SD/MI secara keseluruhan)x100%	2,17
Jumlah sekolah terakreditasi A (SD/MI)	2
Jumlah SD/MI secara keseluruhan	92

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian indikator Cakupan Pembinaan Sekolah Dasar tahun 2022 belum dapat terlaksana secara optimal, dari 92 Sekolah Dasar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, baru 2 sekolah yang terakreditasi A. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus berupaya tetap melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka persiapan penilaian akreditasi, sehingga pada tahun berikutnya mendapatkan hasil yang optimal.

3. Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama

Tabel 3.20
Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Tahun 2022

DATA	2022
	Realisasi
Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	
Persentase sekolah terakreditasi A (SMP/MTs) = (Jumlah sekolah terakreditasi A (SMP/MTs) / Jumlah SMP/MTs secara keseluruhan x 100%	30
Jumlah sekolah terakreditasi A (SMP/MTs)	6
Jumlah SMP/MTs secara keseluruhan	20



Dari data di atas diketahui bahwa capaian Program Pembinaan Sekolah Menengah Pertama tahun 2022 ada pada angka 30 persen. Dari total 20 Sekolah setingkat SMP/MTs, baru ada 6 sekolah yang memenuhi kriteria akreditasi A. Kegiatan pembinaan tetap dilaksanakan dalam rangka persiapan penilaian akreditasi, sehingga pada tahun berikutnya mendapatkan hasil yang optimal.

4. Program Pembinaan Ketenagaan

Tabel 3.21
Cakupan Pembinaan Sekolah Menengah Tahun 2022

DATA	2022
	Realisasi
Cakupan Pembinaan Ketenagaan	
Persentase Ketersediaan Tenaga kependidikan yang kompeten (TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs)= (Jumlah Tenaga Kependidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs yang kompeten/Jumlah Tenaga Kependidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs yang ideal)x100%	49,61
Jumlah Tenaga Kependidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs yang kompeten (PNS)	620
Jumlah Tenaga Kependidikan TK/RA, SD/MI dan SMP/MTs yang kompeten (Non PNS)	280
Jumlah Tenaga Kependidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs yang ideal	1814

Ketersediaan Tenaga Kependidikan berada pada angka 49,61 persen, artinya hal ini perlu menjadi perhatian bersama karena dari jumlah ideal tenaga kependidikan sebesar 1.814 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara baru dapat merealisasikan sejumlah 900 tenaga kependidikan sampai dengan tahun 2022. Upaya yang akan dilakukan adalah mempertahankan strategi pemenuhan tenaga kependidikan yang dibiayai APBD sangat membantu kinerja tata kelola satuan pendidikan, sesuai ketentuan yang ada.



Sasaran 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

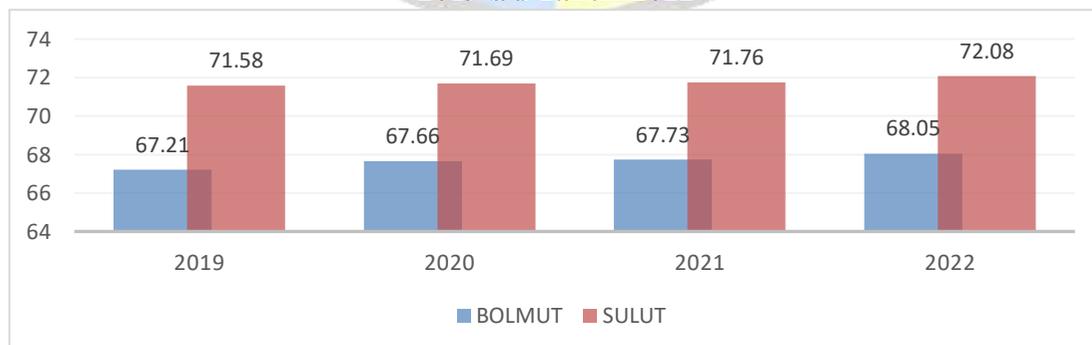
Sasaran strategis 2 merupakan salah satu upaya pencapaian Misi 1 yang ditetapkan dalam RPJMD 2018-2023, yaitu “*Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya*” dan Tujuan “*Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia*”. Pengukuran pencapaian sasaran dua berdasarkan pada data BPS tahun 2023 yang didukung oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Perangkat Daerah utama. Untuk mengukur sasaran tersebut ada 1 (satu) indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasarnya sebesar 99,75 % dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.22
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	67.73	68.22	68.05	99.51	99.75	99.57
Rata-Rata Capaian						99.51		

Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir. AHH, merupakan satu komponen pembentuk IPM dari aspek kesehatan. Pada tahun 2022, AHH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai 68,05 tahun itu artinya meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan AHH di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3. 6
Angka Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Dari Tahun 2019 s/d Tahun 2022



Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.



Berdasarkan grafik 3.6 dapat diketahui bahwa pada 3 (tiga) tahun terakhir AHH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus meningkat, yaitu dari angka 67.21 tahun pada 2019 menjadi 67.66 tahun pada tahun 2020. Semakin meningkatnya AHH di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin membaik, karena AHH merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2021, Angka Harapan Hidup mencapai 67,73 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 67-68 tahun. Begitu pula yang terjadi pada Tahun 2022, Angka Harapan Hidup meningkat dari 67.73 pada Tahun 2021 kini meningkat menjadi 68.05 dengan kenaikan 0.32 dari tahun sebelumnya. Walaupun Angka Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih dibawah angka provinsi dan nasional (Grafik 3.7) namun selalu menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya, artinya kualitas kesehatan penduduk terus membaik

Grafik 3.7
Perbandingan Angka Harapan Hidup Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022



Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.

Semakin membaiknya angka harapan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada dasarnya didukung oleh beberapa kinerja sasaran perangkat daerah bidang kesehatan, seperti: menurunnya angka kematian bayi, prevalensi stunting, persentase penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular, akses layanan kesehatan, dan kualitas air dan sanitasi.



a. Program Imunisasi Lengkap

Jika dilihat secara keseluruhan, penduduk 0-59 bulan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang mendapatkan imunisasi lengkap meningkat setiap tahunnya, yaitu sebanyak 14.65 persen di tahun 2019 dan meningkat menjadi 88 persen di tahun 2022. Dengan adanya kegiatan sosialisasi mengenai imunisasi di setiap wilayah desa, khususnya rumah tangga yang kepala rumah tangga yang berpendidikan dibawah SMP agar pemberian imunisasi lengkap balita dapat merata ke seluruh penduduk usia 0-59 tahun, Program Imunisasi Lengkap telah mencapai 88 persen pada Tahun 2022 ini. Jika dilihat dari persentase yang ada Program Imunisasi mengalami peningkatan, persentase penduduk balita di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami peningkatan pesat dari tahun-tahun kemarin. Artinya, pemerintah daerah telah berhasil melakukan sosialisasi pentingnya untuk melakukan imunisasi lengkap kepada masyarakat.

Capaian program imunisasi lengkap dapat dilihat pada Grafik berikut:

Grafik 3.8
Perkembangan Capaian Imunisasi Lengkap Tahun 2022



Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.



b. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

Grafik 3.9
Angka Kematian Bayi Dari Tahun 2018 s/d 2022

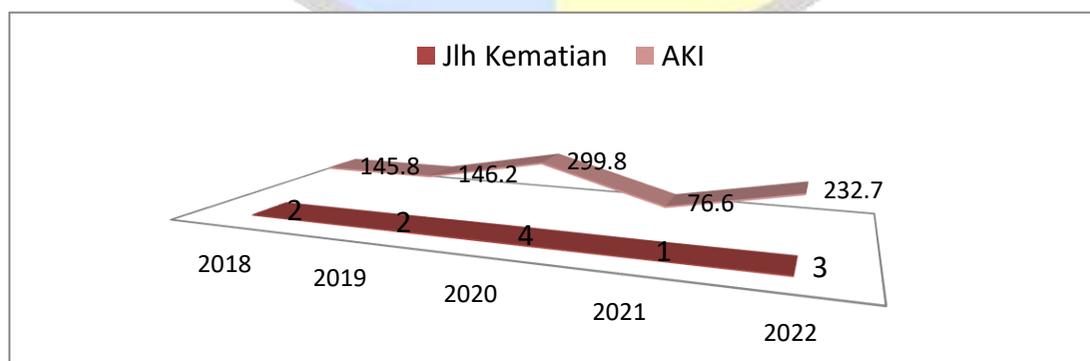


Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.

Angka Kematian Bayi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai target, sesuai dengan perhitungan dari Rasio angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dengan menggunakan perhitungan *Infant Mortality Rate (IMR)*, Target RPJMN Rasio angka kematian bayi 16/1000, untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara target kematian bayi 17 orang dan pada Tahun 2021 terdapat kematian bayi sebanyak 11 org. Jika dibandingkan tahun 2020, terjadi penurunan angka kematian bayi yaitu dari 10 % menjadi 8.42 % atau dari 13 kasus jumlah kematian menjadi 11 kasus jumlah kematian, sama halnya pada Tahun 2022 Angka Kematian Bayi mengalami penurunan dari 11 kasus pada 8.42% menjadi 6.98% untuk 9 Kasus Kematian Bayi dengan penyebab kematian BBLR (5 Kasus), Asfiksia (2 Kasus), Prematur (1 Kasus), dan Demam Tinggi (1 Kasus).

c. Menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI)

Grafik 3.10
Kondisi AKI dan Jumlah Kematian Ibu dari Tahun 2018 s/d 2022



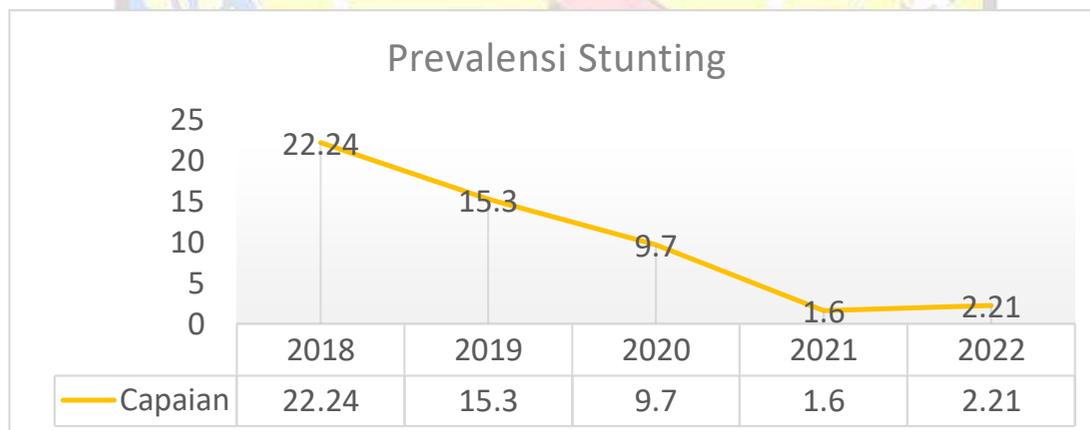
Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.



Berdasarkan grafik diatas, Angka kematian ibu tahun 2021 76,6 (1 Kasus) dari Rasio angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dengan menggunakan perhitungan *Maternal Mortality Rate (MMR)*, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah mencapai target Rasio angka kematian ibu secara Nasional 183/100.000 Kelahiran Hidup, untuk wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara target kematian ibu 2 orang dan pada Tahun 2021 terdapat kematian ibu 1 kasus. Adapun penyebab munculnya kasus kematian ibu adalah faktor *Eklampsia Post Partum*. Pada Tahun 2022 Angka Kematian Ibu meningkat dari Tahun 2021 sebesar 76.6 (1 kasus) kini meningkat menjadi 232.7 (3 Kasus) kematian Ibu dengan penyebab kematian Pre Eklampsia (2 kasus) dan Infeksi Post Operasi (1 kasus).

d. Prevalensi Stunting

Grafik 3.11
Prevelensi Stunting



Sumber; Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022..

Berdasarkan Grafik 3.11 dapat diketahui bahwa terjadi penurunan cukup signifikan atas prevalensi stunting di Kabupaten Bolaang Mogondow Utara yaitu dari angka 22.24 pada tahun 2018 menjadi 1.6 % pada tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh adanya sinergi program dan integrasi kebijakan penanganan stunting yang cukup maksimal serta inovasi kegiatan berupa gerakan masyarakat cegah stunting (GEMAR CHATING). Namun pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,60% dengan prevalensi stunting sebesar **2,21%** dengan jumlah balita stunting sebanyak **115** balita.



Terjadinya kenaikan prevalensi stunting sebesar 0,60 % dari tahun sebelumnya (2021) dikarenakan persentase balita yang diukur pada tahun 2022 lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 98,90%. Hal ini yang menyebabkan adanya kemungkinan beberapa balita stunting tidak terdeteksi pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mencapai target stunting pada RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 yaitu pada angka 10 persen. Serta mendukung target stunting pemerintah pusat pada RPJMN tahun 2020-2024 yaitu pada angka 14 persen. Namun hal yang perlu menjadi perhatian bersama, masih adanya keluarga berisiko stunting dari 22.716 jumlah keluarga terdapat 48 % atau 10,916 keluarga berisiko stunting yang tersebar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Inovasi *Mairu Molihuto Stunting* adalah sebuah inovasi yang diangkat dari kearifan lokal Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dimana kata *Mairu* memiliki arti ajakan/mengajak, sedangkan *Molihuto* artinya sama dengan Malendong yang artinya bekerja sama, gotong royong (keroyokan). Inovasi *Mairu Molihuto Stunting* memiliki arti luas bahwa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bersama 15 SKPD terkait, Tim Penggerak PKK, dan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan serta beberapa organisasi lainnya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan stunting secara terintegrasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

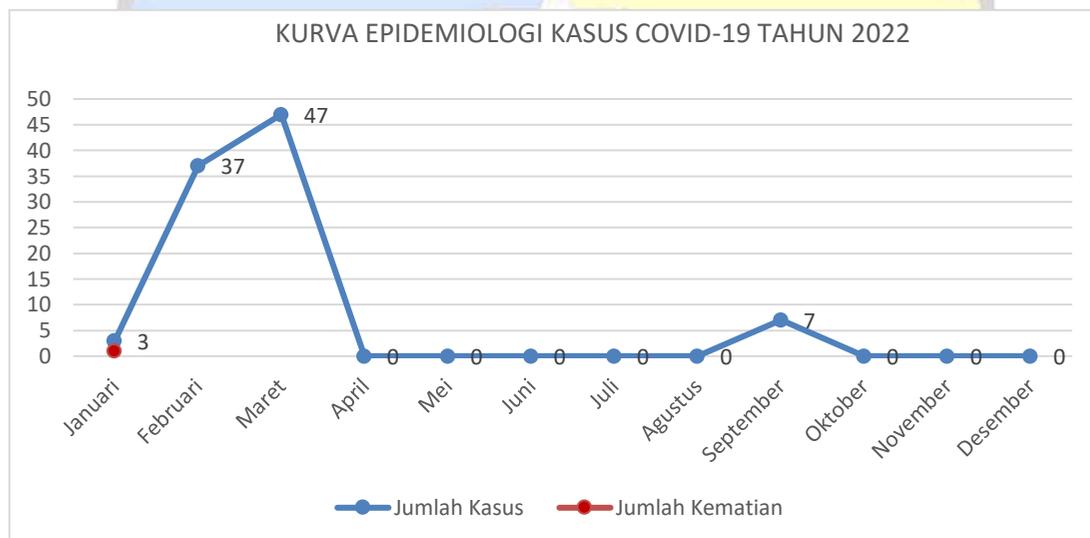
e. Optimalisasi Penanganan Covid-19

Pada kurva epidemiologi kasus Covid-19 di bawah kita dapat melihat bahwa pada bulan januari ada 3 kasus positif Covid-19 dan 1 kematian. 1 kasus kematian adalah lansia usia 63 tahun dengan gejala Demam, mual dan muntah, pasien belum pernah mendapatkan vaksinasi Covid-19. Kemudian terjadi peningkatan kasus pada bulan february yaitu sebanyak 37 kasus dan pada bulan maret 47 kasus. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh varian omicron, mobilisasi masyarakat yang masih tetap tinggi dan tingkat ketaatan terhadap PROKES (5M) mulai kendor. Pada bulan April hingga Agustus terjadi penurunan kasus secara fluktuatif. Tetapi pada bulan september terjadi



peningkatan kasus sebanyak 7 kasus. Kasus positif ini adalah kasus yang terdeteksi melalui Fasyankes, artinya kasus tersebut memiliki gejala dan atau datang berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk berobat yang selanjutnya terskrining melalui surveilans pasif di fasyankes dengan testing RDT Antigen ataupun PCR. Kasus kembali menurun pada bulan oktober hingga desember.

Grafik 3.12
Kondisi Epidemiologi Kasus Covid-19 di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 sebagai berikut :



Sumber : Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.

Gambaran Epidemiologi pada grafik diatas menunjukkan bahwa angka kasus konfirmasi positif dari puncak tertinggi (Maret = 47 kasus) hingga Agustus terjadi penurunan 100% dari puncak kasus. Tetapi meningkat kembali pada bulan september (7 kasus) atau 14 % dari jumlah Puncak kasus tertinggi. Selanjutnya di bulan – bulan berikut menurun 100%.

Upaya Pencegahan terus dilakukan salah satunya adalah melakukan PHBS, menggunakan masker bagi yang beraktifitas di keramaian, diruangan tertutup dan padat orang, lansia, ibu hamil, dan orang yang bergejala batuk, pilek, dan demam.

Dinas kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga terus melakukan Pelayanan Vaksinasi Covid-19 lengkap (Dosis 1 dan 2) serta

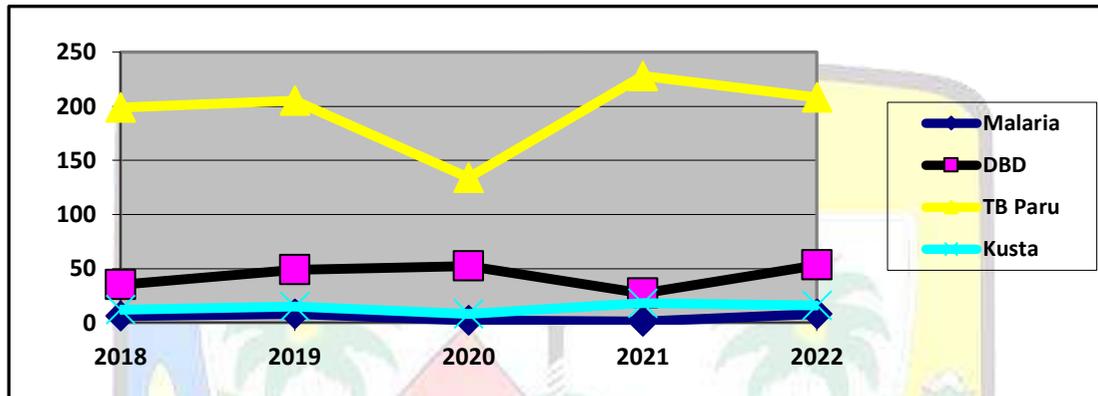


Booster (dosis 3) bagi yang telah memenuhi kriteria yaitu jarak 3 bulan dari vaksinasi ke dua sebagai pencegahan Covid-19.

f. Penyakit Menular

Grafik 3.13

Jumlah penyakit menular di Masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2022



Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022.

Angka kejadian kasus DBD di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun, di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 terjadi peningkatan kasus dari tahun 2021 yang hanya 27 kasus.

Peningkatan kasus demam berdarah pada tahun 2022 sebanyak 53 kasus dipengaruhi oleh beberapa faktor :

1. Untuk deteksi dini kasus DBD, program DBD pada tahun 2022 ditunjang dengan alat RDT DBD NS1 sehingga untuk kegiatan penyelidikan epidemiologi dan survey demam kasus DBD lebih cepat terdeteksi.
2. Lingkungan secara signifikan mempengaruhi kesakitan bagi setiap individu termasuk sosial, ekonomi, dan lebih utamanya perilaku masyarakat, meningkatnya mobilitas penduduk, kepadatan hunian, semakin baiknya sarana transportasi dan masih terdapat tempat perindukan nyamuk penular DBD.
3. Faktor perilaku pencegahan yang seharusnya secara rutin dilakukan tetapi masih kurang diperhatikan dan kurangnya partisipasi masyarakat dengan lingkungan yang dapat meningkatkan kejadian DBD.



Trend penemuan kasus TBC tahun 2022 sebanyak 208 kasus, dari target 257 kasus. Penemuan kasus tahun 2022 mengalami penurunan dari 2021, dikarenakan banyak pengelola program yang pindah tugas/mutasi/berhenti. Sehingga kegiatan penemuan kasusnya menurun dan adanya kekosongan tenaga analis laboratorium dalam Lab TBC sehingga pemeriksaan di puskesmas pun menurun. Pada Tahun 2021 dan 2022 terjadi Peningkatan Kasus TB Paru karena dengan dilakukan Skrinning dan Tracing Covid-19 angka penemuan kasus TB menjadi meningkat, dengan gejala TB Paru dan Covid-19 yang hampir mirip.

Penemuan kasus kusta 2022 mengalami penurunan dari penemuan kasus kusta 2021 sebanyak 16 kasus. Penurunan ini disebabkan adanya kegiatan aktif di tahun 2021 sehingga penemuan kasus 2022 mengalami penurunan. Akan tetapi tidak diimbangi dengan kegiatan aktif di tahun 2022, sehingga penurunan itu perlu dilakukan pemeriksaan aktif terhadap daerah endemis. Kabupaten Bolmut memilih estimasi penemuan kasus kusta 1:10.000 jlmh penduduk, dengan angka estimasi 6 kasus dalam 1 tahun.

Trend penemuan kasus malaria sejak tahun 2021 sampai 2022 terjadi kenaikan yaitu dari 1 kasus positif terkonfirmasi malaria di tahun 2021 menjadi 8 kasus positif terkonfirmasi malaria di tahun 2022. *Annual Parasite Incident (API)* kabupaten yaitu 0,01/1000 penduduk di tahun 2021 menjadi 0,1/1000 penduduk di tahun 2022. bila di lihat dari angka penemuan kasus bisa di simpulkan bahwa kegiatan *Case Aktif Detection* kasus malaria melalui survey migrasi sudah semakin aktif di laksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan, hal ini di dukung oleh adanya anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas maupun Dinas Kesehatan. Data ini di kuatkan dengan angka *Slide Positif Rate (SPR)* kabupaten yang berada di angka <5%, serta klasifikasi kasus positif yang di temukan merupakan kasus import dari daerah-daerah endemis malaria di Indonesia dan tidak di temukan kasus penularan setempat. namun dari beberapa keberhasilan tersebut terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program kegiatan pencegahan pengendalian malaria yang antaranya : Angka *Annual Blood Exemination*



Rate (ABER) 0,03 % yang masih sangat jauh dari target yaitu sebesar 10% hal ini dikarenakan beberapa faktor penghambat yaitu tidak adanya tenaga laboratorium di seluruh puskesmas sehingga deteksi dini berbasis laboratorium tidak sepenuhnya terealisasi, di samping pelatihan peningkatan kapasitas petugas tentang penyakit malaria yang masih minim.

HIV jumlah kasus 15 meninggal 5 orang. 1 di antaranya anak berumur 4 tahun. Trend kasus HIV mengalami peningkatan pada tahun 2021 berjumlah 12 orang dan tahun 2022 bertambah menjadi 15 orang. Peningkatan kasus positif HIV/AIDS karena pengelolah program yang ada di wilayah kerja puskesmas selalu melaksanakan Screening dengan menggunakan rapid baik pada ibu hamil maupun orang yang mempunyai keluhan serta tanda dan gejala HIV/AIDS. Hambatan : Adanya penolakan untuk melakukan pemeriksaan kontak, Tantangan : Masih adanya Diskriminasi pada Orang yang dengan HIV/AIDS.

Tabel 3.23
Kasus Penyakit Menular di Masyarakat Tahun 2018-2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jlh Penderita Malaria	6	8	2	1	8
	Jlh Yang tertangani	6	8	2	1	8
	%	100	100	100	100	100
2	Jlh Penderita DBD	35	49	52	27	53
	Jlh Yang Tertangani	35	49	52	27	53
	%	100	100	100	100	100
3	Jlh Penderita TB Paru	199	205	134	228	208
	Jlh Yang tertangani	199	205	134	228	208
	%	100	100	100	100	100
4	Jlh Penderita Kusta	12	15	8	18	16
	Jlh Yang Tertangani	12	12	8	18	16
	%	100	100	100	100	100
5	Jlh Penderita HIV		16	17	12	15
	Jlh Yang Tertangani		16	17	12	15
	%		100	100	100	100

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022



g. Penyakit Tidak Menular

Tabel 3.24
Kasus Penyakit Tidak Menular di Masyarakat Tahun 2019-2022

No	Uraian	2019	2020	2021	2022
1	Jlh Penderita Hipertensi	3498	13985	13985	13985
	Jlh Yang tertangani	3498	7085	10128	10910
	%	100%	51%	72%	78 %
2	Jlh Penderita Diabetes Melitus	244	941	1394	1690
	Jlh Yang Tertangani	244	1312	1394	1690
	%	100%	139%	100%	100%
3	Jlh Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	155	135	163	156
	Jlh Yang tertangani	116	95	163	156
	%	75%	70%	100%	100%

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas, presentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan 78%, secara keseluruhan di tiap puskesmas. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi dilaksanakan di Fasyankes dan di Posbindu PTM, karena masih dalam suasana Pandemi Covid-19 sehingga tingkat kehadiran masyarakat dalam posyandu masih rendah. Persentase penderita hipertensi terbanyak adalah perempuan sebanyak 7.757 orang (71%) dan penderita hipertensi laki-laki 3.153 orang (29%). Dari total penderita hipertensi yang tertinggi di Puskesmas Boroko 1510 Orang (13,8%) dari total Jumlah Penderita.

Jumlah sasaran penderita diabetes melitus di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah 1.690 Orang, dan yang mendapatkan Pelayanan 1.690 orang. Hal ini melebihi dari target sasaran dengan dilaksanakannya Skrinning PTM di masyarakat. Dapat di lihat bahwa terjadi peningkatan kasus dari tahun sebelumnya. penderita laki-laki berjumlah 300 Orang dan perempuan 1.094 Orang lebih banyak dari penderita laki-laki. Wilayah kerja Puskesmas Boroko merupakan daerah dengan tingkat penderita DM paling banyak yaitu 296 Orang.



Berdasarkan sasaran kasus baru ODGJ di tahun 2022 156 kasus, wilayah kerja Puskesmas Boroko, Puskesmas Bolangitang dan Puskesmas Ollot merupakan puskesmas dengan tingkat penemuan kasus baru yang tinggi. Jumlah keseluruhan kasus ODGJ yang tertangani adalah 156 kasus dan masih ada beberapa penderita kesehatan jiwa yang belum terdata.

Tabel 3.25
Persentase Penurunan Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Presentase Morbiditas Penyakit Menular dan Tidak menular	%	25	18.04	138.6
Jumlah					138.6%

Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Sasaran strategis 3 merupakan salah satu upaya pencapaian Misi yaitu “Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya” dan Tujuan “Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia”. Pengukuran pencapaian sasaran tiga “Meningkatnya daya beli masyarakat diwakili oleh dua indikator yaitu (1) Rata-rata pengeluaran perkapita yang disesuaikan dan (2) Gini rasio. Nilai rata-rata capaian kedua indikator sasaran tersebut tersebut mencapai 94,27 Persen dengan kategori Sangat Berhasil.

Tabel 3.26
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita disesuaikan	JutaRp	9,143	9,850	9,285	94,26	9,92	93,54
2	Gini Ratio	Poin	0,39	0,33	0,35	94,29	0,33	93,93
Capaian Rata-Rata						94,27		



Berdasarkan tabel 3.26 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja indikator “Rata-rata pengeluaran perkapita disesuaikan pada tahun 2022 ditargetkan Rp. 9,850 juta dengan realisasi Rp. 9,285 juta tingkat capaian 94,26 %. Capaian ini menghampiri target yang diperjanjikan. Jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu, dapat dinyatakan terjadi peningkatan sebesar 1,55 %, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerjanya mencapai 100,92 %.

Capaian indikator gini ratio tahun 2022 adalah 0,35 (poin) jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, dapat dinyatakan terjadi peningkatan ketimpangan yaitu sebesar 0,02 poin atau naik 6,06 % dari tahun sebelumnya, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerjanya mencapai 94,29 %.

1). Rata-rata pengeluaran perkapita disesuaikan

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu terakhir, sedangkan konsumsi bukan makanan dihitung sebulan dan setahun terakhir. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam laporan ini diperoleh dari publikasi BPS berupa Statistik kesejahteraan rakyat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022.

Grafik 3.14
Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Empat Tahun Terakhir.

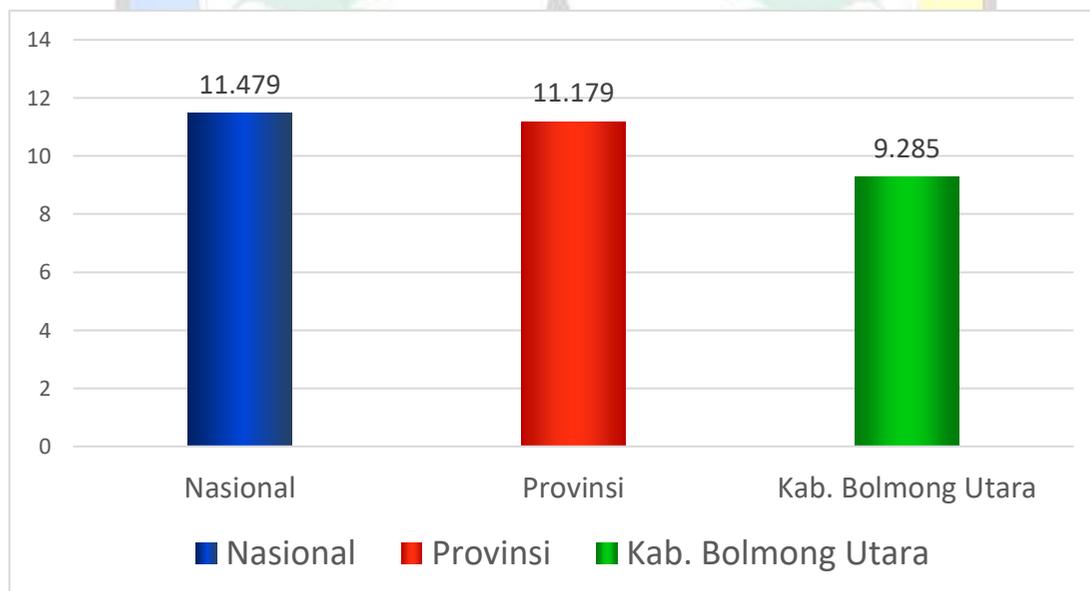


Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023



Berdasarkan grafik diatas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pada tahun 2020 disebabkan oleh dampak pembatasan sosial dimasa pandemic covid-19 yang secara perlahan berpengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat, hal ini juga dapat dikaitkan dengan angka pengangguran yang naik pada tahun yang sama. Sementara pada gambar 3.14 dapat diketahui bahwa pengeluaran perkapita kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 masih dibawah nasional (11,48) dan provinsi Sulawesi Utara (11,18).

Grafik 3.15
Perbandingan Pengeluaran perkapita Nasional, Provinsi dan Kabupaten



Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023

Selain itu, peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Konsumsi merupakan salah satu unsur penting dalam penghitungan produk domestik bruto (PDB) yang mengindikasikan aktivitas ekonomi suatu negara atau daerah. Jika masyarakat memiliki penghasilan yang lebih tinggi dan kemudian menghabiskan uang mereka pada barang dan jasa, hal ini dapat meningkatkan permintaan yang kemudian memicu pertumbuhan ekonomi. Peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, meskipun terlihat kecil, tetap memberikan



dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Namun, perlu juga diperhatikan bahwa peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita dapat memiliki dampak negatif, seperti inflasi. Jika harga barang dan jasa naik akibat meningkatnya permintaan, maka nilai uang akan menurun dan ini dapat memicu kenaikan harga yang berlebihan atau inflasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian inflasi agar peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita tidak berdampak buruk pada perekonomian dan masyarakat di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

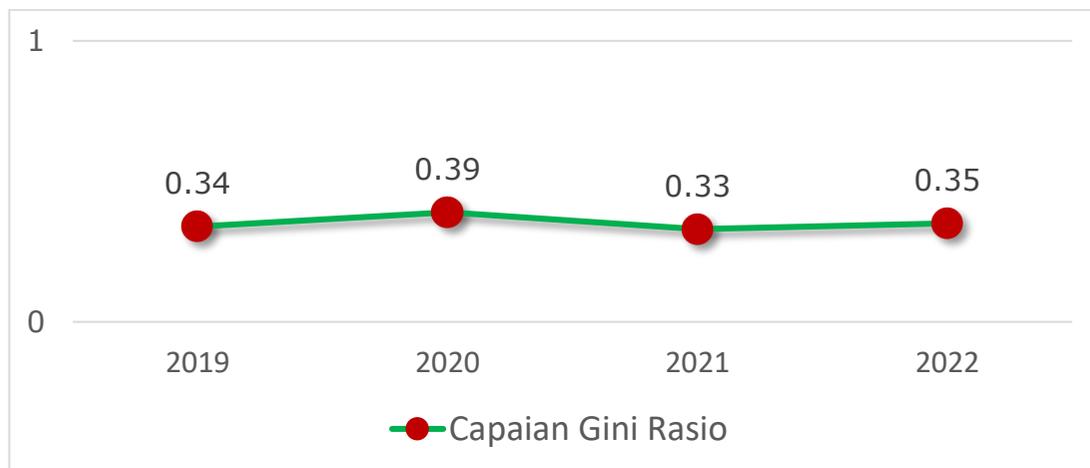
2). Gini Rasio

Gini Ratio merupakan salah satu ukuran ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Data Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan adanya fluktuasi selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2019, Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 0,34. Namun, pada tahun 2020, angka tersebut meningkat menjadi 0,39, turun menjadi 0,33 pada tahun 2021, kembali naik menjadi 0,35 pada tahun 2022. Gini Ratio yang meningkat menunjukkan adanya peningkatan ketimpangan pendapatan di daerah tersebut, sedangkan penurunan Gini Ratio menunjukkan adanya pengurangan ketimpangan pendapatan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kenaikan atau penurunan Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Salah satu faktornya adalah kualitas pendidikan dan keterampilan. Masyarakat dengan kualitas pendidikan dan keterampilan yang baik biasanya lebih mampu mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka dan mengurangi ketimpangan pendapatan. Faktor lainnya adalah akses terhadap sumber daya dan peluang. Masyarakat yang memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang yang lebih besar, seperti akses terhadap tanah, air, dan modal usaha, biasanya memiliki pendapatan yang lebih tinggi.



Grafik 3.16
Kondisi Gini Ratio Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2022



Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023

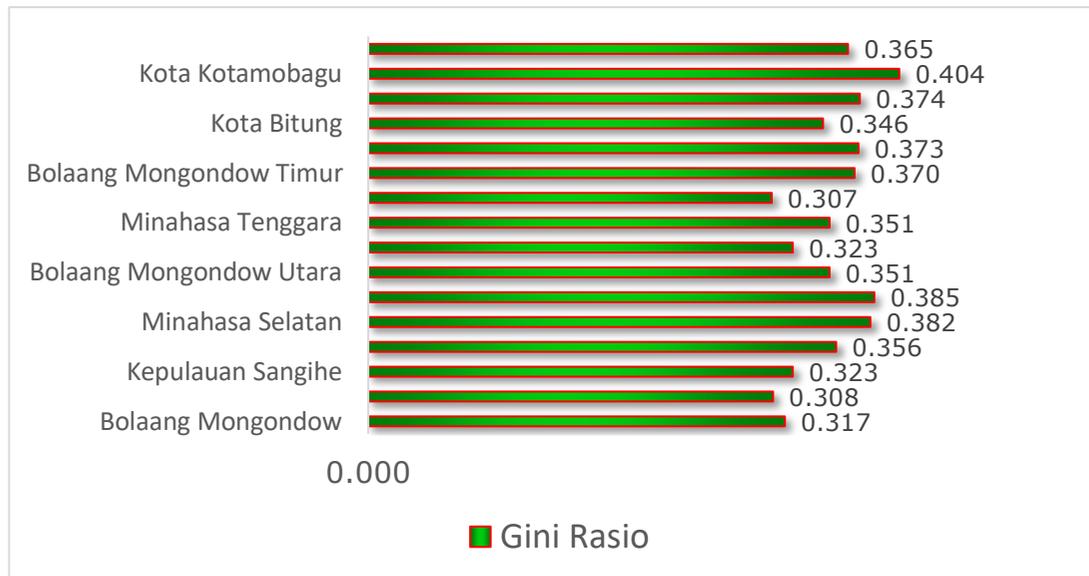
Untuk menurunkan Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, perlu dilakukan upaya untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta memberikan beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengakses pendidikan.

Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap sumber daya dan peluang. Pemerintah dapat memberikan bantuan modal usaha dan akses ke pasar bagi masyarakat yang ingin membuka usaha. Pemerintah juga dapat memberikan akses terhadap tanah dan air bagi masyarakat yang berada di wilayah yang kurang berkembang.

Namun, jika tren Gini Ratio terus meningkat, perlu dilakukan upaya yang lebih besar. Pemerintah dapat melakukan program redistribusi pendapatan, seperti pajak progresif dan pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu. Selain itu, pemerintah juga dapat mengurangi ketimpangan di sektor-sektor yang mempengaruhi penghasilan masyarakat, seperti sektor kesehatan dan pendidikan.



Grafik 3.17
Perbandingan Kondisi Gini Ratio se-Kab/Kota Provinsi Sulawesi Utara



Sumber: BPS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, 2023

Dalam mengatasi masalah Gini Ratio, perlu dilakukan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dibutuhkan program-program yang terencana dan terukur serta koordinasi yang baik antara sektor-sektor terkait. Selain itu, penting juga untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas dari program-program tersebut.

Secara keseluruhan, Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan adanya fluktuasi yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Selain faktor-faktor yang telah disebutkan sebelumnya, penting juga untuk memperhatikan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan, seperti pengangguran, migrasi, dan kesejahteraan sosial.

Pengangguran dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena mengurangi pendapatan keluarga dan kesempatan untuk memperoleh pengalaman dan keterampilan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas. Pemerintah



dapat memberikan insentif dan bantuan bagi sektor swasta untuk membuka lapangan kerja baru dan meningkatkan kualitas tenaga kerja.

Migrasi juga dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena dapat meningkatkan persaingan di pasar tenaga kerja dan menyebabkan perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi. Untuk mengurangi ketimpangan pendapatan akibat migrasi, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup di daerah asal migran dan mengurangi disparitas antara daerah asal dan tujuan migrasi.

Kesejahteraan sosial juga dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan karena dapat membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap program-program kesejahteraan sosial, seperti bantuan sosial dan jaminan kesehatan.

Dalam mengatasi ketimpangan pendapatan dan Gini Ratio, perlu dilakukan upaya yang bersifat preventif dan kuratif. Upaya preventif meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan sebelum ketimpangan terjadi, seperti meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta memberikan akses terhadap sumber daya dan peluang. Upaya kuratif meliputi tindakan-tindakan yang dilakukan setelah ketimpangan terjadi, seperti program redistribusi pendapatan dan bantuan keuangan kepada masyarakat yang kurang mampu.

Dalam kesimpulannya, data Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan adanya fluktuasi selama empat tahun terakhir. Diperlukan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penting untuk memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan, seperti kualitas pendidikan dan keterampilan, akses terhadap sumber daya dan peluang, pengangguran, migrasi, dan kesejahteraan sosial. Upaya preventif dan kuratif perlu dilakukan



untuk mengatasi ketimpangan pendapatan dan Gini Ratio di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Dalam rangka menunjang pencapaian sasaran Meningkatnya daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah telah menganggarkan bantuan sosial dan bantuan langsung tunai yang bersumber dari dana desa. Bantuan sosial ini terdiri dari (1). Bantuan natura lanjut usia dan penyandang disabilitas, 2). Bantuan social remaja putus sekolah (terampil), 3). Bantuan natura kepada BWBLP, 4). Bansos RS RTLH, 5). Bansos KUBE, 6) Bufferstok korban bencana. Sementara untuk BLTD DD mencakup 10.912 KK se-Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Hal ini sebagaimana pada gambar 3.7

Gambar 3.1
Kondisi Gini Ratio Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2019-2022



Sasaran 4 : Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga

Sasaran strategis 4 merupakan salah satu upaya pencapaian Misi 1 yaitu “*Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya*” dan Tujuan “*Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia*”. Pengukuran pencapaian sasaran 4 “menurunnya beban pengeluaran keluarga diwakili oleh dua indikator yaitu (1) tingkat pengangguran terbuka (2) persentase keluarga sejahtera. Nilai rata-rata capaian kedua indikator sasaran tersebut tersebut mencapai 105.98 Persen dengan kategori **Sangat Berhasil**.

Tabel 3.27
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5.48	3.75	5.41	55.73	3.63	50.96
2	Presentase Keluarga Sejahtera	Persen	74.90	50.94	74.90	147.04	50.98	146.92
Capaian Rata-Rata						101.38		

1) Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan tabel 3.27 di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja indikator “tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2021 ditargetkan 4.04 persen dengan realisasi 5.48 Persen tingkat capaian 64.36 %. Indikator ini tidak mencapai target. Walaupun demikian, jika dibandingkan dengan capaian tahun lalu (5.63), dapat dinyatakan menurun, dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka kinerjanya mencapai 66.24 %. Indikator TPT sangat berpotensi untuk tidak tercapai pada akhir tahun RPJMD. Dengan demikian sangat diperlukan kebijakan-kebijakan yang bisa mengurangi tingkat pengangguran terbuka. Misalnya kebijakan seperti perluasan kesempatan kerja, mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar, penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya, memperbaiki mutu



pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja dan lain-lain.

Salah satu masalah besar yang menjadi perhatian pemerintah adalah permasalahan di bidang ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan merupakan masalah yang sangat sensitif yang harus diselesaikan dengan berbagai pendekatan agar masalah tersebut tidak meluas yang berdampak pada penurunan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, serta masalah pekerja anak merupakan sebagian kecil masalah yang dihadapi oleh pemerintah.

Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dapat mencerminkan besarnya jumlah penduduk dalam kategori angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja dengan pola perhitungan :

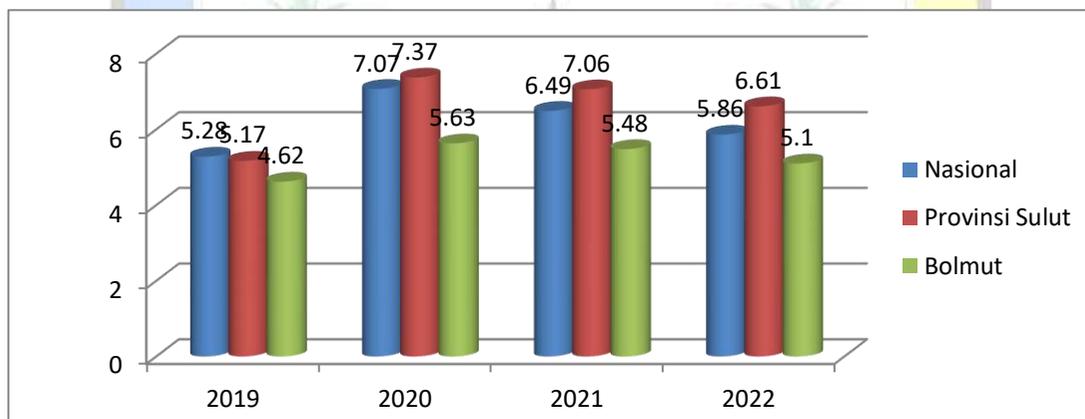
$$TPT = \frac{\text{Pencari Kerja}}{\text{Angkatan Kerja}} \times 100 \%$$

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum dibarengi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara rentang waktu 2018-2021 cenderung mengalami peningkatan, berangkat dari angka 3.42 persen pada



tahun 2018 menjadi 5.1 persen pada tahun 2022. Naiknya pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak selalu menandakan kondisi perekonomian yang sedang lesu, namun lebih diakibatkan oleh naiknya jumlah angkatan kerja (sepaimana pada tabel 3...) transformasi/pergeseran struktur ekonomi serta korelasi investasi dengan penyerapan tenaga kerja yang kurang optimal, disamping itu faktor dampak bencana non alam (pandemic covid-19) yang menyebabkan banyak karyawan dirumahkan.

Grafik 3.18
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka 4 Tahun Terakhir.



Sumber : BPS Tahun 2022

Berdasarkan grafik 3.18 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2020 baik secara Nasional, Provinsi maupun di Kabupaten, dimana pada tahun tersebut merupakan puncak kasus Pandemi Covid-19 di Indonesia. Secara perlahan terjadi penurunan angka pengangguran pada tahun 2021 dan terus berlanjut pada tahun 2022. Walaupun tidak begitu besar, dengan adanya penurunan tersebut menandakan bahwa secara perlahan perekonomian Indonesia mulai bangkit setelah dilakukannya berbagai upaya kebijakan oleh Pemerintah.

Tabel 3.28
Kondisi Angkatan Kerja Tahun 2022

No	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
1	37.044	1.991	39.035	94.89

Sumber : BPS 2022



2) Presentase Kesejahteraan Keluarga

Pada indikator “persentase keluarga sejahtera” tahun 2022 ditargetkan 50,94 persen dengan realisas 74,90, tingkat **capaian 147,04** dinyatakan sangat berhasil. Dan apabila dibandingkan dengan target akhir RPJMD maka capaian kinerjanya mencapai 146,92 %, dapat dinyatakan telah melampaui target akhir RPJMD. Indikator persentase keluarga sejahtera adalah indicator baru hasil perubahan RPJMD 2018-2023.

Keluarga Sejahtera merupakan landasan awal terciptanya masyarakat yang harmoni. Dari Keluarga Sejahtera akan lahir sumber daya manusia yang berkualitas sehingga akan terwujud pula bangsa yang berkualitas. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2009). Tingkat Kesejahteraan Keluarga menurut Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dikelompokkan menjadi 5 (lima) tahapan, yaitu:

- (1) Keluarga Pra Sejahtera (KPS);
- (2) Keluarga Sejahtera I (KSI);
- (3) Keluarga Sejahtera II (KS-II);
- (4) Keluarga Sejahtera III (KS-III); dan
- (5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS-III Plus).

Adapun kondisi perkembangan keluarga sejahtera di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam beberapa Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.29 dibawah ini :



Tabel 3.29
Kondisi Keluarga Sejahtera Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Beberapa Tahun Terakhir

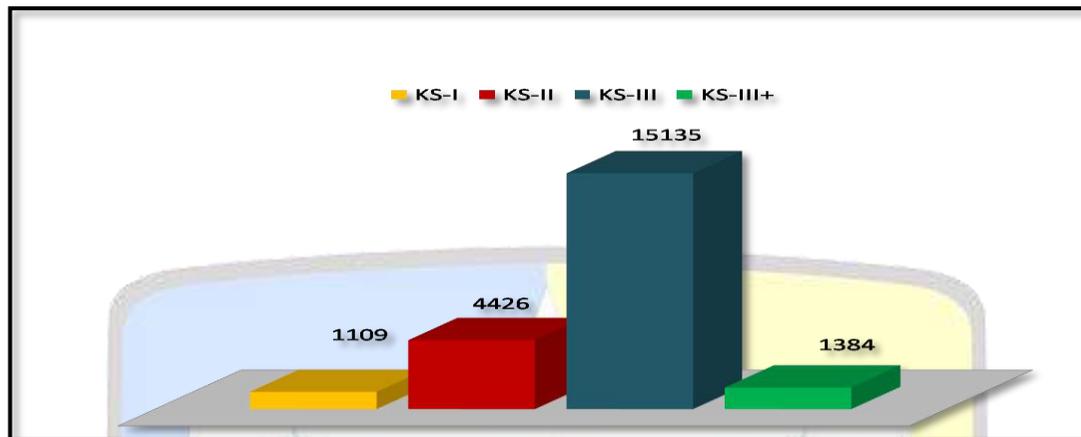
Kategori Keluarga Sejahtera	Tahun			
	2019	2020	2021	2022
Keluarga Sejahtera I	91	93	1.109	1.109
Keluarga Sejahtera II	149	146	4.426	4.426
Keluarga Sejahtera III	90	85	15.134	15.134
Keluarga Sejahtera III +	9	8	1.384	1.384

Sumber Data : Dinas PPKBPPA Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022

Berdasarkan tabel 3.29 dapat dilihat bahwa adanya trend kenaikan jumlah keluarga sejahtera yang begitu signifikan pada tahun 2021 dengan tahun – tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan dilaksanakannya Pendataan Keluarga Tahun 2021 atau yang disebut dengan PK-21 secara *door to door* sehingga menghasilkan data yang akurat *by name by address*. Pendataan Keluarga dilakukan serentak se-Indonesia oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional untuk mendapatkan basis data keluarga untuk Investasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan program pembangunan lainnya. Pendataan ini juga dilakukan untuk mengetahui potensi dan kendala keluarga Indonesia yang memiliki fungsi vital di bidang kesehatan, pendidikan serta ekonomi. Selain itu data yang didapatkan melalui Pendataan Keluarga menjadi dasar pengambilan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah dalam melakukan upaya peningkatan ataupun pemerataan pembangunan, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Pendataan Keluarga ini dilaksanakan setiap 5 (lima) Tahun sekali berdasarkan pada UU 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dan Peraturan Pemerintah No 87 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Dan melakukan Pemutakhiran Data setiap setahun sekali hingga dilaksanakannya kembali Pendataan Keluarga.



Grafik 3.19
Jumlah Keluarga Sejahtera Tahun 2022



Sumber: Dinas PPKBPPA Kab. Bolmong Utara (Diolah Tahun 2022)

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tahapan keluarga sejahtera di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 di dominasi oleh Keluarga Sejahtera III yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis serta kebutuhan pengembangan keluarga sebanyak 15.135 Keluarga. Selanjutnya terdapat 4.426 Keluarga dengan Tahapan Keluarga Sejahtera II yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan psikologis keluarga. Sebanyak 1.384 keluarga berada pada tahapan Keluarga Sejahtera III plus yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis, kebutuhan pengembangan serta mampu mengaktualisasikan diri atau *self esteem*. Dan terdapat sebanya 1.109 keluarga yang masih berada di tahapan keluarga sejahtera I yaitu keluarga yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya saja. Dari jumlah keluarga sejahtera berdasarkan tahapan keluarga tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar keluarga yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mampu memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis dan pengembangan keluarga.





Gambar 3.2 Pendataan Keluarga Kediaman Bupati Bolaang Mongondow Utara oleh Kader Pendata di dampingi Tim dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Gambar 3.3 Pendataan Keluarga Kediaman Wakil Bupati Bolaang Mongondow Utara oleh Kader Pendata di dampingi Tim dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Gambar 3.4 Pendataan Keluarga di Kediaman Ketua DPRD Bolaang Mongondow Utara oleh Kader Pendata di dampingi Tim dari Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Gambar 3.5
Kegiatan Pemberian Bantuan Sosial Oleh Bupati dan Wakil Bupati
Bolaang Mongondow Utara



Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran strategis 5 merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi Ke-2 yaitu “Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good and Clean Government*)” dan tujuan “*mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani*”. Pengukuran pencapaian sasaran 5 “Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan” diwakili oleh dua indikator yaitu Opini BPK dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Capaian kinerja pada sasaran ini adalah 100.00 % kategori *Sangat Berhasil*.

Tabel 3.30
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP*	100	WTP	100
2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Kategori	Tinggi	Sedang	Tinggi*	100	Tinggi	100
Rata-rata Capaian Sasaran 5:						100		

Pada tabel 3.30 Di atas, diketahui bahwa kinerja Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan diukur dengan 2 indikator yaitu “opini BPK” dan “Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah”. Didalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2022 masih dalam penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaporan masih dalam audit, namun dari Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerima Penghargaan dengan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke 6 (enam) kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.



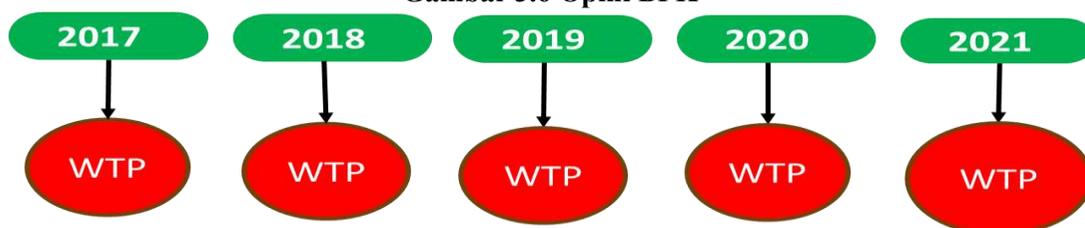
Hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Tahun 2022 belum dirilis, untuk itu pada LPPD Tahun 2022 ini kami menggunakan hasil Tahun 2020 yang memperoleh nilai sebesar 3.3274 atau predikat Tinggi. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan di Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah menunjukkan hasil yang baik.

1) Opini BPK

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pengukuran kinerja yang diukur dengan menggunakan hasil audit BPK RI atas LKPD setiap tahunnya. Terdapat tiga penilaian dari hasil audit yang terdapat dalam LKPD yang telah diaudit, antara lain berupa 1). Opini audit atas laporan keuangan, 2). Kelemahan Sistem Pengendalian Internal, dan 3) Ketaatan pada perundang-undangan.

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mampu secara konsisten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah. Trend positif atas opini BPK menunjukkan bahwa terjadi perbaikan secara berkelanjutan atas tata kelola keuangan pemerintah daerah.

Gambar 3.6 Opini BPK



Sumber: BPKD Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022



Gambar 3.7 Penyerahan LKPD dan LHP T.A. 2021



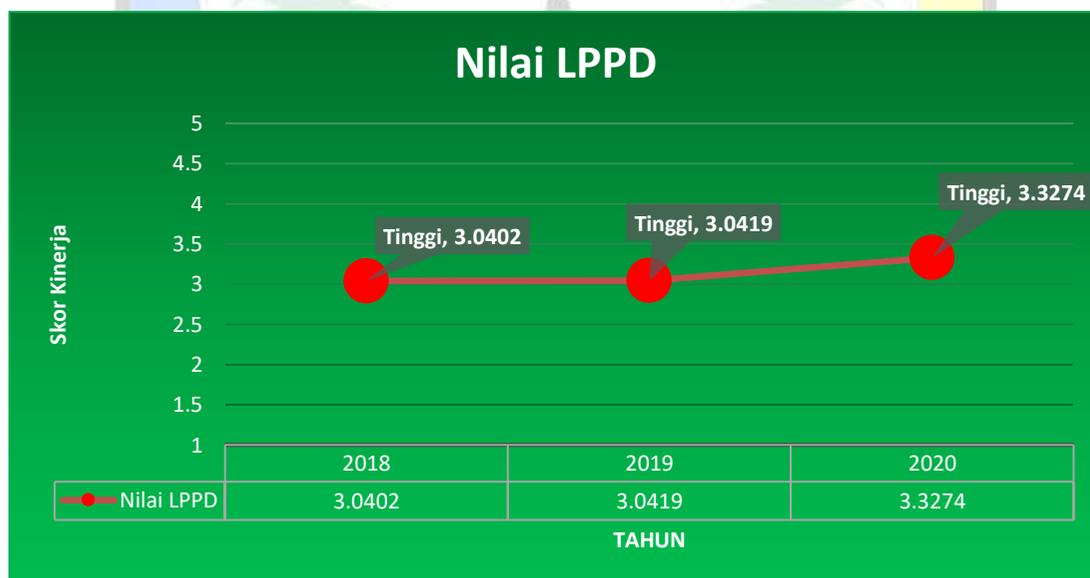
2) Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilaporkan ke Kementrian Dalam Negeri setiap tahun sekali. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah daerah (EDDP) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, kemampuan penyelenggaraan otonomi daerah dan kelengkapan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintah daerah yang baru dibentuk.



Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja sasaran “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan”. Berdasarkan grafik 3.20 diketahui bahwa nilai dan predikat penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara dari tahun 2018 sampai dengan 2020 dikategorikan “*Tinggi*”. Jika dilihat nilai yang diperoleh, tampak bahwa terjadi peningkatan nilai, yaitu 3.0402 (2018) naik menjadi 3.3274 (2020). Berdasarkan trend perkembangan skor ini, dapat diyakini bahwa capaian kinerja indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2022 akan meningkat dari tahun sebelumnya.

Grafik 3.20
Nilai LPPD Tahun 2018-2020



Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022

Tabel 3.31
Daftar Perbandingan Skor Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Antar Kab/Kota Se-Prov.Sulut Tahun 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Nama Provinsi	Skor	Prestasi
1	KOTA BITUNG	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,7318	TINGGI
2	KOTA MANADO	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,7073	TINGGI
3	KOTA KOTAMOBAGU	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,6920	TINGGI
4	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,6536	TINGGI
5	KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,5849	TINGGI
6	KOTA TOMOHON	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,5660	TINGGI
7	KABUPATEN MINAHASA TENGGARA	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,5477	TINGGI
8	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,4636	TINGGI



9	KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,4414	TINGGI
10	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,4192	TINGGI
11	KABUPATEN MINAHASA UTARA	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,3957	TINGGI
12	KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,3589	TINGGI
13	KABUPATEN MINAHASA	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,3578	TINGGI
14	KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,3274	TINGGI
15	KABUPATEN MINAHASA SELATAN	PROVINSI SULAWESI UTARA	3,2463	TINGGI

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022

Upaya mencapai kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan” terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, jika dilihat dari hasil yang dicapai kinerja urusan pemerintahan, maka dapat dikatakan secara umum bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2022 mencapai kinerja baik. Namun demikian harus disadari pula bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai macam kendala dan hambatan yang menyebabkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum optimal. Hal ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan, baik dalam aspek Sumber Daya Manusia, sarana prasarana, Regulasi maupun Anggaran. Meskipun demikian, dengan segala kekurangan tersebut Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mampu menunjukkan hasil kinerjanya. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Selain itu juga dimaksudkan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

Perincian program pembangunan daerah yang mendukung secara langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Program penyelenggaraan pengawasan
- Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi
- Program kepegawaian daerah
- Program pengelolaan barang milik daerah
- Program pengelolaan keuangan daerah



- Program pengelolaan pendapatan daerah
- Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
- Program pengembangan sumber daya manusia
- Program penelitian dan pengembangan daerah
- Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
- Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
- Program pemerintahan dan kesejahteraan rakyat
- Program perekonomian dan pembangunan
- Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
- Program aplikasi informatika
- Program informasi dan komunikasi publik
- Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat
- Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi
- Program penyelenggaraan statistik sektoral
- Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan

Sasaran 7 : Meningkatkan Pelayanan Publik

Sasaran strategis 6 merupakan salah satu upaya pencapaian Misi 2 yaitu “*Memantapkan tata kelola Pemerintahan yang Baik (Good and Clean Government)*” dan Tujuan “*Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani*”. Pengukuran pencapaian sasaran 6 “Meningkatnya pelayanan publik” diwakili oleh satu indikator yaitu Tingkat Kepuasan Masyarakat (Nilai Rata-Rata IKM) capaian kinerja pada sasaran ini adalah 106.25 % kategori *Sangat Berhasil*.



Tabel 3.32
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 6

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Kepuasan Masyarakat (rata-rata IKM)	Nilai	85.38	77.40	82.24	106.25	78.50	104.76
Rata-Rata						106.25		

Pada Tabel 3.32 Dapat diketahui bahwa kinerja sasaran 6 dengan indikator Tingkat Kepuasan Masyarakat (nilai rata-rata IKM) ditargetkan 77.40 (Baik) realisasi 80.35 (106.25%) kategori Sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD (78.50) capaiannya sebesar 104.76 % atau telah melampaui target akhir RPJMD. Angka yang dicantumkan dalam kolom realisasi adalah angka nilai rata-rata dari keseluruhan nilai IKM hasil survey tahun 2022 pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DUKCAPIL, DPMPTSP, DPUPR, DISNAKERTRANS, DISPERKIMTAN dan DINAS KESEHATAN.

Berdasarkan Grafik 3.21, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2020 hingga 2021 di lingkup Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Namun demikian, pada tahun 2022, terjadi penurunan nilai IKM menjadi 82,24. perlu kami sampaikan bahwa, pada tahun-tahun sebelumnya, terdapat SKPD yang telah melaksanakan Survei IKM, namun tidak pernah dilaporkan kepada Sekretaris Daerah pemda Bolaang mongondow Utara, sehingga tidak dapat dilakukan penilaian secara keseluruhan. Namun pada tahun 2022, kami menambahkan 4 perangkat daerah untuk dievaluasi pelayanan publiknya melalui survey IKM.

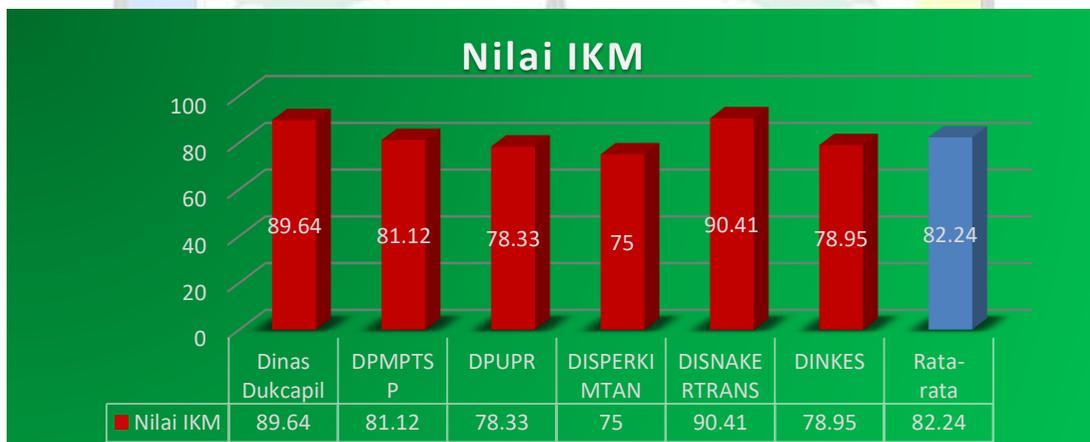


Grafik 3.21
Perkembangan Nilai IKM



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022

Grafik 3.22
Nilai IKM Pada UPP



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kab. Bolaang Mongondow Utara, 2022

Nilai rata-rata Tingkat kepuasan masyarakat merupakan indikator untuk mengukur kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini adalah untuk mendapatkan pengukuran persepsi dan harapan masyarakat dan atau institusi selaku pengguna jasa dengan melakukan survei, analisis dan pemetaan terhadap kinerja pelayanan publik perangkat daerah.

Dalam Pelaksanaan dan Pencapaian Indikator Sasaran Tersebut terdapat beberapa faktor penghambat yang dihadapi, diantaranya :

- a. Masih terdapat perangkat daerah yang belum menerapkan standar pelayanan dan standar operasional prosedur secara optimal dan konsisten;
- b. Kurangnya pemahaman aparat terhadap pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat yang hasil akhirnya ke Indeks Kepuasan Masyarakat



- c. Terbatasnya Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja penyelenggara pelayanan;
- d. Belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan yang ada pada sebagian Perangkat Daerah/Unit Kerja penyelenggara pelayanan publik
- e. Masih banyak proses pelayanan yang belum berbasis elektronik;
- f. Masyarakat masih kesulitan mendapatkan informasi syarat dan proses pelayanan secara online;

Berdasarkan kendala tersebut di atas, maka telah dilakukan beberapa upaya pencapaian indikator sasaran dimaksud, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Melakukan sosialisasi kebijakan pelayanan publik pada perangkat daerah se-kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Melakukan monitoring berkala terhadap implementasi standar pelayanan (SP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada unit pelayanan publik;
3. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan sarana jaringan internet pada perangkat daerah;
4. Peningkatan sarana prasarana *front office* pada perangkat daerah;
5. Peningkatan secara berkelanjutan terhadap layanan website resmi (www.bolmutkab.go.id) Pemerintah Daerah;

Perincian program pembangunan daerah yang mendukung secara langsung dalam pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan adalah sebagai berikut:

- Program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
- Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum
- Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
- Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
- Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan



- Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan
- Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
- Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
- Program pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan
- Program penanggulangan bencana
- Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran
- Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
- Program administrasi pemerintahan desa
- Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)

Sasaran 7 : Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengelolaan Potensi Unggulan Daerah/Local

Sasaran "Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/lokal" di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi ekonomi yang ada di daerah tersebut. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki beberapa sektor unggulan yang dapat dikembangkan, di antaranya adalah sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Pertanian merupakan sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Tanah di daerah ini cukup subur dan cocok untuk pertanian, sehingga produksi padi, jagung, sayuran, dan buah-buahan cukup besar. Sasaran ini akan meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan memperkuat kapasitas petani dan membuka akses pasar untuk produk pertanian.

Perikanan juga merupakan sektor unggulan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. memiliki potensi laut yang besar, sehingga sektor perikanan



dapat dikembangkan dengan baik. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB dengan meningkatkan produksi dan memperkuat kapasitas nelayan di daerah ini.

Sektor pariwisata juga memiliki potensi yang besar di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Daerah ini memiliki keindahan alam yang menarik, seperti pantai-pantai indah dan wisata alam. Sasaran ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB dengan mengembangkan infrastruktur pariwisata dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan sektor ini.

Selain itu, dalam mengembangkan potensi unggulan daerah, diperlukan juga kerja sama dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah daerah harus memfasilitasi dan memberikan dukungan kepada masyarakat dan sektor swasta dalam mengembangkan potensi unggulan daerah. Masyarakat juga harus diberdayakan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan potensi ekonomi di daerahnya.

Dalam keseluruhan, sasaran "Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/lokal" di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara akan berkontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di daerah ini. Dalam hal ini, diperlukan upaya yang komprehensif dan kolaboratif untuk mengembangkan potensi unggulan daerah dan memperkuat ekonomi kerakyatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Sasaran “Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/lokal” yang terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja utama dengan rata-rata capaian sebesar 79.46 kategori berhasil.

Berikut table capaian dan perbandingan realisasi tahun sebelumnya:



Tabel 3.33
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 7

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	34.03	36.46	34.03	93.34	38.29	88.87438
2	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	10.60	10.76	10.60	98.51	11.30	93.81
3	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	0.79	1	0.78	78	1.00	78
4	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	Milliar	5.985	15.00	7.20	48	17.50	41.14
Rata-rata Capaian Sasaran 7						79.46		

Analisis capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB

Pada tahun 2022, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) belum di publikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karena itu, dalam pengukuran kinerja sektor pertanian di tahun 2022, digunakan data pengukuran PDRB tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun lalu. Hal ini tentunya akan berdampak pada akurasi pengukuran dan laporan kinerja subsektor pertanian di tahun 2022.

Pada tahun 2022, target pertumbuhan subsektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebesar 36,46, dengan realisasi sebesar 34,03 dan capaian kinerja sebesar 93,34%. Namun, kinerja sub sektor pertanian di tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan oleh efek panjang dari pandemi Covid-19 di awal tahun 2020 dan iklim cuaca yang tidak menentu. Pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai dan masih terus melanda banyak negara, termasuk Indonesia, menyebabkan banyak sektor ekonomi, termasuk sektor pertanian, mengalami dampak yang



signifikan. Kondisi cuaca yang tidak menentu juga mempengaruhi kinerja sektor pertanian di berbagai wilayah di Indonesia khususnya kabupaten Bolaang mongondow Utara.

Tabel 3.34
Peningkatan Produksi Pertanian

No	Komoditas	Peningkatan Produksi Pertanian (Ton)		
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Padi	54,548.00	42,083.00	43,388.00
2	Jagung	50,337.00	51,654.00	53,160.00
3	Cabai	11.76	24.50	27.80
4	Tomat	2.50	6.40	8.20
5	Kelapa	15,549.00	15,551.50	15,210.50
6	Kakao	803.00	256.46	424.00

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Pertanian Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

Meskipun demikian, sektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tetap menunjukkan pertumbuhan yang positif pada tahun 2022. Berdasarkan table di atas, terjadi peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian di wilayah tersebut, seperti padi, jagung, cabai, tomat, dan kakao. Dinas pertanian juga telah melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi pertanian di wilayah tersebut, seperti dengan memberikan pelatihan dan bantuan alat dan bibit kepada petani. Selain itu, kebijakan dan program pemerintah yang mendukung sektor pertanian juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kinerja sektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah dengan memberikan insentif bagi petani untuk meningkatkan produksi pertanian. Insentif ini meliputi bantuan bibit dan pupuk subsidi serta penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan program-program pemberdayaan masyarakat melalui program pertanian berkelanjutan dan diversifikasi produk pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk pertanian di kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



Kesimpulannya, sektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian pada tahun 2022, meskipun kinerja sub sektor pertanian mengalami penurunan.

2) *Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB*

Sebagai salah satu sektor unggulan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sektor perikanan menjadi potensi besar dalam menyumbangkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di daerah tersebut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan subsektor perikanan menunjukkan tren penurunan. Hal ini tercermin dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB pada tahun 2022 masih belum terpublikasi, sehingga dalam pengukuran kinerja subsektor perikanan di tahun 2022, digunakan data pengukuran PDRB tahun 2021 yang dikeluarkan oleh BPS pada tahun lalu.

Dari data tersebut, kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB pada tahun 2022 memiliki target 10,76% dan realisasi sebesar 10,60% dengan capaian kinerja sebesar 98,51%. Pertumbuhan subsektor perikanan menunjukkan tren penurunan karena beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.

Dalam bidang perikanan tangkap, salah satu masalah yang dihadapi adalah struktur armada yang masih didominasi oleh sistem tradisional. Hal ini berdampak pada efektivitas dan efisiensi penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan. Selain itu, ketersediaan pelabuhan pendaratan ikan dalam hal ini dermaga dan TPI masih belum optimal baik dari sisi kelengkapan infrastruktur maupun dari sisi tingkat pelayanan dan operasionalnya. Masalah lainnya adalah belum adanya mesin pembuat es sehingga es kadang didatangkan dari luar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang dapat mengakibatkan biaya produksi yang lebih tinggi.

Di sisi lain, dalam bidang perikanan budidaya, permasalahan yang dihadapi antara lain tingginya harga pakan sehingga membuat tingginya biaya produksi perikanan budidaya. Selain itu, terbatasnya bibit yang



bermutu dan prasarana jaringan irigasi yang belum memadai serta potensi tambak yang belum dibuka secara optimal juga menjadi kendala dalam meningkatkan produksi perikanan budidaya.

Meskipun demikian, berdasarkan data yang ada dari Dinas Perikanan dan Kelautan terdapat peningkatan produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap di bandingkan dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masih banyak permasalahan yang perlu diatasi, upaya yang telah dilakukan oleh pihak terkait dalam meningkatkan produksi perikanan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah membuahkan hasil yang positif. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan perhatian yang lebih dari semua pihak untuk terus meningkatkan potensi sektor perikanan di daerah tersebut.

Tabel 3.35
Peningkatan Produksi Perikanan

No	Produksi	Satuan	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Perikanan Budidaya	Ton	155	39.45	87
2	Perikanan Tangkap	Ton	5.5	4.064	5.055

Sumber: Laporan Kinerja Dinas Perikanan Kab. Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022

3) *Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)*

Sub sektor Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi merupakan bagian dari sektor Jasa Lainnya yang memiliki kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah. Kontribusi sub sektor ini diukur dengan menghitung nilai tambah yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan di dalamnya.

Kegiatan yang termasuk dalam sub sektor Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi antara lain pertunjukan seni, tarian, musik, teater, sinema, pameran seni, pameran hewan, wahana rekreasi, serta berbagai kegiatan yang terkait dengan pariwisata.



Peningkatan kontribusi sub sektor Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi terhadap PDRB suatu wilayah dapat dicapai dengan pengembangan berbagai kegiatan di dalamnya, seperti dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas acara seni dan hiburan yang diselenggarakan, memperluas wahana rekreasi dan objek pariwisata, meningkatkan promosi dan pemasaran kegiatan seni dan hiburan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Dengan adanya peningkatan kontribusi sub sektor Kesenian, Hiburan, dan Rekreasi terhadap PDRB, maka dapat membantu meningkatkan perekonomian wilayah dan memberikan dampak positif bagi pengembangan sektor jasa lainnya di wilayah tersebut. Selain itu, keberadaan kegiatan seni dan hiburan yang berkualitas juga dapat meningkatkan citra dan daya tarik suatu wilayah sebagai destinasi wisata yang menarik bagi wisatawan, serta memberikan nilai tambah dalam membangun identitas dan kekayaan budaya suatu wilayah.

Sektor Kesenian, hiburan dan rekreasi (Sektor jasa lainnya) merupakan salah satu sub sektor yang tergabung dalam sektor jasa di Indonesia. Sub sektor ini berkontribusi terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) suatu daerah dan dapat memainkan peran penting dalam perekonomian lokal. Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sub sektor ini memiliki kontribusi sebesar 0,78% terhadap PDRB, di bawah target yang ditetapkan sebesar 1%. Hal ini menunjukkan adanya penurunan kontribusi sektor Kesenian, hiburan, dan rekreasi terhadap perekonomian daerah.

Penurunan kontribusi sub sektor Kesenian, hiburan dan rekreasi terhadap PDRB di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah penurunan daya beli masyarakat. Akibat pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang mengalami penurunan penghasilan atau kehilangan pekerjaan sehingga mengurangi pengeluaran untuk aktivitas hiburan dan rekreasi. Dampak pandemi ini sangat terasa pada sektor Kesenian, hiburan, dan rekreasi, terutama pada kegiatan yang



dilakukan di ruang terbuka seperti konser musik dan festival yang mengalami penurunan peserta.

Selain faktor penurunan daya beli masyarakat, persaingan dari sektor lain seperti sektor perdagangan dan jasa lainnya juga dapat mempengaruhi kontribusi sub sektor Kesenian, hiburan dan rekreasi terhadap PDRB. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi untuk mengembangkan sektor perdagangan dan jasa lainnya, sehingga persaingan antara sub sektor tersebut semakin ketat dan kontribusi sektor Kesenian, hiburan dan rekreasi tergeser.

Namun, meskipun terjadi penurunan kontribusi sub sektor Kesenian, hiburan dan rekreasi terhadap PDRB di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, masih terdapat peluang untuk mengembangkan sub sektor ini. Salah satu peluang yang bisa dimanfaatkan adalah potensi wisata di daerah tersebut. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki potensi wisata alam dan budaya yang masih perlu dikembangkan. Peningkatan kualitas dan kuantitas pariwisata di daerah ini dapat meningkatkan kontribusi sektor Kesenian, hiburan dan rekreasi terhadap PDRB.

4) *Realisasi Investasi (PMA/PMDN);*

Investasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Melalui investasi, daerah dapat meningkatkan ketersediaan lapangan kerja, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun, hal ini tidak mudah dilakukan, terutama di daerah yang masih berkembang seperti Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Berdasarkan data OSS BKPM, tercatat bahwa realisasi investasi di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 hanya mencapai Rp. 7.233.355.517,00 atau sekitar 48% dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 15.000.000.000,00. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh pemerintah dan investor dalam meningkatkan investasi di daerah tersebut. Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bolaang



Mongondow Utara merupakan sebuah tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah dan investor. Kendala infrastruktur pendukung, efek panjang pandemi COVID-19 yang mengakibatkan daya beli menurun sehingga para investor masih hati-hati dalam melakukan investasi jangka panjang.

Tabel 3.36
Data Investasi Tahun 2022

NO	NAMA PERUSAHAAN	TOTAL REALISASI INVESTASI
1	PT GLOBAL GEMILANG EXPRESS	30,000,000
2	PT ANUGRAH BOLAANG MONGONDOW UTARA PERKASA	15,712,454
3	PT GLOBAL GEMILANG EXPRESS	639,529,486
4	PT GLOBAL GEMILANG EXPRESS	158,051,494
5	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	1,488,486,429
6	PT SOLUSI TUNAS PRATAMA	1,497,566,922
7	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	1,179,000,000
8	PT PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA	1,488,486,429
9	PT GLOBAL GEMILANG EXPRESS	283,786,561
10	PT GLOBAL GEMILANG EXPRESS	452,735,742
TOTAL		Rp. 7,233,355,517, -

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2022



Sasaran 8 : Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan

Pembangunan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah di daerah memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik tingkat Kabupaten, kecamatan maupun desa, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan infrastruktur adalah bagian dari pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi dalam mempermudah kehidupan manusia dan membentuk juga struktur ruang wilayah.

Namun demikian, akan ada efek positif sekaligus negatif dalam kegiatan pembangunan, sehingga kita perlu memperhatikan pelaksanaan proses pengembangan. Dalam hal tujuannya, pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat maksimal dan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Oleh karena itu, dalam mengoptimalkan sasaran 8 (delapan), pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara menggunakan strategi seperti (1), meningkatkan infrastruktur dan utilitas wilayah, khususnya Kawasan strategis dan kumuh. (2), Menguatkan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan. (3), meningkatkan pengelolaan lingkungan.

Di era saat ini masyarakat tidak lagi menjadi obyek pembangunan, namun sebagai subyek pembangunan. Air minum dan sanitasi adalah kebutuhan dasar manusia. Sejak tahun 2019, Pemerintah Indonesia bercita-cita dapat mencapai *universal access* air minum dan sanitasi. Ini dimaknai bahwa 100% masyarakat mendapatkan layanan air minum dan sanitasi yang layak. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025.

Dalam melaksanakan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam dokumen perubahan RPJMD 2018-2023 ditegaskan bahwa secara umum pembangunan infrastruktur masih terfokus pada ibu kota Kabupaten, dimana, penanganan infrastruktur jalan, Air minum maupun drainase diupayakan dapat merubah wajah kawasan yang



maju dan mempunyai karakter. Untuk Wilayah kecamatan Kaidipang Persentase akses jalan sudah mencapai 97.7 persen dikarenakan hampir semua ruas jalan sudah dilakukan peningkatan, sementara air minum mencapai 95.27% karena intervensi yang sudah dilakukan oleh UPTD SPAM.

Titik berat pembangunan pada urusan pekerjaan umum adalah pada pembangunan, peningkatan dan perbaikan infrastruktur dasar. Untuk infrastruktur jalan berdasarkan data profil daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara panjang jalan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terbagi atas 5 kelas yaitu: jalan nasional dengan panjang 93.10 km; jalan Provinsi panjang 17 km; jalan Kabupaten 366.43 km; serta jalan desa/lokal 34.59 km.

Gambar 3.8
Pembangunan Infrastruktur Jalan



Sebagai upaya meningkatkan aksesibilitas antar wilayah, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah terbangun infrastruktur jalan kabupaten sepanjang 151,62 KM. Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur jalan pada tahun 2022 ditargetkan Jalan dalam kondisi mantap sebesar 80%. Hasil survei kondisi jalan dan jembatan terhadap seluruh ruas jalan dan jembatan kewenangan Kabupaten pada akhir tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.37
Kondisi Jalan dan Jembatan

No	Jenis Permukaan	Panjang (Km)
1	Aspal/Penetrasi/Macadam	117.443
2	Perkerasan Beton	1.086
3	Lapen/Latasir/Macadam	5.6
4	Telford Kerikil	27.494
	TOTAL	151.62



Sasaran “Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan” yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 98,56% kategori SANGAT BERHASIL.

Berikut tabel analisis capaian kinerja tahun 2022 masing-masing indikator pada sasaran 8:

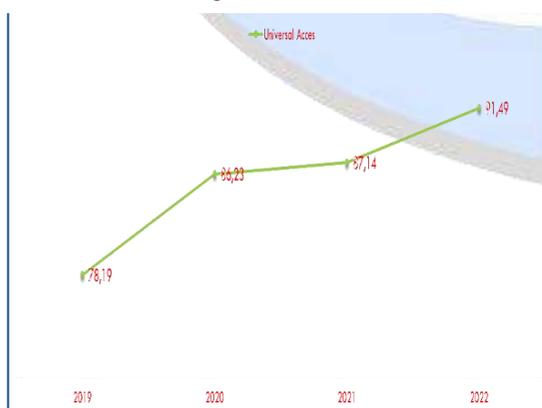
Tabel 3.38
Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 8

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2021	Tahun 2022			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Tahun 2022 Terhadap Target Akhir RPJMD (%)
				Target	Realisasi	%		
1	Cakupan <i>Universal Acces</i>	%	87,14	93.57	85.61	91.49	100.00	85.61
2	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	80	90.00	88.76	98.62	90.00	98.62
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	76,24	75.04	79.21	105.56	76.90	103.00
Rata-Rata Capaian Sasaran 8						98.56		

1) Cakupan *Universal Acces*

Indikator Cakupan Universal Acces dengan target 93,57% terealisasi 85,61% tingkat capaian sebesar 91,49 % predikat berhasil, walaupun kondisi ini masih jauh dari target universal acces Nasional yakni 100%.

Grafik 3.23
Perkembangan Nilai Universal Acces



Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam RPJMD 2018-2023 bercita-cita diakhir periode renstra tahun 2023 dapat mencapai *universal access* air minum dan sanitasi. Layanan air minum dan sanitasi yang layak diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat. Program pembangunan air minum dan sanitasi ditunjang dengan

pendekatan Program Pamsimas yang berbasis masyarakat, Partisipatif dan berkelanjutan. Sedangkan untuk mengurangi pencemaran air tanah dari



limbah rumah tangga melalui Infrastruktur Sanitasi telah dibangun IPAL Komunal di beberapa Desa. Tolak ukur capaian ketersediaan infrastruktur air limbah yang memadai baik kuantitas dan kualitas yaitu indikator persentase penduduk berakses air Limbah.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih bebas dari kawasan kumuh, hal ini dapat dilihat dari persentase kepadatan penduduk, dimana dengan luas wilayah $\pm 1.856,86$ km², jumlah penduduk sebesar 79,366 jiwa, maka rasio kepadatan penduduk per km² sebesar 42,74%. Sedangkan sebaran penduduk menunjukkan distribusi yang merata. Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi disebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat miskin, konstruksi bangunan yang seadanya dan tidak tertata.

Tabel 3.39
Universal Access

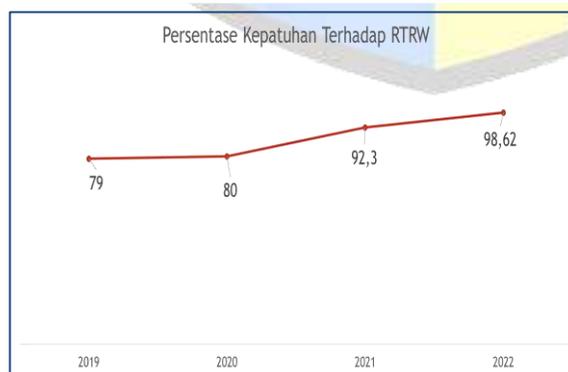
Uraian	Satuan	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Capaian air minum aman	Persen	70,13	82,92	92,03	94,93	91,02
Capaian Sanitasi Layak	Persen	66,98	73,46	80,43	80,88	70,21
Capaian Kawasan kumuh tertangani	Persen	2,19	2,12	2,05	2,00	2,00

Sumber Data : Bappelitbang Tahun 2022

Sumber Data : BPS Sulawesi Utara Tahun 2022

2) Persentase Kepatuhan terhadap RTRW

Grafik 3.24
Perkembangan Persentase Kepatuhan Terhadap RTRW



Rencana tata ruang wilayah dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pembangunan yang dipandang perlu sangat prioritas dan memiliki nilai strategis dalam percepatan pembangunan. Rencana tata ruang memuat rancangan

yang bersifat umum dan masih diperlukan rencana tata ruang yang merinci



dan mengoperasionalkan rencana tata ruang wilayah seperti rencana dasar tata ruang kawasan perkotaan dan rencana tata ruang kawasan perdesaan sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang

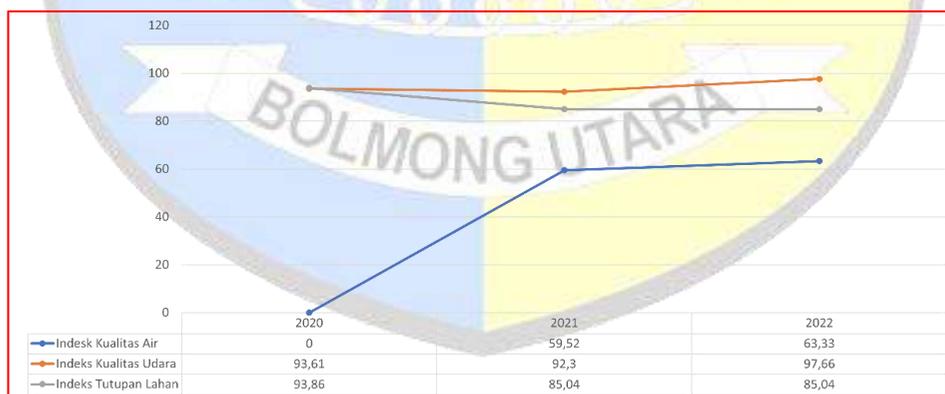
Kepatuhan terhadap RTRW adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang rencana pembangunan RTRW. Sampai dengan tahun 2022, Indikator Persentase Kepatuhan terhadap RTRW dengan target 90 % terealisasi 88,76 % tingkat capaian sebesar 98,62% predikat sangat berhasil.

3) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 75,04% terealisasi 79,21 % tingkat capaian sebesar 105,56% predikat **sangat berhasil**.

Untuk mendapatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat 3 (tiga) unsur parameter yang diukur, 1. Indeks Kualitas Air; 2. Indeks kualitas udara dan 3. Indeks Tutupan Lahan (vegetasi), hasil pengukuran ketiga parameter ini diuraikan dalam table berikut:

Grafik 3.25
Perkembangan Kualitas Lingkungan



- Hasil pengukuran terhadap indicator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang terdiri dari 3 (tiga) unsur parameter yang diukur yaitu Indeks Kualitas Air, (63,33 %) Indeks Kualitas Udara (97,66 %), Indeks Tutupan Lahan (85,04) yang masing-masing menunjukkan hasil yang baik, artinya indeks kualitas lingkungan hidup di kabupaten Bolaang mogondow utara dikategorikan **berhasil** dengan capaian rata-rata di **82,01%**.

Gambar 3.9
Pengukuran Indeks Kualitas Air



- Indeks Kualitas Air : pengukuran kualitas air dilakukan dengan metode pengambilan sampel Air di hulu dan hilir sungai yang terdapat di bolaang mongondow utara. Parameter yang diukur untuk tiap sampel air yaitu pH; BOD; COD; TSS; DO; NO3-N; Total Phosphat; Fecal Coliform (menggunakan standar baku mutu SNI). Pengukuran IKA ini menggunakan metode sederhana dengan cara pengambilan sampel air di sumber air kemudian dibawa ke laboratorium terdekat untuk diukur kandungan dari parameter diatas.



Gambar 3.10
Pengukuran Indeks Kualitas Udara



- Indeks Kualitas Udara: Pengambilan sampel udara menggunakan metode *ambien passive sampler*. Metode ini mengambil 4 (empat) titik di setiap kecamatan. Titik pengambilan udara ambien terdiri dari Kawasan perkantoran, Kawasan industri, Kawasan pemukiman, Kawasan transportasi. Dari hasil masing-masing parameter pengambilan sampel menunjukkan bahwa kualitas udara di bolaang mongondow utara berada di dalam kategori baik atau belum tercemar yaitu berada di angka 97,66

terjadi kenaikan indeks Kualitas Air jika dibandingkan dengan hasil uji air di tahun 2021, kenaikan tersebut sebesar 5,36 maka IKU bolaang mongondow utara berada di kategori BAIK dan mencapai target.

- Indeks Tutupan Lahan : Indeks Tutupan Lahan pada tahun 2022 bersumber dari hasil pengukuran oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan dipublikasikan melalui website <https://ppkl.menlhk.go.id/>. Karena untuk bolaang mongondow utara belum menganggarkan untuk pengukuran kualitas tutupan lahan itu sendiri. Dan berdasarkan hasil pengukuran tersebut Bolaang Mongondow Utara memiliki indeks Tutupan Lahan sebesar 85.04 atau dalam kategori baik. Dengan target tahun 2022 sebesar 84 maka Indeks Kualitas Lahan Kab. Bolaang Mongondow Utara dikategorikan berhasil. Demikian hasil pengukuran sasaran strategis 1 yakni indeks kualitas lingkungan hidup di kabupaten bolaang mongondow utara dikategorikan berhasil dengan capaian sebesar 79,71.

Berdasarkan uraian analisis capaian sasaran Meningkatkan Ketersediaan Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Wilayah Yang Berwawasan Lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa capaian atas target dinyatakan sangat berhasil, serta mengalami peningkatan/kemajuan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Keberhasilan capaian atas



target sasaran 8 (delapan) ini karena didukung oleh beberapa kebijakan program diantaranya:

1. Program perencanaan Lingkungan Hidup
2. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
3. Program pengelolaan keanekaragaman hayati
4. Program pengendalian bahan berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3)
5. Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat
6. Program pengembangan perumahan
7. Program Kawasan permukiman
8. Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas Umum (PSU)
9. Program penatagunaan tanah
10. Program Pengelolaan Sumber Daya Air
11. Program pengelolaan dan pengembangan system penyediaan air minum
12. Program pengembangan system dan pengelolaan persampahan regional
13. Program pengelolaan dan pengembangan system air limbah
14. Program pengelolaan dan pengembangan system drainase
15. Program Pengembangan Permukiman
16. Program penataan bangunan Gedung
17. Program penataan bangunan dan lingkungannya
18. Program penyelenggaraan jalan



3.3. Realisasi Anggaran

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2022 berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2021 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini memperlihatkan bahwa manajemen kinerja keuangan sudah memuaskan. Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah berbasis akrual, dengan unsur laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Untuk tahun anggaran 2022 pemeriksaan rinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Belum dilaksanakan, sehingga gambaran akuntabilitas keuangan yang disajikan berikut ini masih bersifat sementara dan bersumber dari data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022 yang telah diajukan ke Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk pelaksanaan audit rinci.

APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat demi tercapainya tujuan bernegara. Pencapaian tujuan bernegara pada konteks Pemerintah Daerah dimaksud sangat dipengaruhi dengan capaian target kinerja pendapatan daerah. Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.3.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 701.853.782.844,00 terealisasi Rp 699.047.441.220,03 atau 99,60%. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 3. 40
Capaian Pendapatan Asli Daerah Tahun 2022

Uraian	Tahun 2021		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.994.514.319,00	21.962.093.623,09	91,53
Pendapatan Pajak Daerah	5.587.965.365,00	5.864.133.632,75	104,94
Pendapatan Retribusi Daerah	5.711.250.000,00	1.488.351.309,00	26,06
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	717.084.719,00	717.084.719,00	100
Lain-lain PAD Yang Sah	11.978.214.235,00	13.892.523.962,34	115,98

Sumber : LKPD Unaudited 2022

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 41
Capaian Pendapatan Transfer

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	637.096.308.000,00	636.638.128.244,00	99,93
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.464.088.662,00	20.023.793.866,00	129,49
J u m l a h		652.560.396.662,00	656.661.922.110,00	100,63

Sumber : LKPD Unaudited 2022

Capaian target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2022 dari total yang ditargetkan pada APBD sebesar Rp 676.554.910.981,00 dapat direalisasikan sebesar Rp 678.624.015.733,00 atau 100,31% terdapat peningkatan dana Tarnsfer Rp 2.069.104.752,00 atau 0,31% dari besaran pendapatan yang ditargetkan.

Secara rinci target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2022 berdasarkan obyek dan rincian obyek pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 3. 42
Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Saha

Uraian	Tahun 2022		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN	676.554.910.981,00	678.624.015.733,09	100,31
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	23.994.514.319,00	21.962.093.623,09	91,53
Pendapatan Pajak Daerah	5.587.965.365,00	5.864.133.632,75	104,94
Pendapatan Retribusi Daerah	5.711.250.000,00	1.488.351.309,00	26,06
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	717.084.719,00	717.084.719,00	100
Lain-lain PAD Yang Sah	11.978.214.235,00	13.892.523.962,34	115,98
PENDAPATAN TRANSFER	652.560.396.662,00	656.661.922.110,00	100,63
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	637.096.308.000,00	636.638.128.244,00	99,93
Pendapatan Transfer Antar Daerah	15.464.088.662,00	20.023.793.866,00	129,49

Sumber : LKPD Unaudited 2022

3.3.2. Belanja Daerah

Belanja daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 pasal 20 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun. Definisi lainnya mengenai belanja seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP 58 Tahun 2005 bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, definisi belanja ini sama dengan definisi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah meliputi belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relative dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.



1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2022 mencapai 97,14 % dari total yang dianggarkan sebesar Rp. 346.311.581.893,00 atau terealisasi sebesar Rp. 336.398.084.779,00.

Persentase dari setiap jenis belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 43
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2022

No	Uraian	Tahun 2022		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pegawai	221.332.813.656,00	213.501.889.839,00	96,46
2	Belanja Hibah	6.440.922.528,00	6.091.660.528,00	94,58
3	Belanja Bantuan Sosial	4.575.933.500,00	4.322.751.832,00	94,47
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	922.325.000,00	722.022.195,00	78,28
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	110.965.303.600,00	110.965.303.600,00	100
6	Belanja Tak Terduga	2.074.283.609,00	794.456.785,00	38,30
Jumlah		346.311.581.893,00	336.398.084.779,00	97,14

Sumber : LKPD Unaudited 2022

2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA), dan Rencana kerja SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur dan belanja beasiswa pendidikan. Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, antara lain untuk peningkatan kualitas Sumber



Daya Manusia melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Belanja langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 354.981.942.005,00 terealisasi Rp. 315.354.588.696,65 atau tingkat capaian 88,84% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 44
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2022

No	Uraian	Tahun 2022		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Barang Jasa	173.919.024.223,00	161.691.063.199,20	92,97
2	Belanja Modal	181.062.917.782,00	153.663.525.497,45	84,87
Total Belanja		354.981.942.005,00	315.354.588.696,65	88,84

Sumber : LKPD Unaudited 2022

Dari tabel diatas juga dapat di jelaskan bahwa belanja langsung tahun anggaran 2022 didominasi oleh belanja modal yaitu sebesar Rp. 181.062.917.782,00 atau sebesar 196,05% dari total belanja langsung, sedangkan belanja barang dan jasa sejumlah Rp. 173.919.024.223,00 atau sebesar 50,74%. Selanjutnya dapat dijelaskan realisasi anggaran dan proporsi belanja daerah terhadap total belanja APBD pada tahun anggaran 2022 sebagai berikut :

Tabel 3. 45
Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung TA. 2022

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2022		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja tidak langsung	346.311.581.893,00	336.398.084.779,00	97,14
2	Belanja langsung	354.981.942.005,00	315.354.588.696,65	88,84
Total Belanja		701.293.523.898,00	651.752.673.475,65	92,94

Sumber : LKPD Unaudited 2022



Tabel 3. 46
Proporsi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Terhadap Total Belanja Daerah TA. 2022

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)
Belanja tidak langsung	346.311.581.893,00	49,38
Belanja langsung	354.981.942.005,00	50,62
Total Belanja	701.293.523.898,00	100

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa proporsi belanja tidak langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 346.311.581.893,00 atau 49,38% dari total belanja daerah, sedangkan proporsi belanja langsung sebesar Rp. 354.981.942.005,00 atau 50,62%.

3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target APBD yang telah ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala yang masih terus menerus membelenggu aspek pencapaian target yang telah ditetapkan baik pada pengelolaan pendapatan maupun belanja daerah senantiasa terfokus pada persoalan klasik yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia, disamping permasalahan klasik yang sifatnya internal tersebut juga terdapat permasalahan yang bersifat eksternal yang sangat mempengaruhi capaian target kinerja yang ditetapkan.

Berikut ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada aspek pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. Masih adanya dampak Pandemi Covid-19 Tahun 2020;
2. Kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah;
3. Masih kurangnya kerjasama lintas Perangkat Daerah pengelola Pajak dan retribusi daerah;
4. Pada sektor Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang memanfaatkan dana APBN dan APBD Provinsi terkendala pada tahapan penagihan;
5. Masih kurangnya potensi pajak dan retribusi daerah sehingga



berpengaruh pada penerimaan daerah;

6. Pada sektor PBB banyak terdapat potensi yang belum terdata;

7. Pajak Bumi dan Bangunan belum melakukan *update* data perihal perubahan objek.

Tabel 3. 47
Realisasi dan Efisiensi Anggaran 2022 per Program

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	396.090.367.407,00	358.052.554.095,20	(38.037.813.311,80)	90,40
1.1	PENDIDIKAN	119.523.842.727,00	114.371.960.446,00	(5.151.882.281,00)	95,69
1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	87.601.842.067,00	84.250.416.899,00	(3.351.425.168,00)	96,17
1.1.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	303.247.300,00	170.219.414,00	(133.027.886,00)	56,13
1.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	31.520.193.360,00	29.730.584.133,00	(1.789.609.227,00)	94,32
1.1.4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	98.560.000,00	96.000.000,00	(2.560.000,00)	97,40
1.2	KESEHATAN	183.157.609.435,00	162.357.612.709,20	(20.799.996.725,80)	88,64
1.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	45.605.003.949,00	43.840.103.148,00	(1.764.900.801,00)	96,13
1.2.2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	130.633.213.190,00	112.192.375.859,20	(18.440.837.330,80)	85,88
1.2.3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	6.363.283.666,00	5.874.678.812,00	(488.604.854,00)	92,32
1.2.4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	436.871.280,00	344.253.490,00	(92.617.790,00)	78,80
1.2.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	119.237.350,00	106.201.400,00	(13.035.950,00)	89,07
1.3	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	77.187.972.106,00	65.571.123.184,00	(11.616.848.922,00)	84,95
1.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.509.337.060,00	5.362.147.233,00	(147.189.827,00)	97,33
1.3.2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	3.281.232.800,00	3.049.115.131,00	(232.117.669,00)	92,93
1.3.3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	5.991.948.080,00	4.844.307.448,00	(1.147.640.632,00)	80,85
1.3.4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	2.881.800.000,00	2.674.625.000,00	(207.175.000,00)	92,81
1.3.5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.046.292.442,00	1.013.558.509,00	(32.733.933,00)	96,87
1.3.6	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	282.042.822,00	275.255.048,00	(6.787.774,00)	97,59
1.3.7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	8.482.480.000,00	1.328.104.445,00	(7.154.375.555,00)	15,66
1.3.8	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	129.099.900,00	128.326.286,00	(773.614,00)	99,40
1.3.9	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	48.446.360.992,00	45.777.676.968,00	(2.668.684.024,00)	94,49
1.3.10	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	491.882.410,00	484.511.100,00	(7.371.310,00)	98,50
1.3.11	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	645.495.600,00	633.496.016,00	(11.999.584,00)	98,14
1.4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5.129.455.723,00	5.044.799.415,00	(84.656.308,00)	98,35
1.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.310.418.705,00	3.253.455.696,00	(56.963.009,00)	98,28
1.4.2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	365.881.000,00	365.486.800,00	(394.200,00)	99,89
1.4.3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	988.125.968,00	966.672.631,00	(21.453.337,00)	97,83
1.4.4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	86.369.450,00	83.246.150,00	(3.123.300,00)	96,38
1.4.5	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	378.660.600,00	375.938.138,00	(2.722.462,00)	99,28
1.5	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.926.552.310,00	3.806.661.149,00	(119.891.161,00)	96,95
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.053.483.510,00	1.954.754.509,00	(98.729.001,00)	95,19
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.511.260.000,00	1.490.506.440,00	(20.753.560,00)	98,63



1.5.3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	361.808.800,00	361.400.200,00	(408.600,00)	99,89
1.6	SOSIAL	7.164.935.106,00	6.900.397.192,00	(264.537.914,00)	96,31
1.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.491.634.356,00	5.311.527.023,00	(180.107.333,00)	96,72
1.6.2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	112.115.000,00	105.238.577,00	(6.876.423,00)	93,87
1.6.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	276.110.200,00	275.281.255,00	(828.945,00)	99,70
1.6.4	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	325.941.100,00	292.775.350,00	(33.165.750,00)	89,82
1.6.5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	867.552.250,00	834.721.187,00	(32.831.063,00)	96,22
1.6.6	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	91.582.200,00	80.853.800,00	(10.728.400,00)	88,29
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	46.237.807.102,00	43.059.628.715,45	(3.178.178.386,55)	93,13
2.1	TENAGA KERJA	2.430.421.638,00	2.337.305.098,00	(93.116.540,00)	96,17
2.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.949.415.388,00	1.857.802.248,00	(91.613.140,00)	95,30
2.1.2	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	409.412.450,00	407.944.250,00	(1.468.200,00)	99,64
2.1.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	71.593.800,00	71.558.600,00	(35.200,00)	99,95
2.2	PANGAN	2.837.431.550,00	2.604.874.789,00	(232.556.761,00)	91,80
2.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.066.630.650,00	1.908.766.023,00	(157.864.627,00)	92,36
2.2.2	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	596.747.800,00	536.046.046,00	(60.701.754,00)	89,83
2.2.3	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	73.859.450,00	68.554.040,00	(5.305.410,00)	92,82
2.2.4	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	100.193.650,00	91.508.680,00	(8.684.970,00)	91,33
2.3	LINGKUNGAN HIDUP	5.565.885.692,00	5.431.696.227,00	(134.189.465,00)	97,59
2.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.556.848.012,00	2.446.339.817,00	(110.508.195,00)	95,68
2.3.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	402.841.500,00	389.938.200,00	(12.903.300,00)	96,80
2.3.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	103.589.700,00	101.593.720,00	(1.995.980,00)	98,07
2.3.4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	9.948.100,00	9.345.400,00	(602.700,00)	93,94
2.3.5	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	65.311.500,00	63.860.500,00	(1.451.000,00)	97,78
2.3.6	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.427.346.880,00	2.420.618.590,00	(6.728.290,00)	99,72
2.4	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.196.231.935,00	3.023.082.477,00	(173.149.458,00)	94,58
2.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.747.504.785,00	2.576.948.207,00	(170.556.578,00)	93,79
2.4.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	448.727.150,00	446.134.270,00	(2.592.880,00)	99,42
2.5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.979.655.452,00	2.898.603.060,00	(81.052.392,00)	97,28
2.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.363.110.952,00	2.284.431.160,00	(78.679.792,00)	96,67
2.5.2	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	154.425.700,00	152.839.500,00	(1.586.200,00)	98,97
2.5.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	462.118.800,00	461.332.400,00	(786.400,00)	99,83
2.6	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	10.002.240.873,00	8.351.221.592,00	(1.651.019.281,00)	83,49
2.6.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.356.978.811,00	3.217.177.652,00	(139.801.159,00)	95,84
2.6.2	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	641.168.800,00	634.850.621,00	(6.318.179,00)	99,01
2.6.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	151.546.000,00	132.702.280,00	(18.843.720,00)	87,57
2.6.4	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	60.351.800,00	5.040.000,00	(55.311.800,00)	8,35
2.6.5	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	3.125.204.662,00	2.664.495.279,00	(460.709.383,00)	85,26
2.6.6	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.973.822.200,00	1.284.334.100,00	(689.488.100,00)	65,07
2.6.7	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	47.505.600,00	41.335.900,00	(6.169.700,00)	87,01
2.6.8	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	645.663.000,00	371.285.760,00	(274.377.240,00)	57,50
2.7	PERHUBUNGAN	3.813.044.292,00	3.756.202.432,00	(56.841.860,00)	98,51



2.7.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.155.697.692,00	2.131.820.141,00	(23.877.551,00)	98,89
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.657.346.600,00	1.624.382.291,00	(32.964.309,00)	98,01
2.7.2					
2.8	KOMUNIKASI & INFORMATIKA	5.021.407.400,00	4.842.379.921,00	(179.027.479,00)	96,43
2.8.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.545.495.360,00	2.393.709.418,00	(151.785.942,00)	94,04
2.8.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.123.326.700,00	1.114.623.800,00	(8.702.900,00)	99,23
2.8.3	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	69.646.500,00	68.595.500,00	(1.051.000,00)	98,49
2.8.4	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.282.938.840,00	1.265.451.203,00	(17.487.637,00)	98,64
2.9	PENANAMAN MODAL	3.353.338.919,00	3.101.874.685,45	(251.464.233,55)	92,50
2.9.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.818.368.369,00	2.723.529.357,45	(94.839.011,55)	96,63
2.9.2	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM	20.127.200,00	20.067.600,00	(59.600,00)	99,70
2.9.3	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	126.189.350,00	116.093.150,00	(10.096.200,00)	92,00
2.9.4	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	388.654.000,00	242.184.578,00	(146.469.422,00)	62,31
2.10	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4.810.159.097,00	4.633.458.732,00	(176.700.365,00)	96,33
2.10.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.499.850.597,00	2.348.524.237,00	(151.326.360,00)	93,95
2.10.2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.072.636.400,00	1.054.474.295,00	(18.162.105,00)	98,31
2.10.3	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	1.237.672.100,00	1.230.460.200,00	(7.211.900,00)	99,42
2.11	KEARSIPAN	2.227.990.254,00	2.078.929.702,00	(149.060.552,00)	93,31
2.11.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.184.550.254,00	2.035.489.702,00	(149.060.552,00)	93,18
2.11.2	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	16.945.000,00	16.945.000,00	0,00	100,00
2.11.3	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	17.995.000,00	17.995.000,00	0,00	100,00
2.11.4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	8.500.000,00	8.500.000,00	0,00	100,00
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	27.522.761.828,00	25.805.081.723,00	(1.717.680.105,00)	93,76
3.1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.559.131.912,00	4.237.310.383,00	(321.821.529,00)	92,94
3.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.448.422.412,00	2.196.104.783,00	(252.317.629,00)	89,69
3.1.2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	1.564.720.500,00	1.522.347.070,00	(42.373.430,00)	97,29
3.1.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	533.688.500,00	518.858.530,00	(14.829.970,00)	97,22
3.1.4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	12.300.500,00	0,00	(12.300.500,00)	0
3.2	PARIWISATA	3.481.461.822,00	3.287.228.554,00	(194.233.268,00)	94,42
3.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	2.496.392.482,00	2.336.162.154,00	(160.230.328,00)	93,58
3.2.2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	465.300.440,00	430.693.800,00	(34.606.640,00)	92,56
3.2.3	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	519.768.900,00	520.372.600,00	603.700,00	100,12
3.3	PERTANIAN	14.402.316.273,00	13.318.918.285,00	(1.083.397.988,00)	92,48
3.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	9.627.099.763,00	8.856.778.609,00	(770.321.154,00)	92,00
3.3.2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.440.985.760,00	3.277.410.904,00	(163.574.856,00)	95,25
3.3.3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	101.522.200,00	82.763.200,00	(18.759.000,00)	81,52
3.3.4	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	481.025.150,00	359.284.847,00	(121.740.303,00)	74,69
3.3.5	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	166.938.000,00	166.437.525,00	(500.475,00)	99,70
3.3.6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	584.745.400,00	576.243.200,00	(8.502.200,00)	98,55
3.4	PERDAGANGAN	5.079.851.821,00	4.961.624.501,00	(118.227.320,00)	97,67
3.4.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	3.098.111.786,00	3.001.580.364,00	(96.531.422,00)	96,88
3.4.2	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	288.940.200,00	283.141.296,00	(5.798.904,00)	97,99
3.4.3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	322.756.585,00	317.822.180,00	(4.934.405,00)	98,47
3.4.4	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	43.492.000,00	38.323.000,00	(5.169.000,00)	88,12
3.4.5	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	50.206.200,00	49.345.600,00	(860.600,00)	98,29



3.4.6	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	1.276.345.050,00	1.271.412.061,00	(4.932.989,00)	99,61
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	67.367.708.619,00	64.632.228.379,00	(2.735.480.240,00)	95,94
4.1	SEKRETARIAT DAERAH	41.701.254.777,00	39.583.440.666,00	(2.117.814.111,00)	94,92
4.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	33.123.234.057,00	31.624.677.036,00	(1.498.557.021,00)	95,48
4.1.2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	7.490.925.520,00	6.938.004.290,00	(552.921.230,00)	92,62
4.1.3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.087.095.200,00	1.020.759.340,00	(66.335.860,00)	93,90
4.2	SEKRETARIAT DPRD	25.666.453.842,00	25.048.787.713,00	(617.666.129,00)	97,59
4.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	18.877.357.351,00	18.443.449.939,00	(433.907.412,00)	97,70
4.2.2	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	6.789.096.491,00	6.605.337.774,00	(183.758.717,00)	97,29
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	142.180.990.071,00	138.910.049.341,00	(3.270.940.730,00)	97,70
5.1	PERENCANAAN	6.924.780.874,00	6.637.947.501,00	(286.833.373,00)	95,86
5.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.014.374.524,00	3.863.572.014,00	(150.802.510,00)	96,24
5.1.2	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	867.552.000,00	828.037.996,00	(39.514.004,00)	95,45
5.1.3	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.296.170.100,00	1.214.580.276,00	(81.589.824,00)	93,71
5.1.4	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	746.684.250,00	731.757.215,00	(14.927.035,00)	98,00
5.2	KEUANGAN	128.717.876.290,00	126.170.692.723,00	(2.547.183.567,00)	98,02
5.2.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	11.485.600.001,00	11.110.584.492,00	(375.015.509,00)	96,73
5.2.2	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	115.618.689.209,00	39.423.004.583,00	(76.195.684.626,00)	34,10
5.2.3	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	783.480.980,00	552.527.600,00	(230.953.380,00)	70,52
5.2.4	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	830.106.100,00	610.718.048,00	(219.388.052,00)	73,57
5.3	KEPEGAWAIAN	6.538.332.907,00	6.101.409.117,00	(436.923.790,00)	93,32
5.3.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.361.442.107,00	4.080.088.266,00	(281.353.841,00)	93,55
5.3.2	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	796.958.200,00	772.530.740,00	(24.427.460,00)	96,93
5.3.3	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.379.932.600,00	1.248.790.111,00	(131.142.489,00)	90,50
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	5.850.197.210,00	5.590.572.654,00	(259.624.556,00)	95,56
6.1	INSPEKTORAT	5.850.197.210,00	5.590.572.654,00	(259.624.556,00)	95,56
6.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.140.500.110,00	4.070.670.590,00	(69.829.520,00)	98,31
6.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	1.261.171.900,00	1.113.795.800,00	(147.376.100,00)	88,31
6.1.3	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	448.525.200,00	406.106.264,00	(42.418.936,00)	90,54
7	UNSUR KEWILAYAHAN	14.246.167.731,00	13.970.840.787,00	(275.326.944,00)	98,07
7.1	KECAMATAN	14.246.167.731,00	13.970.840.787,00	(275.326.944,00)	98,07
7.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	14.145.970.231,00	13.871.308.287,00	(274.661.944,00)	98,06
7.1.2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	15.987.500,00	15.987.500,00	0,00	100,00
7.1.3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	62.210.000,00	62.045.000,00	(165.000,00)	99,73
7.1.4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00	100,00
7.1.5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	9.000.000,00	8.500.000,00	(500.000,00)	94,44
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	1.797.523.930,00	1.710.536.781,00	(86.987.149,00)	95,16
8.1	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1.797.523.930,00	1.710.536.781,00	(86.987.149,00)	95,16
8.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.057.208.002,00	1.009.064.253,00	(48.143.749,00)	95,45
8.1.2	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	35.000.000,00	24.250.000,00	(10.750.000,00)	69,29
8.1.3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	627.222.528,00	627.222.528,00	0,00	100,00
8.1.4	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	78.093.400,00	50.000.000,00	(28.093.400,00)	64,03



TOTAL BELANJA DAERAH	701.293.523.898,00	651.731.492.475,65	(49.562.031.422,35)	92,93
----------------------	--------------------	--------------------	---------------------	-------





BAB IV

PENUTUP



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

BAB IV

PENUTUP

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022, dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap Capaian kinerja (performance results) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 menggambarkan bahwa capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun 2022 menunjukkan keberhasilan untuk mewujudkan misi dan tujuan dalam RPJMD 2018-2023 dan telah memenuhi 4 (empat) tujuan dan 8 (delapan) sasaran strategis sebagaimana yang telah ditargetkan. Dari hasil analisis terhadap 4 tujuan diperoleh rata-rata capaian tujuan **92,32%** atau kategori capaian kinerja **“Berhasil”** yang mencakup 6 indikator kinerja tujuan dimana 4 indikator dalam kategori sangat berhasil 2 indikator berada pada kategori berhasil. Tingkat capaian 8 sasaran sebesar **97,13%** atau kategori capaian kinerja **“Sangat Berhasil”** yang mencakup 17 indikator kinerja sasaran, dapat diketahui bahwa keseluruhan dari 17 indikator kinerja sasaran 10 indikator dalam kategori sangat berhasil, 4 indikator berada pada kategori cukup berhasil dan 1 indikator kurang berhasil.

Pencapaian target indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara juga didukung dengan adanya alokasi anggaran belanja daerah dalam Perubahan APBD Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. **701.293.523.898,00,-** dengan realisasi sebesar Rp. **651.731.492.475,65,-** atau **92,93%**. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam RPJMD 2018-2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2022, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Implementasi proses bisnis dalam penyusunan perencanaan anggaran menjadi kunci utama dalam pencapaian target kinerja serta mendukung efektifitas dan efisiensi anggaran.



Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2022 ini. Secara garis besar disusun dalam rangka untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di masa-masa mendatang.

Boroko, 17 Maret 2023

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA





LAMPIRAN



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

bangga
melayani
bangsa

DAFTAR PENGHARGAAN
DIRAIH TAHUN 2022

NO	INSTANSI	TANGGAL	JENIS PENGHARGAAN	PENYELENGGARA	KETERANGAN	DOKUMENTASI
1	2	3	4	5	6	7
1	Dinas Kesehatan	06 Juli 2022	Piagam Penghargaan	Kementerian Dalam Negeri	Kab. Bolaang Mongondow Utara Sebagai Kabupaten/Kota Peringkat I Se- Provinsi SULUT Pada Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2021.	
2	Dinas Kesehatan	22 Juli 2022	Piagam Penghargaan	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sebagai Peringkat I Penilaian Kinerja Tahun 2022 pada kategori 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting di 4 Kabupaten Lokus Intervensi Tahun 2021 Provinsi Sulawesi Utara	

3	Dinas Kesehatan	18-Nov-22	Piagam Penghargaan	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Kepada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Atas Keberhasilan mempertahankan status ELIMINASI MALARIA	
4	Dinas Pertanian	16 Februari 2022	Piagam Penghargaan	Badan Pusat Statistik Kab. Bolmut	Sebagai Dinas/Instansi Pemberi data teraktif	
5	Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelihan	25-Nov-22	Piagam Penghargaan	Komisi Aparatur Sipil Negara	Kepada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Atas Keberhasilan menerapkan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara dengan predikat BAIK	

6	Badan Kepegawaian Pendidikan & Pelihan	18 Mei 2022	Piagam Penghargaan	Kantor Regional IX BKN	Kepada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Atas terpilihnya sebagai pemenang Kategori-III Penilaian Kompetensi	
7	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	23 Juli 2022	Piagam Penghargaan	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sebagai Kabupaten Layak Anak Peringkat Madya Tahun 2022	
8	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	15 Juni 2022	Piagam Penghargaan	BKKBN	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Juara 1 Kab/Kota Terbaik Tingkat Nasional Kelompok Target Pelayanan KB <500 Akseptor	

9	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak		Piagam Penghargaan	BKKBN	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sebagai Peserta Terbaik pada Rapat Kerja Daerah Program Bangga Kencana Tahun 2022	
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	15 Juni 2022	Piagam Penghargaan	BKKBN	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Juara 1 Kategori Capaian Total Pelayanan KB Tingkat Provinsi pada kegiatan Pelayanan KB Serentak Sejuta Akseptor	
11	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak	28 Oktober	Piagam Penghargaan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Kepada Dinas PPKBPP & PA Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Inovatif Dalam Inovatif Government Award Tahun 2022	

12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	11/14/2022	Piagam Penghargaan	PT. Bank Sulutgo	Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Peringkat II SKPD tebaik Exellent Service Agency	
13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20/12/2022	Piagam Penghargaan	Balai Guru Penggerak Prov. Sulut	Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Daerah Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan 2	
14	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20/12/2022	Piagam Penghargaan	Balai Guru Penggerak Prov. Sulut	Kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Atas Apresiasi dari Balai Guru Penggerak Prov. Sulut Tahun 2022 Atas Dukungan Terhadap Program Prioritas Kemdikbudristek (PGP,PSP,IKM)	

15	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19 Desember 2022	Piagam Penghargaan	Balai Penjamin Mutu Pendidikan	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sebagai Daerah responsif dalam Program Literasi Numerasi Melalui tim pemdamping Literasi Daerah	
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Agustu 2022	Piagam Penghargaan	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Kepada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Atas Capaian Target Nasional Sebagai Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran	
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	28 Oktober 2022	Piagam Penghargaan	Kab. Bolaang Mongondow Utara	DPMD Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Inovatif Dalam Inovatif Government Award Tahun 2022	

18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	15 Agustus 2022	Piagam Penghargaan	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Terbaik 1 Pengelola Dana Desa Semester I Tahun 2022	
19	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Sep-22	Piagam Penghargaan	Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara	Desa Dengi Kec. Pinogaluman Atas Keikutsertaan pada Pelaksanaan Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 dan Ditetapkan sebagai Juara IV	
20	Bagian Organisasi	Apr-22	Piagam Penghargaan	Kemenpan RB	Kepada Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Atas Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 dengan Predikat "B"	

21	Baadan Pengelola Keuangan Daerah	16 Februari 2022	Piagam Penghargaan	Badan Pusat Statistik Kab. Bolmut	BPKD Sebagai Dinas/Instansi Pemberi data terkonsisten	
11	Baadan Pengelola Keuangan Daerah	2 Juni 2022	Piagam Penghargaan	Kementerian Dalam Negeri	Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Peringkat Keempat Pemerintah Daerah Dengan Realisasi Belanja Daerah Tertinggi dari Tahun 2020 ke Tahun 2021 Kategori Kabupaten	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG
MONGONDOW UTARA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
UTARA TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa sesuai hasil reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018 - 2023;

Mengingat . . .

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN.05.2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 12 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2018 – 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

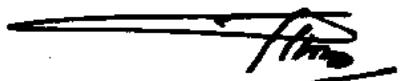
Pasal 2 . . .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
Pada tanggal 14 Maret 2022
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH

Diundangkan di Boroko
Pada tanggal 14 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2022 NOMOR 8

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
 NOMOR 8 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
 BOLAANG MONGONDOW UTARA NOMOR 12 TAHUN
 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 UTARA TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2023
 FORMULASI PENGUKURAN, TIPE PERHITUNGAN DAN SUMBER DATA

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN, TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	<p>► Formulasi pengukuran : Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Harapan Lama Sekolah (HLS)	<p>► Formulasi pengukuran : Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Angka Harapan Hidup (AHH)	<p>► Formulasi pengukuran : Jumlah penduduk (usia di atas 15 tahun) yang bisa menulis : Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x 100</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Dinas Kesehatan
4	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Riil Yang Disesuaikan (Daya beli)	<p>► Formulasi pengukuran : Rata-rata pengeluaran perkapita per tahun pada tahun: IHK tahun t x 100</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
5	Gini Ratio	<p>► Formulasi pengukuran : Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: G < 0,3 = ketimpangan rendah G 0,3 < G < 0,5 = ketimpangan Sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
6	Tingkat Pengangguran Terbuka	<p>► Formulasi pengukuran : Jumlah Pengangguran : Angkatan Kerja x 100%</p>	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
7	Persentase Keluarga Sejahtera	▶ Formulasi pengukuran : $\frac{(KS\ III + KS\ III\ Plus)}{(Total\ KS\ I\ s.d\ KS\ III\ Plus)} \times 100\%$	DPPKBPPPA
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
8	Opini BPK	▶ Formulasi pengukuran : Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah	Badan Pengelola Keuangan Daerah
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
9	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	▶ Formulasi pengukuran : 1.00 - 1.80 = Sangat Rendah 1.81 - 2.60 = Rendah 2.61 - 3.40 = Sedang 3.41 - 4.20 = Tinggi 4.21 - 5.00 = Sangat Tinggi	Sekretariat Daerah
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
10	Tingkat Kepuasan Masyarakat (rata-rata IKM)	▶ Formulasi pengukuran : Rata-rata IKM: Jumlah SKPD yang dinilai x 100%	Sekretariat Daerah
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
11	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	▶ Formulasi pengukuran : PDRB sektor pertanian : Total PDRB x 100%	Dinas Pertanian
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
12	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	▶ Formulasi pengukuran : PDRB sub sektor perikanan : Total PDRB x 100%	Dinas Kelautan dan Perikanan
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
13	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	▶ Formulasi pengukuran : PDRB sub sektor kesenian, hiburan dan rekreasi: Total PDRB sektor jasa lainnya x 100%	Dinas Pariwisata
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
14	Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	▶ Formulasi pengukuran : Jumlah Nilai Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	
15	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	▶ Formulasi Pengukuran : Persentase ketersediaan jalan kondisi mantap + Persentase daerah irigasi kabupaten kondisi baik : 2 x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		▶ Tipe Perhitungan : Absolut	

16	Cakupan <i>Universal Access</i>	<p>► Formulasi pengukuran : ((%Cakupan akses terhadap air bersih + (100-% kawasan kumuh) + %Cakupan akses terhadap sanitasi)) : 3 x 100%</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
17	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	<p>► Formulasi Pengukuran : Jumlah pemanfaatan ruang yang dilaksanakan sesuai rekomendasi : Jumlah rekomendasi yang diterbitkan x 100%</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
18	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<p>► Formulasi pengukuran : $IKLH = (IPA+IPU+ITH)/3$ IPA= Indeks Pencemaran Air Sungai IPU= Indeks Pencemaran Udara ITH= Indeks Tutupan Hutan</p> <p>► Tipe Perhitungan : Absolut</p>	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DEPRI PONTOH**
Jabatan : Bupati Bolaang Mongondow Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Boroko, Januari 2023
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA


DEPRI PONTOH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUN 2023
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1.1. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,55
	1.2. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,20
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1. Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,34
3. Meningkatnya daya beli masyarakat	3.1. Pengeluaran Perkapita Disesuaikan	Juta Rupiah	9,92
	3.2. Gini Ratio	Poin	0,33
4. Menurunnya beban pengeluaran keluarga	4.1. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,00
	4.2. Persentase Keluarga Sejahtera	%	45,00
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	5.1. Opini BPK	Predikat	WTP
	5.2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Predikat	Tinggi
6. Meningkatnya pelayanan public	6.1. Tingkat Kepuasan Masyarakat (rata-rata IKM)	%	87,50
7. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	7.1. Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	38,29
	7.2. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	11,30
	7.3. Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	1,00
	7.4. Realisasi Investasi (PMA/PMDN)	milyar	17,50
8. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	8.1. Cakupan <i>Universal Acces</i>	%	85,00
	8.2. Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	85,00
	8.3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	76,90

Anggaran Tahun 2023

Belanja	Rp. 628.996.263.922,00
Belanja Operasi	Rp. 419.090.026.063,00
Belanja Modal	Rp. 94.367.981.102,00
Belanja Tidak Terduga	Rp. 1.420.669.766
Belanja Transfer	Rp. 114.117.586.991
Surplus/(Defisit)	Rp. (21.403.851.774,00)
Pembiayaan Daerah	Rp. 21.403.851.774,00
Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 21.403.851.774,00
Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Anggaran Berkenaan	Rp. 0,00

Boroko, Januari 2023
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA



DEPRI BONTOH